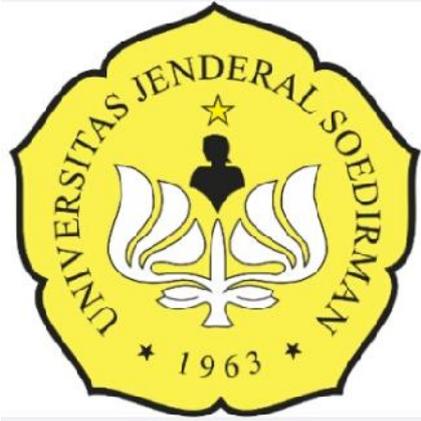


LAPORAN AKHIR TAHUN

PENELITIAN SOSIAL, HUMANIORA DAN PENDIDIKAN



MODEL HILIRISASI KONTRIBUSI KELOMPOK PEREMPUAN MUSLIMAT NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDER DI DAERAH

Tahun ke-1 dari Rencana 3 tahun

Tim Peneliti :

Dr. Soetji Lestari, M.Si.

NIDN : 0023056211

Dr. Sofa Marwah, S.IP. M.Si

NIDN : 0026047504

Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP.MA

NIDN : 0027107902

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

November 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL HILIRISASI KONTRIBUSI KELOMPOK PEREMPUANMUSLIMAT NU TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GENDERDI DAERAH

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Dra SOETJI LESTARI,
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman
NIDN : 0023056211
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Sosiologi
Nomor HP : 08122602616
Alamat surel (e-mail) : soetjilestari123@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr SOFA MARWAH S.IP, M.Si
NIDN : 0026047504
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman

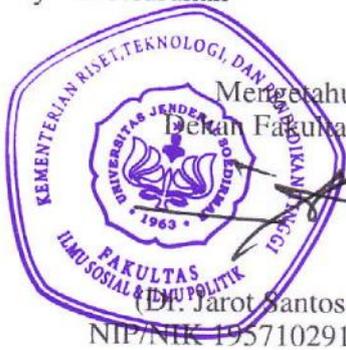
Anggota (2)

Nama Lengkap : OKTAFIANI CATUR PRATIWI S.IP., M.A.
NIDN : 0027107902
Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 79,622,500
Biaya Keseluruhan : Rp 296,422,500

Mengetahui,
Dean Fakultas ISIP



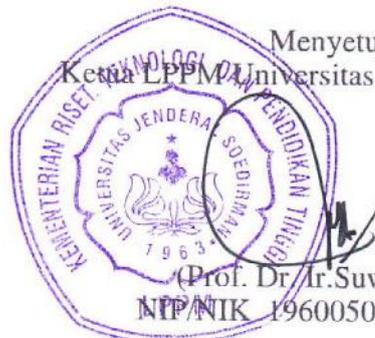
(Dr. Jarot Santoso, M.S.)
NIP/NIK 195710291986011001

Kota Purwokerto, 24 - 10 - 2017
Ketua,



(Dr. Dra SOETJI LESTARI,)
NIP/NIK 196205231988032001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman



(Prof. Dr/Ir.Suwarto.M.S)
NIP/NIK 196005051986011002

RINGKASAN

Capaian pembangunan manusia dan pembangunan gender masih menunjukkan kesenjangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di Kab. Banyumas misalnya, pada tahun 2012, HDI 73,33 namun indeks GDI adalah 65,02. Di sisi lain, keterlibatan kelompok perempuan Muslimat NU sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan gender. Namun program kerja Muslimat NU masih terkesan terpisah dengan program dan kegiatan pembangunan gender daerah. Untuk itu penelitian ini bertujuan menyusun model hilirisasi kontribusi Muslimat NU terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan gender di daerah.

Untuk itu pada tahun pertama penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan dinamika kelompok perempuan Muslimat NU di Indonesia; rumusan isu dan permasalahan yang terkait program kerja Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja; serta rumusan isu dan permasalahan gender yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di daerah; Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan sasaran penelitian adalah para pengurus Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder sebagai penunjang. Untuk mengetahui permasalahan gender yang ada juga dilakukan workshop dengan narasumber dari berbagai bidang isu gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Muslimat NU adalah organisasi yang berlandaskan agama yang memfokuskan kegiatannya di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan dan misionaris. *Kedua*; Keberadaan Muslimat NU Banyumas didukung oleh identitas khas yang mewakili kekuatan gerakan perempuan yang berlandaskan agama. Identitas spesifik dicirikan oleh pengurusnya yang menjalankan tugas organisasinya berdasarkan prinsip sukarela dan tanpa pamrih. Anggota organisasi menjalankan tugas organisasinya tanpa mendapatkan gaji dan publikasi media. Melalui kinerja tersebut, mereka menanamkan semangat untuk mengembangkan organisasi menjadi kelompok mandiri. Kekompakan di antara anggota diperkuat oleh keyakinan bersama mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari misi untuk berjuang di jalan 'Allah'. Kekuatan identitas tertentu gerakan Muslimat NU menunjukkan pentingnya melibatkan organisasi ini dalam proyek pengembangan gender di tingkat lokal;

Ketiga, sebagai organisasi perempuan yang mandiri bergerak dibidang sosial keagamaan, Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja memiliki potensi dalam hal sumber daya anggota yang banyak, dua struktur organisasi dalam satu kabupaten, bidang organisasi cukup lengkap, kepercayaan pada pimpinan, ikatan sosial kultural yang kuat, pendanaan mandiri bersumber dari *kalengan* atau *pithian*, jaringan sosial berbasis kultural cukup kuat; *Keempat*, berdasarkan kerangka analisis Munro yang digunakan, studi ini juga menemukan bahwa terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja saat ini, namun keduanya memiliki potensi yang kuat untuk diajak bersama-sama oleh SKPD-SKPD terkait untuk mencapai hasil pembangunan berperspektif gender yang lebih baik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-hukum, dan ekonomi ketenagakerjaan.

Kata kunci ; Muslimat NU, pembangunan gender, potensi

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, bahwa atas rahmad dan karunia-NYA, kami dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian (tahun pertama) yang berjudul: “Model Hilirisasi Kontribusi Kelompok Perempuan Muslimat NU Terhadap Kebijakan Pembangunan Gender di Daerah” ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.

Dengan selesainya laporan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Ketua LPPM Unsoed yang telah berkenan membantu dan memfasilitasi segala proses administrasi penelitian..
 2. Dekan FISIP Unsoed yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.
 3. Para Pengurus Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja yang telah bersedia sebagai mitra dalam penelitian ini, khususnya kepada ketua pengurusnya yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancara di tengah kesibukan bulan puasa Ramadhan.
 4. Para narasumber workshop yang telah berkenan berbagi ilmunya di hari libur kerja.
 5. Ibu Dr. Tyas Retno Wulan Koordinator PPGA LPPM Unsoed yang telah memfasilitasi jalannya workshop sekaligus membuka acara ini.
 6. Bapak Miftah dan mbak Kiki yang telah ikut membantu urusan teknis jalannya penelitian
 7. Semua pihak yang telah membantu dari proses awal penelitian sampai selesai
- Semoga Allah membalas dan memberkahi kebaikan Bapak/Ibu semua.

Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan penelitian ini, kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penelitian lebih lanjut sebagai upaya kita mencapai kesetaraan gender. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih

Purwokerto, Oktober 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Potensi dan Kondisi Sosial	4
1.3. Urgensi Penelitian dalam Pembangunan Lokal dan Nasional	5
1.4. Luaran Penelitian	6
1.5. Gambaran produk dan penerapannya	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Kajian Pustaka (<i>State Of The Art</i>)	7
2.2. Studi Pendahuluan	10
2.3. Peta Jalan Penelitian	10
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
3.1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama	12
3.2. Manfaat Penelitian	12
BAB 4. METODE PENELITIAN	13
4.1. Metode Penelitian	13
4.2. Pendekatan Penelitian	13
4.3. Tahapan Penelitian	14
4.4. Penentuan Lokasi Penelitian	16
4.5. Penetapan Subjek dan Informan Penelitian	16
4.6. Teknik Pengumpulan Data	17
4.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	17
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	19

5.1	Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	19
5.2	Gambaran Perempuan dalam Pembangunan di Banyumas	24
5.3.	Peta Organisasi Perempuan dalam GOW	35
5.4.	Identifikasi Isu dan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Banyumas	38
5.5.	Sejarah dan Perkembangan Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja	69
5.6.	Identifikasi Potensi dan Permasalahan Muslimat NU Kabupaten Banyumas	83
5.7.	Inisiasi Sinkronisasi Program Kerja Muslimat NU dengan Kebijakan Responsif Gender Kabupaten Banyumas	110
5.8.	Luaran Yang Dicapai	117
BAB 6	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	118
BAB 7	KESIMPULAN DAN SARAN	119
7.1.	Kesimpulan	119
7.2.	Saran	120
	DAFTAR PUSTAKA	121
	DAFTAR LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.1.	Analisis Awal Data Pilah Gender Kabupaten Banyumas	3
4.1.	Model Analisis Gender Munro	18
5.1.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2015	21
5.2.	Persentase Penduduk dan Kepadatan penduduk per km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2015	22
5.3.	Jumlah dan Persentase Keluarga Sejahtera Berdasarkan Tahapannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2016	23
5.4.	Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015	27
5.5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2010- 2015 dalam Konteks Regional dan Nasional	28
5.6.	Komponen IPG Kabupaten Banyumas Tahun 2015	29
5.7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas Tahun 2015	30
5.8.	Komponen IDG Kabupaten Banyumas Tahun 2015	30
5.9.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2015	31
5.10	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Banyumas 2013-2014	32
5.11.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2015	34
5.12.	Daftar Organisasi Anggota GOW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012	36
5.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyumas 2012 Dirinci menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin	42
5.14.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banyumas 2012 Dirinci menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin	43
5.15	Angka Melek Huruf di Kabupaten Banyumas Dirinci menurut Jenis Kelamin	43
5.16	Partisipasi Sekolah Dirincikan Berdasarkan Kelompok Umur Sekolah	44
5.17.	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Pemkab Banyumas Tahun 2016	47

5.18.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bidang Pendidikan 2018	48
5.19	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2010-2015 pada Aspek Pelayanan Umum	52
5.20.	PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2015	54
5.21	PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Tahun 2011-2015	55
5.22.	Laju Inflasi Tahun 2012-2016	56
5.23	Indeks Gini Ratio Tahun 2012-2016	57
5.24.	Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2016	58
5.25.	Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas 2014-2016	62
5.26	Jumlah Kasus Kekerasan yang Ditangani oleh PPT PKBGA	63
5.27	Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Banyumas Ditangani PPT PKBGA	63
5.28	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018	65
5.29.	Program Kerja Muslimat NU Banyumas 2016	77
5.30	Identifikasi Potensi dan Permasalahan MNU Banyumas dan MNU Sokaraja	100
5.31	Kesesuaian Program Kerja Muslimat NU dan dengan Kebijakan Responsif Gender Kabupaten Banyumas dalam Kerangka Analisis Munro	113

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.1.	Perbandingan HDI dan GDI Kab. Banyumas, Jateng, Nasional	2
2.1.	Peta Jalan Penelitian	11
5.1.	Peta Administratif Kabupaten Banyumas	20
5.2.	Tren Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015 dalam Perspektif Regional dan Nasional	26
5.3.	Lambang Organisasi Muslimat NU	73

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|----|--|
| LAMPIRAN | 1. | Dokumentasi Kegiatan |
| LAMPIRAN | 2. | Bukti <i>Accepted</i> Makalah Konferensi Internasional |
| LAMPIRAN | 3. | Bukti Submit ke Jurnal Nasional Terakreditasi |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

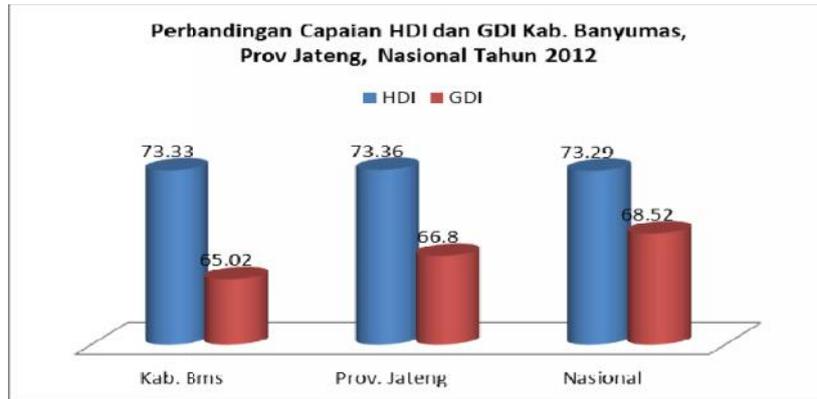
Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia ditandai dengan terbitnya Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Sesuai ketentuan tersebut, perencanaan strategis pembangunan dan penganggaran harus mengintegrasikan konsep pembangunan gender pada setiap level kebijakan yang diambil. Ketika kebijakan pembangunan memiliki mekanisme dan pengalokasian anggaran berperspektif gender, maka indeks capaian pembangunan gender akan mendekati capaian indeks pembangunan manusia.

Capaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan selama sembilan tahun terakhir. Namun demikian masih terdapat kesenjangan antara kapabilitas perempuan dibanding laki-laki, yang ditunjukkan dengan selisih GDI dan HDI. Pada tahun 2012, HDI mencapai 73,29 tetapi GDI-nya 68,52. HDI atau *Human Development Index* adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan GDI adalah indeks pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan antara capaian perempuan dan laki-laki.¹

Persoalan disparitas capaian HDI dan GDI tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga terjadi di level daerah. Di Kabupaten Banyumas misalnya, pada tahun 2012 capaian HDI 73,33, namun indeks GDI adalah 65,02. Sebagai perbandingan, di level Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2012 capaian HDI adalah 73,36 dan capaian GDI adalah 66,8. Secara rinci perbandingan kesenjangan capaian pembangunan gender dan pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah maupun nasional dirincikan dalam grafik sebagai berikut :

¹ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Berbasis Gender 2013*. Jakarta, 2013.

Gambar 1.1. Perbandingan HDI dan GDI Kab. Banyumas, Jateng, Nasional



Sumber : KPPA & BPS. *Pembangunan Berbasis Gender 2013*, diolah

Pengarusutamaan gender di tingkat daerah membutuhkan komitmen aparat dan seperangkat aturan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan suatu daerah sudah mengintegrasikan isu gender. Selain itu, implementasi kebijakan pembangunan berperspektif gender tetap membutuhkan dukungan semua unsur masyarakat. Salah satu unsur masyarakat yang penting untuk dikaji dalam mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan berperspektif gender di daerah adalah kelompok perempuan Muslimat NU.

Sebagai kelompok perempuan yang besar dan mandiri, eksistensi kegiatan perempuan Muslimat NU sudah dikenal sangat luas. Mereka memiliki anggota perempuan golongan *nahdliyin* dalam jumlah yang sangat besar dan terhierarkhi dari kepengurusan pusat sampai kepengurusan desa. Ikatan pada organisasi Muslimat NU bersifat mengakar dan mendalam sehingga mendukung posisi strategis Muslimat NU. Dukungan keanggotaan yang sangat banyak dan mendalam, menunjukkan potensi peran strategis anggota Muslimat NU untuk mendukung implementasi kebijakan berperspektif gender sekaligus menjadi *gender vocal point* di masyarakat. Berkaitan dengan hal itu penelitian ini diarahkan untuk membuat model program kerja kelompok perempuan Muslimat NU agar senantiasa sejalan dengan kebijakan pembangunan gender di daerah, sehingga terdapat hilirisasi program kerja Muslimat NU dengan permasalahan dan kesenjangan

gender yang menjadi fokus dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan gender pemerintah daerah.

Selanjutnya berikut ini digambarkan mengenai isu dan permasalahan gender yang masih melingkupi proses pembangunan di Kabupaten Banyumas (Tabel 1). Analisis awal terhadap data pilah gender di Kabupaten Banyumas di bawah ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan dalam berbagai sektor strategis pembangunan belum dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara adil dan merata.

Tabel 1.1. Analisis Awal Data Pilah Gender Kabupaten Banyumas

No.	Sektor Strategis Pembangunan	Keterangan
1	Pendidikan	1. APK SD = L 104,9; P 100 APK SMP = L 91,5; P 97,7 APK SMA = L 75,6; P 79,9 2. APM SD = L 89,1; P 85,5 APM SMP = L 66,7 ; P 68,8 APM SMA= L 50,1; P 50,8
2	Kesehatan	1. Angka kematian ibu 32 kasus 2. Penderita HIV/AIDS perempuan 121 org
3	Politik	1. Anggota DPRD Banyumas 2014-2019 = L 41; P 9 2. PNS Pemkab Banyumas = Eselon IIA; L 1 P 0; Eselon IIB L 24 P 3 org
4	Ekonomi-ketenagakerjaan	1. Jumlah pengangguran = L 22.167; P 17.432 org 2. Jumlah tenaga kerja formal = L 20.509; P 11.329 3. Jumlah pelaku usaha = L 76.679; P 44.167 org 4. Jumlah TKI = L 108; P 1.679 org
5	Hukum	1. KDRT = 50 kasus 2. Korban kekerasan = L 10; P 105 org
6	Sosial-budaya	1. Penyandang masalah sosial = L 8.529; P 12.466 org 2. Tuna susila = L 282; P = 117 org

Sumber : *Sistem Informasi Gender dan Anak Pemkab Banyumas 2013, diolah*

Tabel di atas menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan yang menyangkut belum maksimalnya angka partisipasi sekolah, kasus kematian ibu, cukup banyaknya perempuan penderita HIV/AIDS, rendahnya keterwakilan politik perempuan, banyaknya buruh migran perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan, merupakan sebagian dari permasalahan gender yang belum terselesaikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengintegrasikan pokok-pokok permasalahan gender yang menjadi

fokus kebijakan pembangunan daerah tersebut dengan program kerja Muslimat NU, sehingga terdapat hilirisasi kontribusi Muslimat NU dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan gender di daerah.

1.2. Perumusan Potensi dan Kondisi Sosial

Muslimat NU merupakan organisasi massa perempuan non-pemerintah yang memiliki potensi sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang dilakukan. Secara umum dipahami bahwa program kerja Muslimat NU masih terkesan terpisah dengan permasalahan krusial yang menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah. Padahal, Muslimat NU Banyumas misalnya, memiliki anggota yang tersebar sampai ke pelosok perdesaan dengan jumlah yang sangat banyak dan memiliki akar yang mendalam, dengan intensitas program kerja yang cukup tinggi. Apalagi kepengurusan Muslimat NU level Kabupaten Banyumas memiliki dua pengurus cabang, yaitu Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja. Di sisi lain, Kabupaten Banyumas masih memiliki permasalahan dan kesenjangan gender terlihat dari indeks pembangunan gender yang terpaut cukup jauh dengan indeks pembangunan manusia, yaitu HDI 73,3 dan GDI 65,02 (Tahun 2012). Dengan demikian sangat penting untuk menyusun model hilirisasi kontribusi kelompok perempuan Muslimat NU untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang berperspektif gender dalam sektor-sektor strategis pembangunan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi-ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya. Hasil kajian dan model yang tersusun dapat menjadi referensi bagi kepengurusan Muslimat NU daerah-daerah lain di Indonesia agar program kerja yang dilakukan senantiasa berjalan beriringan dengan fokus kebijakan pembangunan gender di masing-masing daerah.

1.3. Urgensi Penelitian dalam Pembangunan Lokal dan Nasional

Kelompok perempuan memegang peranan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berperspektif gender. Misalnya, kelahiran UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu maupun UU. No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang mengatur ketentuan kuota 30 % perempuan di parlemen, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan sebagainya. Kelahiran berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan kelompok perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Adanya peran penting berbagai kelompok perempuan di atas mendorong pentingnya mengkaji kontribusi kelompok perempuan strategis lainnya, seperti halnya Muslimat NU. Secara faktual, Muslimat NU memiliki keanggotaan yang demikian besar dan tersebar di tingkat nasional sampai ranting di pelosok perdesaan. Dalam hal ini Muslimat NU telah menyatukan perempuan golongan *nahdliyin* yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dengan ikatan sosial sangat mendalam dan mengakar.

Khusus untuk Kabupaten Banyumas memiliki dua kepengurusan cabang yaitu Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja dikarenakan perkumpulan perempuan Muslimat NU Sokaraja lebih dahulu terbentuk dan terlibat dalam pembentukan Muslimat NU nasional ketika Kongres ke-15 di Purwokerto tahun 1946. Ketika kepengurusan Muslimat NU Banyumas terbentuk tahun 1947, kepengurusan Muslimat NU Sokaraja tetap terpisah sampai sekarang.² Dengan memahami posisi strategis Muslimat

² Sofa Marwah, *Representasi Politik Perempuan Banyumas : Antara Kultur dan Realitas Politik*, Disertasi Program S3 Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, h.100.

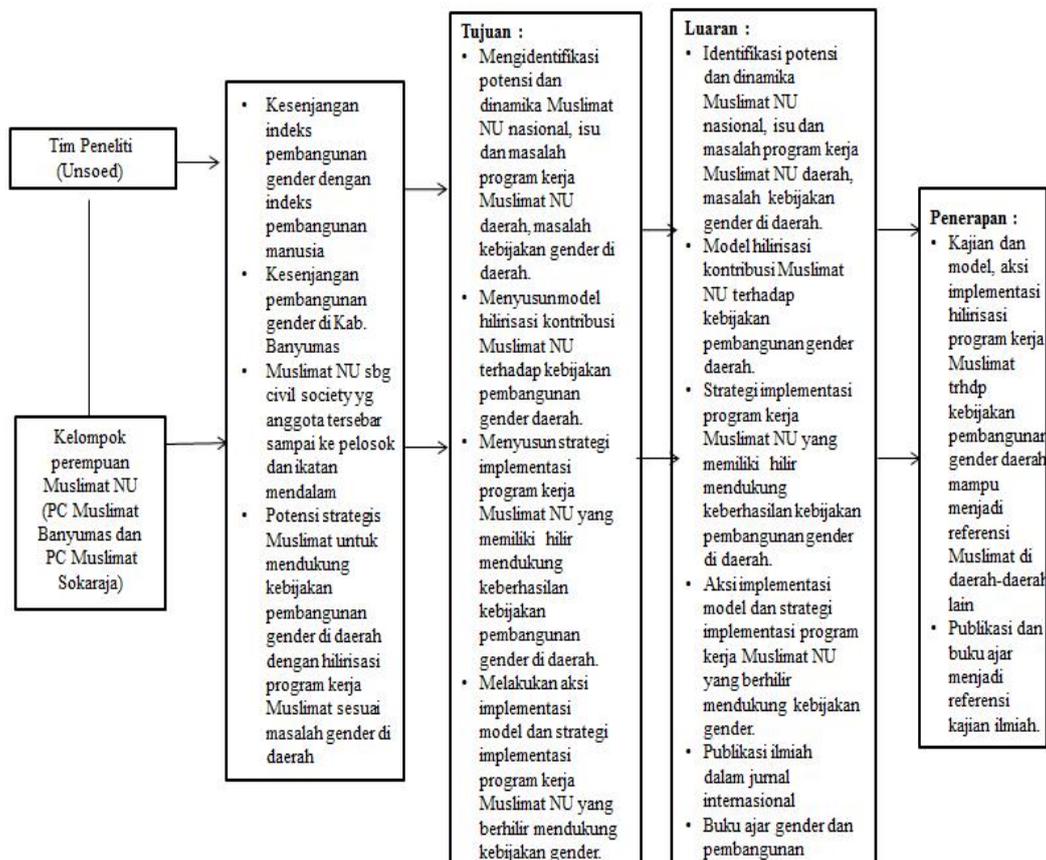
NU, sangat penting untuk menghasilkan kajian yang mendorong potensi Muslimat NU menjadi lokomotif keberhasilan pembangunan berperspektif gender di daerah.

1.4. Luaran Penelitian

Luaran Tahun Pertama

1. Identifikasi potensi dan dinamika kelompok perempuan Muslimat NU di Kabupaten Banyumas, rumusan isu dan permasalahan yang terkait program kerja Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja, serta rumusan isu dan permasalahan gender yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Banyumas.
2. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi, dengan artikel ilmiah mengenai *potensi, permasalahan, dan dinamika eksistensi Muslimat NU di daerah, serta relevansinya dengan permasalahan gender di daerah*, direncanakan dimuat dalam Jurnal Terakreditasi Nasional Jurnal Sosiologi Masyarakat UI.

1.5. Gambaran Produk dan Penerapannya



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka (*State Of The Art*)

Eksistensi Muslimat NU sebagai kelompok perjuangan perempuan secara teoritis merujuk pada karakter *civil society*. *Civil society* adalah ruang terpisah bagi organisasi, menjadi bentuk komunikasi dan wacana yang reflektif, penguasaan individu atau kelompok yang bertindak secara kolektif serta menyebarkan alat sipil untuk mempengaruhi negara serta kebijakannya, tetapi tidak untuk mengambil kekuasaan negara, dan tidak dimotivasi untuk mendapatkan keuntungan.³ Tradisi Tocqueville menjelaskan bahwa *civil society* bekerja dalam kondisi kesetaraan sosial ekonomi dan kebebasan politik. Konsepsi Tocqueville tentang *civil society* didasarkan pada pembatasan negara terhadap ruang publik, jaminan kerangka kerja yang legal serta kondisi yang lain (seperti kesetaraan sosial ekonomi) yang diperlukan untuk fungsi efektif dari *civil society*. Adapun konsepsi Gramsci tentang *civil society* meliputi semua institusi sosial relasi non-produksi, non-pemerintahan, non kekeluargaan, melibatkan mulai dari kelompok bersantai sampai kelompok dagang, gereja dan partai politik. Dalam keterkaitan hubungan ekonomi, negara dan *civil society* yang rumit, yang saling tumpang tindih dan saling melengkapi, pada prinsipnya telah menumbuhkan bentuk-bentuk hegemoni sebagai hasil persentuhan kekuatan yang koersif, namun pada saat yang sama diterima sebagai konsesus.⁴ Selain karena secara kuantitas banyak, Muslimat NU juga bergerak pada berbagai level, dari tingkat pusat sampai daerah, dengan membawa isu-isu pemajuan perempuan di berbagai bidang. Mereka bergerak bukan untuk menguasai negara, tetapi demi kemajuan kelompok perempuan.

Namun demikian, nilai patriarkhi menjadi penyebab sebab "sulitnya" peletakkan kelompok perempuan sebagai kekuatan *civil society*. Subordinasi akibat patriarkhi

³ Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia*, Stanford California: California University Press, 2004. h. 9.

⁴ *Ibid.*

terhadap perempuan menjadi penghalang bagi lahirnya kelompok perempuan sebagai kekuatan *civil society*. Patriarki telah tumbuh dan berkembang menjadi cara pandang utama untuk menjelaskan ketertinggalan perempuan di berbagai sudut dunia.⁵ Patriarki menjadi nilai yang universal, dan sukses menempati posisi utama untuk melihat penderitaan perempuan oleh laki-laki. Dari ruang yang paling privat, patriarki telah masuk pada lingkup masyarakat sampai tingkat negara. Nilai patriarki secara umum telah berlaku atau beroperasi pada hampir semua institusi sosial, ekonomi, hukum, politik maupun budaya.

Betapapun nilai patriarki beroperasi pada hampir semua institusi, namun banyak momen yang telah menunjukkan keberadaan kelompok perempuan sebagai elemen civil society, mampu bertindak tidak dengan hasrat politik maupun ekonomi, tetapi untuk keadilan dan kesetaraan dalam kerangka demokratisasi. Merekalah bagian dari kekuatan perempuan yang berupaya untuk berstrategi dan bertindak mencapai keadilan, kebenaran, kebaikan baik semua kelompok, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Penting untuk dipahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan bertujuan mewujudkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) adil dan sejahtera. Namun pada kenyataannya, pembangunan belum memberi manfaat secara adil kepada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang semula dianggap “netral” dan akan memberi efek manfaat yang sama kepada semua warga, ternyata memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Dengan demikian, sangat penting untuk menjadikan tujuan pembangunan agar dirasakan secara nyata oleh laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender menjadi strategi utama untuk memastikan apakah perempuan dan

⁵ Jane Pilcher & Imelda Whelehan. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication, 2004.

laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Melalui pengarusutamaan gender dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mendorong perempuan sebagaimana halnya laki-laki dalam hal perhatian dan pengalaman, pada dimensi yang terintegrasi mulai dari desain, implementasi, sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pada semua aspek politik, ekonomi, dan sosial, agar kesetaraan dan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dapat dicapai.⁶ Dengan mengarusutamakan gender ke dalam berbagai lini pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan akan berjalan efisien, berkelanjutan, dan adil. Lini pembangunan yang dimaksudkan mencakup sektor-sektor strategis pembangunan yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, hukum, dan sosial budaya.

Pengarusutamaan gender mulai diterapkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Beberapa prinsip penting dalam pengarusutamaan gender menurut pengertian definisi dari PBB, ILO, UNDP, yaitu : 1) Pengarusutamaan gender untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender; 2) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan lintas sektoral dan di semua tingkatan, baik nasional maupun daerah; 3) Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam agenda pembangunan; 4) Mengadopsi perspektif gender ke dalam setiap tahapan siklus perencanaan; 5) Mentransformasikan keseluruhan proses dan kerangka perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender; 6) Selalu memperhitungkan dampak dari peran gender dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan,

⁶ Shirin M Rai, *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge : Polity Press, 2002, h.173.

khususnya dampak negatif terhadap perempuan; 7) Menciptakan suasana kondusif agar *gender mainstreaming* lebih mudah diterima.

2.2 Studi Pendahuluan

Beberapa studi tentang gerakan sosial perempuan baik melalui organisasi formal maupun informal telah dilakukan antara lain oleh:

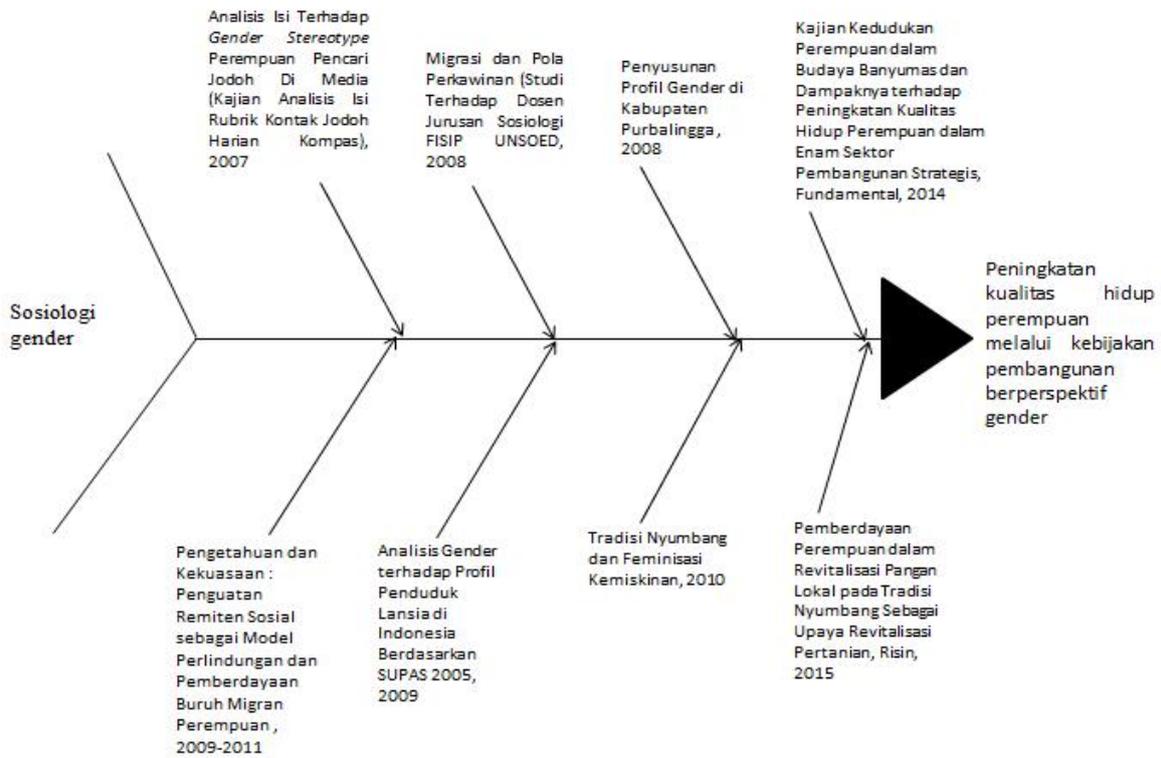
1. Rahayu Relawati, “Penguatan Jaringan Usaha Melalui Wadah Organisasi Perempuan : Studi Kasus pada Usaha Milik Aisyiah,” dalam *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*, Bandung : CV Muara Indah, 2011.
2. Rebeka Harsono, Gerakan Perempuan : Antara Kepentingan Perempuan dan Politik Gender, dalam Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta : PSPK UGM dan Pustaka Pelajar, 2006.
3. Darmawan Triwibowo, Miranti Husein, Beka Ulung Hapsara, “Mengubah Seteru Menjadi Sekutu : Aktivisme Ornop Perempuan dalam Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Perempuan di Indonesia,” dalam Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, Jakarta : LP3ES, 2006.

Dari beberapa studi gerakan sosial perempuan yang ada tersebut, studi ini mencoba untuk memperlihatkan bagaimana organisasi perempuan berbasis agama seperti Muslimat NU memiliki cara tersendiri dalam melakukan gerakan sosial untuk mencapai peningkatan kualitas hidup perempuan, guna ikut mewujudkan kebijakan pembangunan berperspektif gender.

2.3 Peta Jalan Penelitian

Ketua peneliti memiliki peta jalan penelitian pada sosiologi gender untuk mencapai peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan pembangunan berperspektif gender, dengan detail peta jalan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Peta Jalan Penelitian



BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama

1. Untuk mengidentifikasi potensi dan dinamika kelompok perempuan Muslimat NU di Kabupaten Banyumas; merumuskan isu dan permasalahan yang terkait program kerja Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja; serta merumuskan isu dan permasalahan gender yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Banyumas.
2. Menyusun artikel ilmiah untuk publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, dengan artikel ilmiah mengenai *potensi, permasalahan, dan dinamika eksistensi Muslimat NU di daerah, serta relevansinya dengan permasalahan gender di daerah*, direncanakan dimuat dalam Jurnal Terakreditasi Nasional Jurnal Sosiologi Masyarakat UI.

3.2. Manfaat Penelitian

- Tersedianya kajian lengkap mengenai pemetaan potensi dan dinamika Muslimat NU di Kabupaten Banyumas, serta model dan strategi hilirisasi kontribusi kelompok Muslimat NU terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan gender di tingkat daerah, berbasis kondisi di Kabupaten Banyumas, yang dapat menjadi referensi bagi keselarasan dan hilirisasi program kerja Muslimat NU dengan kebijakan pembangunan gender di daerah lain di seluruh Indonesia.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada penjelasan Strauss dan Corbin, yaitu mengenai keyakinan peneliti berdasarkan pada pengalaman penelitian dan sifat dari permasalahan. Banyak wilayah studi yang secara alamiah mengarahkan peneliti lebih pada penelitian kualitatif.⁷ Alasan penggunaan metode kualitatif adalah; *pertama*, pendekatan kualitatif memiliki kelebihan dalam mengkonstruksikan realitas sosial, makna budaya, mempunyai fokus pada proses interaktif maupun peristiwa.⁸ *Kedua*, pendekatan kualitatif mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.

4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian aksi yang berperspektif gender, yaitu menggabungkan orientasi gender dalam bentuk penelitian feminis aksi partisipatif (*Feminis Participatory Action Research – FPAR*). Dalam *FPAR* peneliti mengamati suatu proses sosial atau aksi yang sedang berlangsung dan menuliskannya, dan selanjutnya mendesain suatu bentuk intervensi.⁹ Pelaksanaan *FPAR* ini menegaskan pentingnya prinsip-prinsip : (1) Pengetahuan tidak ditransfer dari peneliti, tetapi muncul dengan sendirinya dari perempuan; (2) Memiliki fokus pada perempuan; (3) Pengetahuan yang muncul dapat diakses oleh setiap orang; (4) Memberikan penghormatan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat selama pelaksanaan *FPAR*. *FPAR* berperan untuk meningkatkan

⁷ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills, SA: Sage Publications, 1990. hal.19.

⁸ Lawrence Newman *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approachs*, Boston: Allyn and Bacon, 1994, hal. 14.

⁹ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Kalyanamitra : Jakarta, 1997, hal. 497.

kualitas hidup kaum perempuan, melalui peningkatan kontribusi kelompok perempuan Muslimat NU terhadap kebijakan pembangunan gender di daerah.

4.3. Tahapan Penelitian

Tahun	Tahapan Penelitian	Peran Peneliti	Peran Mitra
Tahun ke-1	1. Melakukan identifikasi mengenai potensi dan dinamika Muslimat NU di Indonesia berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait	Melakukan pemetaan	-
	2. Melakukan identifikasi awal terhadap informasi kebijakan pembangunan berperspektif gender dan melakukan analisis data terpilah di tingkat pembangunan daerah.	Melakukan identifikasi kebijakan	Menyiapkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan
	3. Menggali identifikasi awal mengenai isu dan permasalahan dalam perencanaan, penyusunan dan implementasi program kerja Muslimat NU sebagai sasaran penelitian.	Mendalami dokumen, wawancara	Menyiapkan informasi yang dibutuhkan
	4. Mencari dan menemukan <i>contact person</i> , mengidentifikasi aktor-aktor dalam komunitas dan melakukan pemetaan kondisi sasaran penelitian.	Memetakan aktor dan kondisi sasaran	Membantu memberikan informasi
	5. Membuka jalan dan melakukan dialog mendalam melalui wawancara, FGD dengan perempuan Muslimat NU. Proses ini didukung berdiskusi dengan pakar sebagai narasumber. FGD dilakukan masing-masing kelompok dua kali.	Melakukan wawancara dan FGD	Mengikuti FGD sebagai sasaran kegiatan
	6. Melakukan analisis gender dengan menggunakan teknis analisis Munro, didukung dengan analisis kualitatif terkait isu gender di daerah	Melakukan analisis	-
	7. Menyusun draf hasil analisis yang didukung konsultasi dengan pakar	Menyusun draf	-
	8. Menyusun laporan penelitian Tahun ke-1	Menyusun laporan penelitian	-
	9. Menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.	Menyusun artikel ilmiah	
Tahun	Tahapan Penelitian	Peran Peneliti	Peran Mitra
Tahun ke-2	1. Menyampaikan laporan penelitian Tahun ke-1 kepada mitra melalui penyerahan dan	Menyampaikan laporan	Berdiskusi dan menerima laporan

	diskusi		
	2. Melakukan diskusi tim berdasarkan masukan mitra dan menyiapkan FGD dan wawancara	Melakukan persiapan	
	3. Melaksanakan FGD untuk mengambil alternatif-alternatif tindakan yang paling tepat sebagai <i>problem solving</i> untuk mendorong kontribusi Muslimat NU terhadap kebijakan pembangunan daerah	Melakukan wawancara dan FGD	Mengikuti FGD sebagai sasaran kegiatan
	4. Mengkaji hasil FGD dan menuangkannya dalam bentuk model dan strategi perencanaan dan implementasi program kerja Muslimat NU yang sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah	Mengkaji hasil FGD	
	5. Menyusun model penguatan kontribusi Muslimat NU terhadap kebijakan pembangunan daerah, melalui program kerja yang dilakukan. Didukung konsultasi dengan pakar	Menyusun model	
	6. Menyusun strategi hilirisasi program kerja Muslimat NU dengan kebijakan pembangunan daerah.	Menyusun strategi	
	7. Menyusun laporan penelitian Tahun ke-2	Menyusun laporan	
	8. Menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi	Menyusun artikel ilmiah	
Tahun 3	Tahapan Penelitian	Peran Peneliti	Peran Mitra
Tahun ke-3	1. Menyampaikan laporan penelitian tahun ke-2 kepada mitra melalui penyerahan dan diskusi	Menyampaikan laporan	Berdiskusi dan menerima laporan
	2. Berkonsultasi dengan pakar untuk implementasi model, strategi, dan mendukung penyusunan buku ajar	Konsultasi	
	3. Implementasi model dan strategi hilirisasi kontribusi Muslimat terhadap kebijakan gender daerah		
	4. Berkonsultasi dengan mitra untuk perkembangan implementasi kebutuhan penyusunan buku ajar	Konsultasi	Diskusi
	5. Menyusun rancangan buku ajar dan membagi tugas tim	Menyusun rancangan	
	6. Menyusun laporan Tahun ke-3	Laporan	
	7. Menyusun buku Gender dan Civil Society	Buku	
	8. Menyampaikan laporan Tahun ke-3 kepada mitra melalui	Menyampaikan laporan	Berdiskusi dan menerima laporan

	penyerahan dan diskusi		
	9. Menyusun artikel ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional	Menyusun artikel	

4.4. Penentuan Lokasi Penelitian

Untuk memetakan potensi dan dinamika Muslimat NU di Indonesia, dilakukan melalui kajian pustaka. Adapun untuk studi empirik, lokasi penelitian adalah Muslimat NU Sokaraja dan Muslimat NU Banyumas yang terletak di Kabupaten Banyumas. Meskipun Muslimat NU tingkat cabang di daerah lain di Indonesia, terdapat hanya satu kepengurusan dalam satu kabupaten, namun dikarenakan unsur kesejarahan maka di Kabupaten Banyumas terdapat dua kepengurusan cabang Muslimat NU, yaitu Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja.

4.5. Penetapan Subjek dan Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive* bersifat sementara, mengoptimalkan keragaman, memungkinkan perubahan sesuai dengan informasi dan pemahaman di lapangan, dan jumlahnya sesuai prinsip kejenuhan informasi.¹⁰ Dalam hal ini informan penelitian adalah perempuan pengurus Muslimat NU, baik di tingkat kepengurusan cabang maupun anak cabang, yaitu dari Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas, dan Pengurus Cabang Muslimat NU Sokaraja, yang dipilih secara *purposive*, serta pihak beberapa SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsonakertrans, BapermasPKB, dan sebagainya sebagai narasumber.

¹⁰ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* alih bahasa Tri Wibowo, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007, hal. 26.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara (*interviewing*), studi dokumen (*reading*), dan observasi (*watching*).¹¹ Secara rinci sebagai berikut :

- 1) Wawancara; teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tak-terstandarisasi yaitu wawancara yang mengalir bebas, bergantung pada kualitas interaksi sosial antara peneliti dan informan, dan dapat diluruskan kembali oleh peneliti jika pembicaraan menyimpang dari tema studi ini.¹² Wawancara dilakukan terhadap informan-informan di atas.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) ,¹³ merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk meminta dan memahami tanggapan/permasalahan kelompok, yaitu perempuan pengurus Muslimat NU.
- 3) Studi dokumentasi; Dokumen merupakan rekaman peristiwa yang berkaitan erat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. Studi dokumentasi dilakukan dengan meliputi data dari kebijakan yang relevan, dokumen kegiatan, sejarah maupun hasil penelitian terkait.
- 4) Observasi; Observasi dilakukan untuk membantu melengkapi data dan informasi yang diperoleh. Observasi dapat mendukung deskripsi kualitatif tentang perilaku atau budaya dari kelompok tertentu, institusi tertentu, maupun komunitas tertentu.¹⁴

4.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Moser, adalah suatu teknis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan kebijakan program yang lebih peka gender, dengan pendekatan terhadap persoalan perempuan

¹¹ Keith Punch, *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication, 2006. hal. 52.

¹² Lisa Harrison, *..op.cit*, hal. 106-107.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

¹⁴ *Ibid*, hal. 93-94.

(kebutuhan praktis dan strategis gender). Aplikasi analisis ini adalah untuk penelitian yang dirancang untuk mengevaluasi suatu program/proyek. Analisis gender dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perlu dikaji untuk tujuan memberdayakan perempuan.¹⁵ Berikut rincian analisis Munro disajikan dalam tabel :

Tabel 4.1. Model Analisis Gender Munro

No	Program Kerja Muslimat NU	Kebutuhan Gender yang Dipenuhi		Kebijakan Pemerintah Daerah
		Kebutuhan Praktis	Kebutuhan Strategis	

Sumber : Dikembangkan dari Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang UMM Press, 2002.

¹⁵Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang UMM Press, 2002, hal. 180-186.

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, terbagi ke dalam 27 kecamatan dan 331 desa/kelurahan. Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah kabupaten sebagai berikut:

Sebelah utara: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang;

Sebelah timur: Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen;

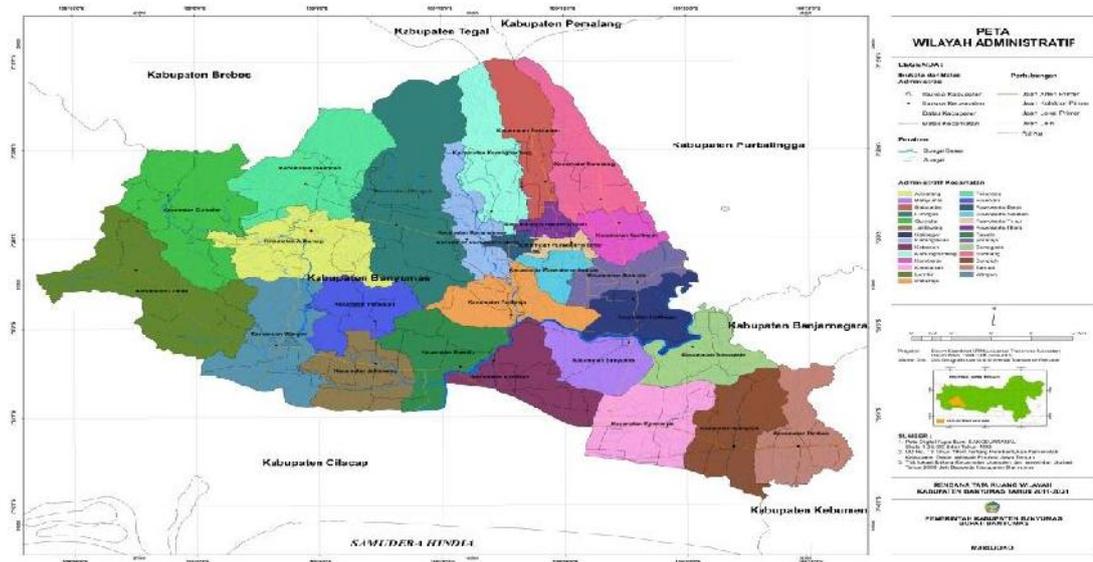
Sebelah selatan: Kabupaten Cilacap;

Sebelah barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Kabupaten Banyumas meliputi wilayah seluas 132.759 ha atau 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta ha). Wilayah terluas adalah Kecamatan Cilongok (10.534 ha) dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Purwokerto Barat (740 ha). Lebih dari separuh (51,16 persen) wilayah Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah (25-100 m dpl) yang tersebar di bagian tengah dan selatan. Sisanya merupakan dataran tinggi (100-500 m dpl) yang terletak di bagian utara dan sebagian di wilayah selatan. Kabupaten ini terletak di lereng Gunung Slamet bagian selatan dan dialiri Sungai Serayu.

Peta geografis Kabupaten Banyumas secara lebih rinci dapat dilihat dalam gambar peta sebagai berikut:

Gambar 5.1. Peta Administratif Kabupaten Banyumas



Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 1 635 909 jiwa terdiri dari 817.383 jiwa penduduk laki-laki (49,97 persen) dan 818.526 jiwa penduduk perempuan (50,03 persen), sehingga *sex ratio* secara umum di tingkat kabupaten adalah 99,86. Ini artinya bahwa rasio perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak sedikit. Adapun komposisi penduduk per kecamatan dipilah menurut jenis kelamin sebagaimana yang dikutip dari <https://banyumaskab.bps.go.id/> adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2015

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1 Lumbir	21 841	22 348	44 189	97,73
2 Wangon	37 598	37 693	75 291	99,75
3 Jatilawang	29 102	29 588	58 690	98,36
4 Rawalo	23 435	23 472	46 907	99,84
5 Kebasen	28 976	28 600	57 576	101,31
6 Kemranjen	32 701	32 530	65 231	100,53
7 Sumpiuh	25 664	25 511	51 175	100,60
8 Tambak	21 455	21 288	42 743	100,78
9 Somagede	16 330	16 680	33 010	97,90
10 Kalibagor	24 202	23 808	48 010	101,65
11 Banyumas	23 183	23 337	46 520	99,34
12 Patikraja	26 695	26 727	53 422	99,88
13 Purwojati	15 805	15 937	31 742	99,17
14 Ajibarang	47 377	46 816	94 193	101,20
15 Gumelar	23 305	22 743	46 048	102,47
16 Pekuncen	32 633	33 347	65 980	97,86
17 Cilongok	58 354	57 465	115 819	101,55
18 Karanglewas	31 529	30 741	62 270	102,56
19 Kedungbanteng	27 537	26 525	54 062	103,82
20 Baturraden	25 278	25 546	50 824	98,95
21 Sumbang	40 460	40 184	80 644	100,69
22 Kembaran	39 686	39 480	79 166	100,52
23 Sokaraja	41 478	41 693	83 171	99,48
24 Purwokerto Selatan	37 590	37 974	75 564	98,99
25 Purwokerto Barat	25 456	26 436	51 892	96,29
26 Purwokerto Timur	28 503	29 743	58 246	95,83
27 Purwokero Utara	31 210	32 314	63 524	96,58
Banyumas	817 383	818 526	1 635 909	99,86

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Berdasarkan tabel 5.1. di atas juga terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tidak seimbang antar wilayah kecamatan yakni bergerak mulai dari 95,83 (Purwokerto Timur) sampai 103,82 (Kedungbanteng). Dalam data tersebut tidak

nampak ciri khusus untuk wilayah-wilayah yang memiliki *sex ratio* (SR) yang tinggi maupun yang rendah. Meskipun semua wilayah kecamatan kota (Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara) memiliki SR di bawah SR 100, namun banyak kecamatan-kecamatan lain di wilayah pedesaan yang memiliki SR di bawah 100.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk dan Kepadatan penduduk per km² Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2015

	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Lumbir	2,70	430
2	Wangon	4,60	1 239
3	Jatilawang	3,59	1 219
4	Rawalo	2,87	945
5	Kebasen	3,52	1 066
6	Kemranjen	3,99	1 074
7	Sumpiuh	3,13	853
8	Tambak	2,61	822
9	Somagede	2,02	823
10	Kalibagor	2,93	1 344
11	Banyumas	2,84	1 221
12	Patikraja	3,27	1 236
13	Purwojati	1,94	838
14	Ajibarang	5,76	1 416
15	Gumelar	2,81	490
16	Pekuncen	4,03	712
17	Cilongok	7,08	1 099
18	Karanglewas	3,81	1 917
19	Kedungbanteng	3,30	898
20	Baturraden	3,11	1 116
21	Sumbang	4,93	1 510
22	Kembaran	4,84	3 054
23	Sokaraja	5,08	2 780
24	Purwokerto Selatan	4,62	5 496
25	Purwokerto Barat	3,17	7 012
26	Purwokerto Timur	3,56	6 918
27	Purwokerto Utara	3,88	7 050
	Banyumas	100,00	1 232

Sumber data: <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/101>

Berdasarkan tabel 5.2. di atas juga terlihat adanya ketimpangan dalam distribusi penduduk antar wilayah kecamatan. Rata-rata distribusi penduduk adalah 3,70 persen, sementara pergerakan distribusi penduduk terendah ada pada Kecamatan Purwojati (1,94 persen) dan tertinggi pada kecamatan Cilongok (7,08 persen). Demikian pula ketimpangan yang signifikan terjadi pada kepadatan penduduk, yakni Lumbir dengan kepadatan penduduk terendah sebesar 430/km², sementara Purwokerto Utara merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7050/km², sehingga perbedaannya cukup signifikan antara yang terendah dengan yang tertinggi.

Sementara dilihat dari sisi kesejahteraan keluarga dengan mengacu konsep keluarga sejahtera Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) data tahun 2016 di Kabupaten Banyumas terlihat sebagaiberikut:

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Keluarga Sejahtera Berdasarkan Tahapannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2016

Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah	Persentase
Keluarga Pra Sejahtera	106.800	20,68
Keluarga Sejahtera I	95.210	18,43
Keluarga Sejahtera II	173.470	33,58
Keluarga Sejahtera III	108.282	20,96
Keluarga Sejahtera III Plus	32.798	6,35
Jumlah	516.560	100,00

Sumber: Banyumas Dalam Angka Tahun 2016

Sebagaimana penyebaran penduduk yang tidak merata, tingkat kesejahteraan keluarga antar wilayah kecamatan juga tidak merata. Misalnya rata-rata jumlah keluarga pra sejahtera adalah sebesar 20,68 persen, namun di Tambak mencapai

34,76 persen; sementara keluarga pra sejahtera paling sedikit ada di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan 5,76 persen. Sebaliknya keluarga sejahtera III plus sebagai gambaran keluarga paling sejahtera paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Sukaraja (13,41 persen) dan di Purwokerto Selatan (13,20 persen); sementara yang paling sedikit ada di Kecamatan Sumbang yaitu hanya 1,06 persen, jauh di bawah rata-rata tingkat Kabupaten yaitu 6,35 persen.

5.2. Gambaran Perempuan dalam Pembangunan di Banyumas

Sampai saat ini pembangunan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender, sehingga perlunya komitmen untuk melakukan kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini terkait upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana jumlah SDM perempuan cukup besar namun secara kualitas masih banyak tertinggal; sekaligus untuk mendukung mewujudkan komitmen Internasional menuju Kesetaraan Gender 50:50 pada tahun 2030.

Untuk itu berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup (KPPPA, 2017), sehingga dengan demikian isu pengarusutamaan gender mendapat prioritas dalam pembangunan.

Di Indonesia isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi bagaimana pembangunan berperspektif gender telah berjalan. Hal ini dilakukan antara lain dengan melihat kondisi kualitas SDM secara umum dan kualitas SDM perempuan secara khusus yakni melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang pengertiannya telah dipaparkan dalam bab Pendahuluan. IPM menggambarkan diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan. Indikator-indikator ini menggambarkan kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sementara IPG menggambarkan selisih antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Untuk IDG tidak lagi mengukur pada kebutuhan dasar melainkan pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan eksistensinya sebagai manusia yang perlu untuk mengaktualisasikan diri.

Sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 yang diterbitkan KPPPA, berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) tahun 2015, IPM Indonesia berada pada level sedang

dengan capaian IPM sebesar 68,38, atau berada di peringkat 110 dari 188 negara dan berada di bawah rata-rata dunia (71,05). Dibandingkan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari sepuluh negara. Meskipun demikian, dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM, Indonesia termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement* untuk periode tahun 1970-2010.

Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2015 masih berada di bawah angka provinsi (Jawa Tengah) dan angka nasional (Indonesia). Ini artinya juga di bawah rata-rata dunia (tahun 2015 71,05).

Gambar 5.2. Tren Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015 dalam Perspektif Regional dan Nasional



Sumber: KPPPA, 2016.

Rendahnya IPM di Kabupaten Banyumas sebagaimana terlihat dalam tabel 5.4. di bawah lebih disebabkan oleh faktor ekonomi (pengeluaran), terutama apabila dibandingkan dalam konteks nasional. Sementara apabila dibandingkan pada tingkat regional Jawa Tengah, Banyumas hanya lebih rendah dalam Angka Harapan Hidup. Sementara bidang pendidikan dan ekonomi kondisi Kabupaten Banyumas lebih baik.

Tabel 5.4. Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015

Wilayah	AHH (Tahun)		HLS (%)		Rata-2 Lama Sekolah		Pengeluaran		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Banyumas	72,92	73,12	12,56	12,57	7,31	7,31	9.580	10.104	67,25	67,77
Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9.640	9.930	68,78	69,49
Indonesia	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9.903	10.150	68,9	69,55

Sumber: KPPPA, 2016.

Pada data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Kabupaten Banyumas juga berada di bawah angka regional dan nasional, bahkan selisih angka relatif tinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel 5.5 di bawah. IPG adalah merupakan IPM yang memperhatikan selisih capaian IPM antara laki-laki dan perempuan. IPM selama ini dianggap kurang sensitif gender, karena pada kenyataannya ada perbedaan kualitas SDM laki-laki dan perempuan yang cukup menyolok. *Gender-related Development Index* (GDI) adalah merupakan ukuran kualitas SDM yang memperhatikan selisih perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain sama dengan IPM, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tabel di bawah menggambarkan *trend* GDI/IPG di

Kabupaten Banyumas dalam konteks regional (Jawa Tengah) dan nasional (Indonesia) sehingga dapat dilihat bagaimana capaian masing-masing wilayah.

Tabel 5.5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2015 dalam Konteks Regional dan Nasional

Wilayah	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
Banyumas	85,14	86,07	86,25	86,53	86,54	86,66
Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21
Indonesia	89,42	89,2	90,07	90,19	90,34	91,03

Sumber data: KPPPA (2016)

Berdasarkan tabel 5.5 di atas terlihat bahwa capaian IPG Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 selalu berada di bawah data regional maupun nasional, bahkan dengan selisih perbedaan yang cukup menyolok. Sementara perbedaan di tingkat regional dan nasional tidak terpaut jauh. Hal ini tentunya menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk memberikan prioritas pembangunan yang lebih sensitif gender, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Pada tabel 5.6. di bawah memperlihatkan selisih capain komponen IPM antara penduduk laki-laki dan perempuan. Komponen tersebut adalah Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ekonomi).

Tabel 5.6. Komponen IPG Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	AHH		HLS		RLS		PPD		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Banyumas	71,15	74,98	12,86	12,32	7,91	6,75	14.554	7.047	74,79	64,81	86,66
Jawa Tengah	72,05	75,95	12,29	12,47	7,59	6,50	13.469	9.001	73,39	67,67	92,21
Indonesia	68,93	72,78	12,42	12,68	8,35	7,35	14.163	8.464	73,58	66,98	91,03

Sumber data: KPPPA, 2016.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rendahnya IPM perempuan Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh faktor ekonomi, dimana komponen PPD antara laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang cukup tajam. PPD perempuan Kabupaten Banyumas berada di bawah angka regional dan nasional, sebaliknya PPD laki-laki Kabupaten Banyumas berada di atas angka regional dan nasional. Sementara *gender gap* pada komponen AHH, HLS, RLS tidak terpaut jauh, bahkan pada bidang kesehatan angka harapan hidup perempuan lebih baik daripada laki-laki dan perempuan di tingkat nasional.

Kalau IPM/IPG menyangkut ukuran dasar kualitas hidup manusia, maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan/mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan tahun 2014-2019 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. IDG diukur dari Keterlibatan perempuan dalam parlemen, Perempuan sebagai manager, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan komponen tersebut maka dapat diketahui hasil Indeks Pemberdayaan Gender.

Kalau HDI/GDI merupakan gambaran kualitas dasar sumber daya manusia, maka GEM (*Gender Empowerment Measure*) atau IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) adalah merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/ partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi Partisipasi Politik menggunakan indikator proporsi (keterwakilan) perempuan dan laki-laki di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD); Dimensi Partisipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan menggunakan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan; Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi menggunakan indikator perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki (KPPPA dan BPS 2012). Sebagaimana IPM dan IPG, data IDG Kabupaten Banyumas juga memperlihatkan hasil yang lebih rendah dibanding tingkat regional dan nasional, sebagaimana terlihat dalam tabel 5.7 di bawah.

Tabel 5.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
Kab. Banyumas	66,57	67,64	64,78	65,50	64,41	67,37
Jawa Tengah	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80
Indonesia	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83

Sumber data: KPPPGA, 2016.

Tabel 5.8. Komponen IDG Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	Keterlibatan Pr dlm Parlemen	Perempuan sbg Manager	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
Kab. Banyumas	18,00	45,90	30,29	67,37
Jawa Tengah	24,24	47,72	34,06	74,80
Indonesia	17,32	46,03	36,03	70,83

Sumber data: KPPPGA, 2016

Seperti halnya IPG, komponen yang menyumbang rendahnya IDG Kabupaten Banyumas adalah masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Banyumas hanya 30,29 persen (lihat tabel 5.8). Karena itu, perlu kajian yang seksama mengenai rendahnya sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Banyumas ini.

Keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting untuk melihat bagaimana perempuan memiliki *bargaining power*, dimana perempuan bisa terlibat dalam keputusan-keputusan politis yang strategis untuk kemaslahatan umat, khususnya menyangkut perbaikan kaum perempuan.

Tabel 5.9. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2015

No	Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PDI - P	12	4	16
2	Golkar	6	-	6
3	PKB	4	3	7
4	PAN	4	-	4
5	PPP	3	-	3
6	PKS	4	-	4
7	Demokrat	2	1	3
8	Gerindra	5	1	6
9	Hanura	-	-	-
10	Nasdem	1	-	1
Banyumas		41	9	50

Sumber data: <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/104>

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, dari 50 anggota DPRD hanya ada 9 anggota legislatif perempuan (18 persen), masih jauh di bawah dari 30 persen. Meskipun secara absolut legislatif perempuan yang paling banyak adalah dari partai PDI-P (4 orang atau 25 persen dari 16 orang anggota legislatif PDI-P), namun secara

persentase adalah dari PKB, yakni 43 persen atau 3 perempuan dari 7 anggota legislatif PKB yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas. Dari tabel 5.9 di atas juga terlihat bahwa 10 partai yang memiliki kursi di DPRD, hanya 4 partai yang memiliki anggota legislatif perempuan, yakni PDI-P (4 orang perempuan dari 16 anggota yang dimiliki), PKB (3 orang perempuan dari 7 anggota yang dimiliki), Demokrat (1 orang perempuan dari 3 anggota yang dimiliki), dan Gerindra (1 orang perempuan dari 6 anggota yang dimiliki). Hal ini menjadikan perlunya pendidik politik untuk kaum perempuan agar mereka lebih memiliki minat terjun ke dunia politik dan mewarnai dunia politik yang lebih feminin.

Sementara Tabel 5.10 di bawah menggambarkan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2014

Tabel 5.10. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab. Banyumas 2013-2014

Kategori	2013	%	2014	%
<i>/Group</i>				
I	768	4,94	666	4,39
II	3.459	22,26	3.130	20,62
III	5.279	33,98	5.373	35,40
IV	6.031	38,82	6.009	39,59
Jumlah	15.537	100,00	15.178	100,00
Pendidikan/Education				
SD s/d SLTA	4.030	25,94	3.691	24,32
DI/DII/DIII	2.534	16,31	1.999	13,17
DIV/S1	8.497	54,69	8.968	59,09
Pasca Sarjana	476	3,06	520	3,43
Jumlah	15.537	100,00	15.178	100,00
Jenis Kelamin/Sex				
Laki-laki	7.986	51,40	7.766	51,17
Perempuan	7.551	48,60	7.412	48,83
Jumlah	15.537	100,00	15.178	100,00

Sumber data: BKD Kab. Banyumas dalam <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/36>

Secara kuantitatif jumlah PNS perempuan di Kabupaten Banyumas relatif seimbang dengan PNS laki laki (PNS perempuan 48,83 persen; PNS laki-laki 51,17 persen). PNS di Kabupaten Banyumas juga memiliki pendidikan yang relatif baik dimana sebanyak 59,09 persen telah sarjana atau setara dengan sarjana (D-IV), demikian pula dilihat dari golongan (sebagai representasi karier), sebagian besar (39,59 persen) telah berada pada golongan tertinggi (Golongan IV). Dengan pendidikan dan golongan yang tinggi ini asumsinya perempuan juga banyak di dalamnya karena jumlah PNS perempuan yang cukup banyak.

Sementara itu tabel 5.11 di bawah menggambarkan kajian mengenai lapangan usaha utama pekerja penting kaitannya dengan transformasi tenaga kerja (perempuan) dan pembangunan. Transformasi tenaga kerja menurut sektor akan berjalan seiring dengan pembangunan khususnya yang terjadi di negara-negara maju (Effendi, 1993). Dengan kata lain untuk melihat terjadinya transformasi pembangunan dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja menurut sektor. Idealnya sebagaimana terjadi di negara maju, transformasi pembangunan adalah dimulai dari Sektor Pertanian (*Agriculture/A*) yang kokoh yang akan memperbaiki penghasilan petani yang diikuti oleh perubahan pola konsumsi, khususnya konsumsi non pertanian yang dapat mengembangkan sektor industri (*Manufacture/M*) dan pada gilirannya sektor industri ini dapat merangsang pertumbuhan sektor jasa (*Service/S*). Transformasi tenaga kerja tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Pertanian/ <i>Agriculture</i> (A) → Industri/ <i>Manufacture</i> (M) → Jasa/ <i>Service</i> (S)

Namun demikian di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, teori AMS tersebut tak sepenuhnya dapat dibenarkan. Besarnya tenaga kerja di sektor S bukan merupakan proses transformasi yang linier, melainkan karena keterbatasan sektor pertanian dan sektor industri yang tidak dapat menampung mereka, sehingga mereka menciptakan sektor S sendiri dalam arti Sektor Informal (sektor jasa tradisional), seperti menjadi pedagang kaki lima, tukang sayur keliling, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.

Tabel 5.11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2015

Lapangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sektor Pertanian	18,73%	13,95%	17,01%
1	83 233	34 711	117 944
Sektor Industri	37,73%	25,63%	33,39
2	11 097	-	11 097
3	57 000	63 290	120 290
4	3 154	-	3 154
5	96 455	499	96 954
Sektor Jasa	43,54%	60,42%	49,60%
6	105 243	89 919	195 162
7	23 729	-	23 729
8	17 494	5 659	23 153
9	47 081	54 776	101 857
Jumlah	444 486	248 854	693 340

Sumber Data: <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/112>

Keterangan:

- 1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries*
- 2 Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*
- 3 Industri Pengolahan/*Manufacturing Industry*
- 4 Listrik, Gas, dan Air/*Electricity, Gas, and Water*
- 5 Bangunan/*Construction*

- 6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel/*Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants, and Hotels*
- 7 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/*Transportation, Warehousing, and Communication*
- 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan/*Financial, Insurance, Real Estate, and Business Services*
- 9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan/*Community, Social, and Personal Services*

Sebagaimana terlihat dalam tabel 5.11 di atas, sektor pertanian di Kabupaten Banyumas memiliki peranan yang rendah dalam penyerapan tenaga kerja, yakni 17,01 persen. Sementara secara gender, perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih rendah (13,95 persen) dibanding laki-laki (18,73 persen). Perempuan sebagian besar (60,42 persen) bekerja di sektor jasa. Sektor jasa yang ada kemungkinan besar adalah di sektor informal (perdagangan kecil).

5.3. Peta Organisasi Perempuan dalam GOW

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tahun 2010 terdapat 35 organisasi masyarakat berbasis Islam. Antara lain Nahdhotul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Ahmadiyah, Al-Irsyad, Al-Amin, Hisbul Wathon, Banser dan Islam Jama'ah. Selain itu ada organisasi-organisasi perempuan yang tergabung di GOW, antara lain yaitu organisasi-organisasi perempuan berbasis Islam dan non Islam yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Berikut tabel organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW Kabupaten Banyumas.

Tabel 5.12. Daftar Organisasi Anggota GOW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2012

No.	Nama Organisasi
1.	Aisyiyah
2.	APPERMAS
3.	BHAYANGKARI
4.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas
5.	Dharmayukti Karini
6.	Dian Kemala
7.	Fatayat NU
8.	Harpi Melati (Himpunan Rias Pengantin)
9.	HWK (Himpunan Wanita Karya)
10.	IAD KEJARI Purwokerto (Kejaksaaan Negri)
11.	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
12.	IIDI (Ikatan Istri Dokter Indonesia)
13.	ISM NU (Ikatan Sarjana Muslimat) NU
14.	ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia)
15.	IWAPI (Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia)
16.	KERTA PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)
17.	Muslimat NU
18.	Pakitiara Kusuma
19.	Pemberdayaan Perempuan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
20.	PERIP
21.	Persaudaran Muslimah (SALIMAH)
22.	PERSIT Kartika Candra Kirana (Persatuan Isteri Tentara)
23.	PERWANAS
24.	PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia)
25.	PERWATI MAS
26.	PERWITA Wana Kencana Banyumas Barat

27. PERWITA Wana Kencana Banyumas Timur
28. PIDHI
29. PWKI
30. RIWARA Kabupaten Banyumas
31. Widya Andini
32. WKRI Barat
33. WKRI Timur
34. Pemberdayaan Perempuan PAKEM
35. IKA BOGA Kabupaten Banyumas
36. LK3 DINSOSNAKERTRANS
37. PIPKA
38. Nasiatul Aisyiyah
39. JAPUKMAS
40. Forum Komunikasi Wanita Kecamatan Purwokerto Timur
41. Forum Komunikasi Wanita Kecamatan Purwokerto Selatan
42. BHAYANGKARI Ranting SPN
43. Kelompok Wanita Tani Sari Rasa- Kec. Karang Lewas
44. Kelompok Wanita Tani Kismosari- Kec. Kedung Banteng
45. Kelompok Wanita Tani Singasari-Kec. Karang Lewas
46. Forum Komunikasi Wanita Kecamatan Purwokerto Utara
47. Forum Komunikasi Wanita Kecamatan Purwokerto Barat
48. Forum Komunikasi Wanita Kecamatan Baturraden
49. Seruni Kabupaten Banyumas
50. Wanita Hindu
51. Wanita Islam
52. PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia)
53. KITI (Komunitas Islam Tionghoa Indonesia)

Sumber : Laporan GOW 2012

GOW memiliki peranan penting dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Wilayah Banyumas. Organisasi-organisasi di GOW berbasis Islam juga mempunyai peranan penting dalam membina anggota-anggota mereka dan memberikan pengetahuan serta membantu mencari solusi untuk kehidupan sosial ekonomi dan permasalahan keluarga yang dihadapi. Seperti tujuan WI yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan berdakwah, tujuan Aisyiyah yaitu melaksanakan Islam sebenar-benarnya dan mengangkat derajat kaum perempuan, serta masih banyak lagi tujuan-tujuan organisasi yang tergabung dalam GOW.

5.4. Identifikasi Isu dan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Banyumas

Pembangunan manusia pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Hal tersebut juga selaras dengan populasi perempuan dan laki-laki yang hampir berimbang sehingga seyogyanya baik laki-laki maupun perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan setara. Dalam hal ini Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah 1.327,59 km² yang didiami oleh 2.021.062 jiwa penduduk pada akhir 2016. Jumlah tersebut terdiri dari 1.019.451 laki-laki dan 1.001.611 perempuan.¹⁶ Bila diamati dari komposisi penduduk tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan hampir berimbang dengan laki-laki. Dalam konteks demikian, penting untuk dikaji apakah perempuan dan laki-laki

¹⁶ *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab, 2017.

yang populasinya hampir berimbang tersebut, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara. Untuk itu selanjutnya bab ini akan menjelaskan isu-isu dan kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi ketenagakerjaan, maupun sosial hukum, oleh laki-laki maupun perempuan.

- **Bidang Pendidikan**

Sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945, pemerintah melakukan berbagai upaya memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, upaya memperluas dan pemerataan pendidikan telah diatur sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa merupakan suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu *row input* proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa

dapat terwujud dengan baik. Dalam hal ini pemerintah nasional sejak Tahun 1984, telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun, dan disempurnakan pada Tahun 1994 menjadi Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program wajib belajar tersebut bertujuan agar semua penduduk usia 7 – 15 tahun dapat bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kedua program wajib belajar tersebut secara bertahap berhasil memperluas angka partisipasi sekolah, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Upaya ini diharapkan membawa implikasi peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, perluasan angka partisipasi sekolah, secara setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga pada akhirnya tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan nasional dengan kata lain menuntut dukungan seluruh level pemerintahan, baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Di tingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas sejauh ini sudah berupaya untuk mendukung kebijakan pendidikan nasional, antara lain dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah atas.

Berkaitan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka terdapat beberapa indikator untuk mengukur partisipasi sekolah penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, berupa APK, APM, dan APS. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa - berapa pun usianya - yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Data dari *SIGA Kabupaten Banyumas Tahun 2013* menunjukkan bahwa APK SD/MI di Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang bagus, di atas 100 persen. APK siswa laki-laki lebih tinggi (104,92 persen) dibanding APK siswa perempuan (100,03 persen). Dalam hal ini APK perempuan pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada level SMP/MTs, APK laki-laki sebesar 91,52 persen sementara perempuan sebesar 97,73 persen. Meskipun capaian ini relatif tinggi, namun belum memenuhi tuntutan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang mewajibkan seluruh siswa usia 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar. Sementara di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, APK perempuan mencapai 79,91 persen dan laki-laki 75,65 persen. Dapat disimak dalam tabel berikut :

Tabel 5.13. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyumas 2012 Dirinci menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin

No.	Jenjang pendidikan	APK		APM	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	SD/MI	104,92	100,03	89,08	85,53
2.	SMP/MTs	91,52	97,73	66,71	68,85
3.	SMA/MA/ SMK	75,65	79,91	50,14	50,88

Sumber : *Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas*, Banyumas : BapermasPKB, 2013

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa APM lebih rendah dibandingkan APK. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang usianya lebih rendah atau lebih tinggi dibanding usia standar di jenjang pendidikan tersebut. Pada tahun 2012, APM SD/MI 89,08 persen bagi siswa laki-laki dan 85,53 persen bagi siswa perempuan. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM siswa laki-laki 66,71 persen lebih rendah dibanding APM siswa perempuan 68,85 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK kondisinya tidak jauh berbeda, APM laki-laki 50,14 persen lebih rendah dibanding APM perempuan 50,88 persen. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan kesadaran penduduk usia sekolah dan orangtuanya untuk mengikuti pendidikan formal. APS di Kabupaten Banyumas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.14. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banyumas 2012 Dirinci menurut Jenjang Sekolah dan Jenis Kelamin

No.	Jenjang pendidikan	Tahun 2012	
		Laki-laki	Perempuan
1.	SD/MI (7 – 12 Tahun)	99,60	98,49
2.	SMP/MTs (13 – 15 Tahun)	79,93	86,20
3.	SMA/MA/SMK (16 – 18 Tahun)	50,14	50,88

Sumber: *Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas*, Banyumas : Bapermas PKB, 2013

Selain pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan pendidikan non formal, yaitu jalur Paket A setara dengan SD/MI; Paket B setara dengan SMP/MTs; dan Paket C yang setara dengan SMA/MA/SMK. Penyelenggaraan pendidikan non formal antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat Banyumas dari buta huruf. Di bawah ini disampaikan capaian angka melek huruf di Kabupaten Banyumas dirinci berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.15. Angka Melek Huruf di Kabupaten Banyumas Dirinci menurut Jenis Kelamin

No.	Tahun	Angka melek huruf (%) (15 – 19 Th)		
		Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	2012	96,70	92,17	94,24

Sumber: *Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas*, Banyumas Bapermas PKB, 2013

Pencapaian dalam bidang pendidikan dalam perkembangannya tidak selalu menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan sumber *Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor* Maret 2015, berkaitan dengan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan pada tingkat SD/MI maka APM 97,66 dan APK 109,96.

Adapun untuk tingkat SMP/MTs, APM 75,73 dan APK 81,19, sedangkan untuk tingkat SMA, APM 55,23 dan APK adalah 80,07.¹⁷ Selanjutnya berkaitan dengan partisipasi sekolah di Kabupaten Banyumas dirincikan menjadi tiga hal, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.16. Partisipasi Sekolah Dirincikan Berdasarkan Kelompok Umur Sekolah

Jenis kelamin	Kelompok umur sekolah	Tidak/belum pernah sekolah	Partisipasi sekolah	
			Masih sekolah	Tidak sekolah lagi
Laki-laki	7-12	0,07	17,72	0,00
	13-15	0,50	8,11	1,17
	16-18	0,07	6,10	2,37
	19-24	0,45	2,71	10,07
	7-24	1,09	34,64	13,61
Perempuan	7-12	0,41	17,77	0,08
	13-15	0,0	8,87	0,44
	16-18	0,0	4,97	2,68
	19-24	0,0	3,50	11,94
	7-24	0,41	35,11	15,14
Laki-laki+Perempuan	7-12	0,48	35,48	0,08
	13-15	0,50	16,99	1,61
	16-18	0,07	11,07	5,05
	19-24	0,45	6,21	22,02
	7-24	1,50	69,75	28,75

Sumber : Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2016, Purwokerto : BPS, 2016.

Secara spesifik persoalan gender dalam bidang pendidikan diatur oleh Permendiknas No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Adapun tujuan pendidikan sekolah yang responsif gender

¹⁷ Kabupaten Banyumas dalam Angka Tahun 2016, Purwokerto : BPS, 2016.

adalah mewujudkan kesempatan yang adil dan setara pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan gender terutama pada jurusan/program studi dan bidang kejuruan. Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi sekolah dalam kriteria tidak sekolah lagi, kelompok umur perempuan usia 7-24 lebih tinggi daripada kelompok umur usia 7-24 laki-laki, yaitu 15,14 persen dibanding 13,61 persen. Kondisi demikian tentu menjadi persoalan, karena hal itu berarti tingkat partisipasi sekolah perempuan usia 7-24 tidak setara dengan laki-laki dalam kelompok usia yang sama. Dalam konteks demikian, tujuan pendidikan yang responsif gender belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Banyumas.

Selaras dengan kondisi di atas, informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, bahwa saat ini kebijakan sekolah masih cenderung netral (bahkan dalam beberapa hal menunjukkan bias) gender, yang berdampak pada tingkat manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan pada umumnya laki-laki mendapatkan manfaat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi demikian masih didukung oleh adanya bahan ajar yang mengandung stereotipe gender yang menguatkan perilaku bias di masyarakat. Selain itu, juga masih terdapat perilaku guru yang belum

sensitif gender, yang dapat berdampak pada bentuk-bentuk perilaku yang bias gender.¹⁸

Persoalan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas terkait dengan masih adanya kesenjangan gender juga didukung data dari SIGA Kabupaten Banyumas Tahun 2013, yang menekankan adanya beberapa persoalan pokok, yaitu: 1) Pemerataan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, menyangkut partisipasi penduduk laki-laki dan perempuan terutama pada usia sekolah dalam memperoleh pendidikan bermutu; 2) Terkait pengelolaan pendidikan dan sumber daya manusia para pengelola pendidikan yang masih bias gender; 3) Masih ada kurikulum, buku atau bahan ajar, dan proses pembelajaran yang belum peka gender.¹⁹

Dalam konteks kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Banyumas, tidak sepenuhnya secara spesifik mengkaji apakah proses pendidikan yang berlangsung sudah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Berikut disampaikan capaian kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan pada akhir Tahun 2016.

¹⁸ Heri Teguh Santosa Kabid Paud dan Dikmas Dinkas Kabupaten Banyumas, *Pengarutamaan Gender dalam Pendidikan*, Wokrksop PSHP, 20 Mei 2017.

¹⁹ *Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Banyumas*, Banyumas : BapermasPKB, 2013

Tabel 5.17. Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Pemkab Banyumas Tahun 2016

No.	Uraian	Prosentase
1	Angka melek huruf	99,32
2	APK PAUD/TK	76,05
3	APK SD/MI	101,81
4	APK SMP/MTs/Paket B	101,9
5	APK SMA/SMK/MA/Paket C	91,9
6	APM SD/MI/Paket A	92,6
7	APM SMP/MTs/Paket B	75,83
8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	64,6
9	APS Pendidikan Dasar	101,9
10	APS Pendidikan Menengah	69,7
11	Angka putus sekolah SD/MI	0,0003
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,0015
13	Angka putus sekolah SMA/MA/SMK	0,006

Sumber : *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab, 2017.

Mengacu pada RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, bahwa target pembangunan Kabupaten Banyumas masuk dalam tahap pencapaian visi “Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, Berbudaya Berlandaskan Iman dan Takwa”. Dalam hal ini bidang pendidikan tercantum dalam Misi kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.” Tujuannya adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas anak didik.
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Dalam upaya menuju tercapainya visi dan misi dalam bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018, isu strategis

dalam bidang pendidikan yang tercantum dalam prioritas pembangunan daerah adalah “Masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi pendidikan. “ Berkaitan dengan isu strategis tersebut maka fokus dalam Prioritas Kabupaten No.2 dalam RPJMD memiliki fokus pada program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5.18. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bidang Pendidikan 2018

Urusan wajib pelayanan dasar	Program	Kegiatan	Target
Pendidikan	Program pendidikan anak usia dini (26 kegiatan)	Penyelenggaraan layanan PAUD; fasilitasi dan sosialisasi program PAUD; pemenuhan sarpras; peningkatan pembelajaran inklusi dan manajemen pengelolaan PAUD; penyempurnaan kurikulum; pembinaan pendidikan keluarga; orientasi teknis dan fasilitasi akreditasi PAUD; fasilitasi organisasi mitra dan kegiatan ibu PAUD; orientasi penyelenggaraan PAUD terpadu; pengembangan APE dan pembelajaran terpadu; penyelenggaraan lomba sekolah sehat; PAUD berprestasi.	APK PAUD/TK 81,92%
	Wajib belajar sembilan tahun (120 kegiatan)	Rehabilitasi kelas yang rusak berat dan ringan pada sekolah SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru pada SD dan SMP, pembangunan ruang perpustakaan SD dan SMP, pengelolaan mebelair pengganti SD, SMP, pembangunan sarana sanitasi, fasilitasi akreditasi, peningkatan layanan pendidikan inklusi, pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS, pemberian bantuan siswa miskin kepada siswa SD dan SMP.	APK SD/MI/ Paket A 110%; APK SMP/MTs/ Paket B 98,9%; APM SD/MI/ Paket A 95%; APM SMP/MTs/ Paket B 85%
	Program	Pendidikan menengah sudah bukan	APK

	pendidikan menengah	kewenangan pemerintah kabupaten sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	SMA/SMK/MA/ Paket C 85,9%; APM SMA/SMK/MA/ Paket C 58%
	Program pendidikan non formal (27 kegiatan)	Penyelenggaraan pendidikan Paket A, B,C; pemberian bantuan operasional pendidikan non formal, penguatan lembaga kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan aksara, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, akreditasi dan standarisasi lembaga kursus dan pelatihan, fasilitasi penyelenggaraan tempat ujian kompetensi.	Angka Melek huruf 94,74%
	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (18 kegiatan)	Peningkatan mutu tenaga pendidik PAUD, SD/SLB/MI, SMP/MTs; peningkatan tenaga pendidik PAUD , SD/SLB/MI, SMP/MTs.	
	Program manajemen pelayanan pendidikan (15 kegiatan)	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, pengembangan kapasitas untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.	

Sumber : *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab Banyumas, 2017.

Bila mencermati program kerja yang menjadi Prioritas Kabupaten No.2 pada Tahun 2018 di atas, secara umum terlihat bahwa program kegiatan di atas masih bersifat netral gender atau dengan kata lain tidak indikatif gender secara spesifik. Persoalan anak yang lekat dengan persoalan dengan masalah kesenjangan gender khususnya kaum perempuan (ibu), sudah menjadi perhatian pemerintah yang ditunjukkan dengan berbagai program di atas, bahkan sampai ke program orientasi

teknis dan fasilitas akreditasi. Dalam hal pencapaian Wajib Pendidikan Dasar, upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan total kegiatan 120 memang patut diapresiasi untuk mencapai partisipasi sekolah sesuai dengan Wajib Pendidikan Dasar secara maksimal. Namun program kegiatan tersebut belum indikatif gender atau masih bersifat netral gender, dengan tidak menargetkan secara spesifik APK dan APM laki-laki dan APK dan APM perempuan. Kondisi yang sama juga terlihat dalam program kegiatan peningkatan capaian dalam pendidikan non formal dan mutu tenaga pendidik, yang masih kurang indikatif gender. Padahal program kegiatan bidang pendidikan yang indikatif gender, sangat membantu untuk memastikan bahwa hasil pembangunan di bidang pendidikan dapat dinikmati secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan usia sekolah.

- **Bidang Kesehatan**

Kinerja makro urusan kesehatan fokus pada pelayanan wajib antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan *universal child immunization*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas dan cakupan pembantu puskesmas.

Rasio posyandu per satuan balita tahun 2016 naik dari tahun 2015 pada posyandu pratama dan posyandu mandiri. Tahun 2015, rasio posyandu pratama sebesar 5,44 naik menjadi 6,28 pada tahun 2016 dan posyandu mandiri tahun 2015 sebesar 16,81 naik menjadi 20,23 tahun 2016.

Posyandu madya tahun 2015 sebesar 44,87 menurun menjadi 29,5 pada tahun 2016, rasio posyandu pratama tahun 2015 sebesar 44,87 turun menjadi 43,99 pada tahun 2016 dan rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu persatuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,58. Rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan peningkatan selama tiga tahun, tetapi menurun di tahun 2014, berturut-turut 0,04 di tahun 2011; 0,05 di tahun 2012; 0,06 di tahun 2013 dan 0,01 di tahun 2014 serta tahun 2015 sebesar 1,16/100.000 penduduk dan di tahun 2016 menurun menjadi 1,13/100.000 penduduk dengan perhitungan jumlah rumah sakit Kabupaten Banyumas sebanyak 23 berbanding dengan jumlah penduduk 2.021.062 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan adanya penurunan dari 10,38/100.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 15/100.000 penduduk dengan dokter 3.191 yang terdiri dari 2936 dokter umum, 201 dokter spesialis dan 54 dokter gigi. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan 164/1000.000 perawat 2163, bidan 890, farmasi 255 untuk tahun 2016, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sama dengan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015 sebesar 100% tahun 2016 tetap sebesar 100%.

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* selama tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar 100%. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan selama lima tahun terakhir (2012-2016) menunjukkan angka yang membanggakan, yaitu sebesar 100%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2015 sebesar 100 menurun 99,3% di tahun 2016. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama lima tahun menunjukkan angka cakupan 100%. Cakupan kunjungan bayi tahun 2015 sebesar 100% dan capaian tahun 2016 tetap sebesar 100%. Cakupan Puskesmas selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 144,40%.

Tabel 5.19 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2010-2015 pada Aspek Pelayanan Umum

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio posyandu per satuan balita						
	a.Posyandu Pratama	%	7,41	7,20	6,56	5,44	6,28
	b.Posyandu Madya		34,04	30,10	32,52	32,88	29,5
	c.Posyandu Purnama		42,81	46,80	45,05	44,87	43,99
	d.Posyandu Mandiri		15,74	15,90	15,86	16,81	20,23
2.	Rasio puskesmas, rasio poliklinik, rasio puskesmas pembantu (per satuan penduduk)	Rasio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,58
3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,05	0,06	0,01	1,16/100.000 penduduk	1,13/10000 penduduk
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,10	0,10	0,35	10,38	15/1000.000 penduduk
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,761	0,780	0,35		164/1000.000 penduduk

6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	90,52	100	100	100	100
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98,11	94,35	100	100	100
8.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
9.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Rasio	69	70,04	100	70	89,06
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Rasio	67	100	100	100	99,3
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2016

- **Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam maupun yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas atau kombinasi keduanya. Berbagai riset empiris menunjukkan berbagai variabel determinan pembentuk PDRB seperti tenaga kerja, pembentukan modal, kualitas SDM, PAD, PMDN, PMA dan sebagainya. Dari beberapa determinan di atas, faktor investasi nampaknya memberi kontribusi yang cukup signifikan. Meskipun secara jumlah mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut diatasi oleh besaran nilai investasi yang masuk.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 Kabupaten Banyumas tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki

tren positif. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 26.059.371,95 juta rupiah, meningkat menjadi sebesar Rp. 28.486.872,81 juta rupiah pada tahun 2015. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari sebesar Rp. 24.538.595,63 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 31.164.876,40 juta rupiah pada tahun 2015. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20. PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2015

No.	Variabel	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB ADHB	26.059.371,95	28.486.872,81	31.369.317,74	34.923.374,71	38.798.789,35
2.	PDRB ADHK	24.538.595,63	25.982.158,22	27.793.138,47	29.367.687,40	31.164.876,40

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2015 dan prediksi dari BPS Kabupaten Banyumas menurun pada tahun 2016 mencapai 6,00 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berkembang dengan baik, hanya saja capaian tersebut di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional.

PDRB menunjukkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, sedangkan PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan rata-rata pendapatan tiap orang. PDRB per kapita Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun

2011 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 16.556134,- dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2015 mencapai Rp. 23.718.497,-. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB berdasarkan harga konstan 2011. Secara riil, ternyata nilai PDRB per kapita sejak tahun 2011 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 15,589.949,- menjadi Rp. 19.051.730,- di tahun 2015. Perkembangan PDRB per kapita selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 21. PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Tahun 2011-2015

No.	Variabel	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	16,56	17,92	19,54	21,55	23,72
2.	PDRB Per Kapita ADHK 2000	Juta Rupiah	15,59	16,34	17,31	18,21	19,05

Sumber: Bappeda-BPS Kab. Banyumas, 2016

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB per kapita rata-rata PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar bisa mengakibatkan penurunan PDRB bahkan penurunan PDRB per kapita. Data di atas menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita meskipun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena Kabupaten Banyumas secara umum tidak mengandalkan sektor pertanian. Daerah-daerah yang mengandalkan sektor-sektor non pertanian seperti industri,

perdagangan dan jasa-jasa umumnya memiliki nilai PDRB dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian.

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Inflasi yang terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Banyumas 2,42% lebih tinggi dari inflasi di Jawa Tengah sebesar 2,36% dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,02%.

Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Laju Inflasi Tahun 2012-2016

No.	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kabupaten Banyumas	%	4,73	8,50	7,09	2,52	2,42*)
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	2,98	7,99	8,22	2,73	2,36
3.	Nasional	%	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02*)

*Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyumas, 2016. *)BPS Pusat, 2016.*

Perkembangan pertumbuhan indeks gini di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tahun 2012 mencapai 0,34 meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,39 dan berdasarkan prediksi BPS Kabupaten Banyumas menurun menjadi 0,32 pada tahun 2016. Perkembangan indeks gini tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23. Indeks Gini Ratio Tahun 2012-2016

No.	Variabel	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Gini	Ratio	0,34	0,36	0,32	0,39	0,32*)

Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2016.

Data di atas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan per kapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus dipertimbangkan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun indeks gini Kabupaten Banyumas mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyumas, tetapi juga di kabupaten-kabupaten sekitar seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya indeks gini, pertama adalah pertumbuhan penduduk, inflasi dan kurang meratanya pembangunan di wilayah Banyumas. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, nampak bahwa selama 2 dekade terakhir, terhitung sejak 2012 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyumas cukup tinggi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,07 persen. Di samping pertumbuhan jumlah penduduk, laju inflasi juga merupakan variabel yang berpengaruh penting dalam menentukan tingkat pemerataan pendapatan. Angka inflasi cukup berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Banyumas, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris.

Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada persoalan ketenagakerjaan. Pada tahun 2012, angka partisipasi angkatan kerja sebanyak 780.933 orang menurun pada 2016 menjadi 780.690 orang. Tahun 2012, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,64% mengalami penurunan menjadi sebesar 65,34% pada tahun 2016. Kinerja makro urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.24. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	orang	780.933	780.690	780.690	851.921	851.921
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	0,59	0,58	0,58	0,48	0,48
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	65,64	65,34	65,34	65,34	65,34
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,06	5,46	4,86	4,86	4,86
5.	Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh	orang	20.800	23.495	23.495	24.498	26.673
6.	Kasus kecelakaan kerja di perusahaan	orang	50	52	52	52	52
7.	Perselisihan buruh dan	Kasus	0	0	0	0	0

	pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah						
8.	Upah minimum Kabupaten Banyumas	Rupiah	877.500	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000
9.	Jumlah pendaftar transmigrasi	KK	26	25	0	0	0
10.	Jumlah transmigran yang berangkat	KK	25	22	0	0	0

- **Bidang Sosial dan Hukum**

Persoalan kesenjangan gender telah berlangsung lama dan merefleksikan bentuk-bentuk ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin. Dalam hal ini, kaum perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibanding laki-laki. Ketidakadilan yang berwujud diskriminasi terhadap perempuan berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, terkadang menjadi hal yang tidak disadari bahkan mungkin oleh kaum perempuan sendiri. Salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender, yaitu bentuk kekerasan materiil atau non materiil, yang sangat mudah terjadi sebagai akibat cara pandang yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan seringkali dianggap lebih lemah, rendah dan tidak penting, dan seolah-olah menjadi logis bila terjadi kesewenangan dari pihak lain terhadap kaum perempuan.

Kasus diskriminasi yang mengerucut pada isu sosial juga tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum. Secara substansi hukum yang berlaku masih

dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang cenderung bias gender. Terdapat sebagian hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yang cenderung bersifat bias gender, sehingga lebih banyak merugikan perempuan. Bahkan ketika kampanye didengungkan mengenai pentingnya menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kaum perempuan masih sering menjadi pihak yang dirugikan atau dipermasalahkan dalam sebuah kasus.

Kekerasan terhadap perempuan juga menjadi salah satu persoalan penting di Kabupaten Banyumas. Konsekuensinya apakah pelaku kekerasan sudah mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan kekerasan yang sudah dilakukan terhadap korban. Dalam hal ini kaum perempuan dan anak lebih banyak yang menjadi korban daripada pelaku kekerasan. Dalam upaya untuk menangani masalah kekerasan dan kemungkinan pendampingan sampai proses hukum selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui DispermadesPKB memiliki komitmen untuk menuntaskan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. DispermadesPKB bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas yang dibentuk sejak tahun 2006. Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2015, PPT PKBGA bertugas untuk; 1) Mengupayakan pencegahan; 2) Memberikan pelayanan pengaduan; 3) Memberikan pelayanan kesehatan; 4) Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial; 5) Memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum; 6) Memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; 7) Melakukan koordinasi

dan kerjasama; 8) Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; 9) Melakukan monitoring dan pelaporan.

Sesuai informasi dari PPT PKBGA, catatan dari Komnas Perempuan memperlihatkan tentang jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) pada tahun 2015 sebesar 321.752. Data tersebut bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada 1.099 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan.²⁰

Masalah kekerasan di Kabupaten Banyumas menjadi bagian dari permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam hal ini masalah kesejahteraan sosial yang paling banyak menimpa perempuan meliputi masalah-masalah seperti: perempuan rawan sosial ekonomi, perempuan korban tindak kekerasan, perempuan tuna susila, perempuan yang menjadi buruh migran, dan perempuan korban perdagangan. Pada Tahun 2016 misalnya, jumlah wanita rawan sosial ekonomi adalah 2686; perempuan korban tindak kekerasan sebanyak 5; perempuan tuna susila 220; perempuan korban perdagangan 6 orang. Secara lengkap perkembangan masalah dalam kesejahteraan sosial dirincikan dalam tabel berikut ini :

²⁰ Tri Wuryaningsih, Ketua PPT PKBGA, *Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Kebijakan Pemkab Banyumas*, Workshop PSHP, 20 Mei 2017.

Tabel 5.25. Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas 2014-2016

No.	Kriteria PMKS	Jumlah PMKS Tiap Tahun		
		2014	2015	2016*
1	Anak balita terlantar	425	221	221
2	Anak terlantar	880	895	895
3	Anak nakal	31	29	29
4	Anak jalanan	97	93	93
5	Anak cacat	1346	1310	1310
6	Wanita rawan sosial ekonomi	2797	2686	2686
7	Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan	0	5	5
8	Lanjut usia terlantar	2524	2623	2623
9	Penyandang cacat	5098	5116	
10	Tuna susila	220	220	220
11	Pengemis	142	140	140
12	Gelandangan	19	20	20
13	Bekas narapidana	384	387	387
14	Korban penyalahgunaan napza	30	29	29
15	Keluarga fakir miskin	121303	124011	124011
16	Keluarga yang bermasalah sosial psikologis	100	101	101
17	Korban bencana alam	135	148	148
18	Keluarga bencana sosial	112	112	112
19	Pekerja migran bermasalah sosial	16	16	16
20	Pemulung	387	389	389
21	Orang dengan HIV/AIDS	4	4	4
22	Korban Trafficking	7	6	6

Sumber : *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab, 2017; * = data sementara

Sebagai upaya untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT PKBGA telah membentuk Lembaga Pelayanan dan Pengaduan Tingkat Kecamatan (LPPTK) sudah terbentuk di 19 Kecamatan, untuk tahun 2017 dibentuk di 8 Kecamatan dan 80 Lembaga Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Komunitas

Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam hal ini jumlah kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang ditangani oleh PPT PKBGA dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.26. Jumlah Kasus Kekerasan yang Ditangani oleh PPT PKBGA

No.	Jenis kasus	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	KDRT	27	26	26	3
2	Kekerasan terhadap perempuan	8	6	7	1
3	Kekerasan terhadap anak	44	42	51	10
4	ABH	29	33	30	7
5	Trafficking	-	3	1	0
6	Buruh migran	-	2	2	0
7	Lain-lain	2	0	6	2
Jumlah		110	112	123	23

Sumber : *Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, 2017*

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Banyumas sesungguhnya juga sepadan dengan banyaknya kasus serupa pada tingkat nasional. Data KPAI menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI pada tahun 2013 yaitu 4311 kasus dan tahun 2014 yaitu 5066 kasus. Adapun jumlah masalah kekerasan berbasis gender dan kekerasan anak di Kabupaten Banyumas, bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara lengkap dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.27. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Banyumas Ditangani PPT PKBGA

No.	Tahun	Kasus KBGA	Kasus KTA	Kasus seksual
1	2013	130 kasus	52 (40,00%)	44 (84,61%)
2	2014	110 kasus	44 (40,00%)	38 (86,36%)
3	2015	112 kasus	42 (37,50%)	29 (69,04%)
4	2016	65 kasus	32 (49,23%)	26 (81,25%)

Sumber : *Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, 2017*

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu tidak dapat diselesaikan satu pihak oleh pemerintah daerah melalui DispermadesPKB dan PPT PKBGA, namun membutuhkan dukungan segenap pihak seperti keluarga, sekolah, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Saat ini pihak DispermadesPKB dan PPT PKBGA menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi relawan PPT PKBGA. Selain itu belum adanya shelter/rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta masih lemahnya komitmen rumah sakit daerah terhadap penanganan korban kekerasan juga dirasakan menghambat kerja cepat dari PPT PKBGA. Apalagi sedikitnya jumlah psikolog di rumah sakit daerah dan puskesmas yang turut menangani trauma korban kekerasan juga lebih menyulitkan penanganan PPT PKBGA. Selain itu, komitmen SKPD-SKPD terkait yang masih lemah serta kurangnya koordinasi antar SKPD juga menjadi hambatan bagi penanganan korban kekerasan oleh PPT PKBGA.²¹

Sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk menangani masalah diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial. Dalam hal ini, isu-isu strategis yang terkait di bidang tersebut menyangkut masalah-masalah antara lain: 1) Upaya program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3) Upaya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 4) Upaya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 5)

²¹ Tri Wuryaningsih, Ketua PPT PKBGA, *Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Kebijakan Pemkab Banyumas*, Workshop PSHP, 20 Mei 2017.

Upaya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 6) Upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 7) Upaya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam rencana program dan prioritas daerah dalam pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.28. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018

Urusan wajib pelayanan dasar	Program	Kegiatan	Target
Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan masyarakat fakir miskin dan PMKS; pembinaan dan pelatihan lansia potensi bermasalah sosial dan ekonomi; pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal; pelatihan ketrampilan bagi remaja sekolah dari keluarga tidak mampu; fasilitasi operasional dan sarana komisi daerah lanjut usia; fasilitasi makanan dan minuman bagi lansia potensial dan balita terlantar; asesment psikososial kampung Sri Rahayu; pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin; monev bagi penanganan fakir miskin; sosialisasi peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar layak fakir miskin; bantuan sosial bagi lansia miskin; fasilitasi manajemen usaa bagi keluarga miskin; pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; pemberdayaan masyarakat daerah kumuh; operasional dan monitoring program keluarga harapan; sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan pelayanan adopsi.	Peningkatan usaha dan kemandirian terhadap 1180 PMKS; sarana sosial bagi panti asuhan/jompo/ rehabilitasi sebanyak 16 panti.
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	Pembinaan nilai kesetiakwanan sosial bagi generasi muda; penyuluhan sosial; bimbingan ketrampilan pelayanan konseling bagi PSM; penyusunan data	Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

sosial	penyandang masalah kesejahteraan sosial; penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab sosial; pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba, dan anak terlantar ke panti rehab sosial; fasilitasi orang terlantar; fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan buruh migran; penyusunan data potensi sumber kesejahteraan sosial; fasilitasi perijinan dan pengumpulan sumbangan sosial.	sebanyak 2765 orang
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial; kaderisasi saka bina sosial; monev organisasi sosial dan karang taruna; bintek usaha kesejahteraan sosial dan bintek manajemen UEP bagi karang taruna dan PSM; penilaian dan pengiriman karang taruna, PSM dan orsos berprestasi dan pelatihan bagi karang taruna, PSM dan orsos; bulan bakti karang taruna.	15 Karangtaruna; 7 PSM; 10 orsos; 46 kader

Urusan wajib bukan pelayanan dasar	Program	Kegiatan	Target
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan; fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan; pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; evaluasi pelaksanaan PUG; pengembangan sistem informasi gender dan anak.	Peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan sebanyak 500 pengurus
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja di daerah; sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT; fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.	Menurunnya rasio KDRT menjadi 0,01; penyelesaian perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan	sebanyak 100%; menurunnya rasio kekerasan terhadap anak sebesar 30% 250 orang pengurus organisasi
---	--------------------------------	---

Sumber : *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab Banyumas, 2017.

Bila mencermati program kerja yang menjadi Prioritas Kabupaten No.2 pada Tahun 2018 di atas, pada bidang sosial terlihat bahwa program kegiatan di atas masih bersifat netral gender atau dengan kata lain tidak indikatif gender secara spesifik. Namun demikian, sesuai dengan data kekerasan yang sudah dijabarkan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan menjadi bagian dari pihak yang mengalami kekerasan. Misalnya, yaitu perempuan rawan sosial ekonomi, perempuan korban tindak kekerasan, perempuan tuna susila, perempuan yang menjadi buruh migran, dan perempuan korban perdagangan manusia dan sebagainya. Dalam rencana prioritas daerah di atas, maka program kegiatan pemerintah yang mencakup persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya program yang fokus pada penanganan rehabilitasi untuk perempuan tuna susila dan perlindungan terhadap buruh migran yang menjadi korban kekerasan, yang notabene perempuan paling banyak mendominasi dalam dua pekerjaan tersebut. Namun demikian, sesungguhnya masalah pemberdayaan fakir miskin, pendampingan kampung miskin Sri Rahayu,

penanganan lansia, dan sebagainya juga sangat dekat dengan masalah-masalah perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak sosial ekonomi secara memadai.

Untuk itu, pemilahan gender yang berkaitan dengan upaya penanganan masalah sosial sebagaimana dijelaskan di atas sangat penting untuk dilakukan agar program- kegiatan pemerintah daerah di bidang tersebut dapat dinikmati secara sama antara laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Dispermades PKB yang menjadi *leading-sector* di bidang pemberdayaan perempuan memiliki peranan strategis untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan di daerah. Dalam hal ini isu strategis yang berkaitan dengan masalah sosial dan hukum yang banyak menimpa perempuan, juga menjadi fokus dari program kegiatan Dispermades. Beberapa hal di antaranya yang terkait adalah perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan ormas perempuan. Beberapa upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menangani masalah sosial dan hukum yang banyak menimpa kaum perempuan. Ke depan, pemilahan data yang berkaitan dengan isu-isu tersebut apabila sudah ada atau tersedia, sesungguhnya juga dapat lebih mendorong kemajuan hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga dapat kaum perempuan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dalam proses pembangunan di daerah.

5.5. Sejarah dan Perkembangan Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja

Kelahiran dan perkembangan Muslimat di Kabupaten Banyumas tidak terpisah dari kelahiran Muslimat NU nasional. Seperti diketahui bahwa Muslimat nasional, lahir ketika penyelenggaraan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946. Tepatnya tanggal 29 Maret 1946, kongres menyepakati untuk menjadikan Muslimat sebagai bagian dari NU secara resmi.²² Sebelumnya, perempuan-perempuan dalam lingkungan nahdliyin sudah mulai merintis berdirinya Muslimat, dengan mengadakan rapat-rapat pada penyelenggaraan Muktamar (Kongres) NU di Surabaya tahun 1926, kemudian juga pada saat penyelenggaraan Muktamar NU di Pandeglang pada tahun 1938. Beberapa nama perintis Muslimat nasional misalnya Ny. Chasanah Mansyur, Ny. Siti Syarah, Ny Djuaisih, Ny. Hindun dan sebagainya.

Selanjutnya ketika Muktamar NU ke-14 tahun 1939 dilaksanakan di Magelang, beberapa wakil dari kelompok dari berbagai daerah seperti Muntilan, Sokaraja, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, dan Purworejo ikut menghadiri muktamar tersebut dan melakukan rapat persiapan pendirian organisasi Muslimat. Dalam hal ini masing-masing perwakilan menyampaikan pandangannya pentingnya mengenai kontribusi kaum perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Persiapan pendirian Muslimat semakin matang pada saat pelaksanaan Muktamar NU ke-15 di Surabaya pada tahun 1940. Dalam muktamar tersebut, juga dilaksanakan rapat-rapat oleh ibu-ibu nahdliyin yang beberapa pandangan umum seperti; 1) Persetujuan

²² PP Muslimat NU, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU, 1979, h. 46.

keberadaan Muslimat oleh muktamar; 2) Anggaran Dasar Muslimat; 3) Susunan kepengurusan; 4) Kurikulum untuk pendidikan madrasah putri; 5) Rencana penerbitan majalah bulanan. Resolusi tersebut kemudian disampaikan langsung dalam kongres dan disetujui oleh *Hoof Comitee Congress* NU ketika itu. Ketua pengurus Muslimat ketika itu adalah Ny. Hindun dari Surabaya. Dengan demikian, pada saat Muktamar NU ke-16 di Purwokerto tahun 1946, maka secara sah dan aklamasi Muslimat NU resmi berdiri dan didukung secara bulat oleh peserta kongres. Ketika itu ketua pengurus Muslimat adalah Ny. Chadijah Dahlan.

Pada saat Muktamar NU ke-17 di Madiun tahun 1948, dibentuk beberapa komisariat kepengurusan Muslimat di berbagai daerah. Komisariat yang terbentuk adalah Madiun, Surabaya, Banyumas (Sokaraja), Kedu, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya), Jember (Besuki), Malang, dan Tapanuli. Dalam hal Komisariat Banyumas diketuai oleh Ny. Sulimah dari Sokaraja.

Pada era setelah itu, kegiatan Muslimat lebih banyak berhubungan dengan suasana perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam hal ini para perempuan ikut berjuang baik secara langsung, seperti turut bergabung menjadi kesatuan pejuang melalui pasukan Hizbullah, Sabililah, barisan Mujahidin dan sebagainya, atau secara tidak langsung seperti melayani dalam dapur umum, kesehatan, penyediaan pakaian, dan sebagainya. Baru setelah tahun 1954, Muslimat melaksanakan kongres secara otonom pada saat Muktamar NU ke-20 di Surabaya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejarah berdirinya Muslimat NU Sokaraja tidak bisa dilepaskan dari awal berdirinya Muslimat NU nasional. Dari wilayah

Banyumas, diwakili oleh ibu-ibu Muslimat dari Sokaraja, yang diketuai oleh Ny. Sulimah. Keterlibatan ibu-ibu Muslimat dari Sokaraja yaitu pada saat Mukhtamar NU ke-14 di Magelang pada tahun 1939. Ketika itu Ny. Sulimah termasuk salah satu tokoh yang menyampaikan pidato mengenai pentingnya peranan ibu dalam pendidikan anak, yang berarti sangat penting pula peningkatan pengetahuan dan pendidikan bagi kaum ibu.

Dikarenakan keterlibatan ibu-ibu Muslimat dari Sokaraja yang ikut merintis pendirian Muslimat nasional yaitu sejak tahun 1939, maka sampai sekarang ini Kabupaten Banyumas memiliki 2 (dua) kepengurusan cabang Muslimat NU yaitu pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Banyumas dan pengurus cabang Muslimat NU Sokaraja. Padahal jika melihat aturannya, tingkat kabupaten hanya ada 1 (satu) kepengurusan cabang. Sokaraja hanyalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Terdapat anggapan di kalangan Muslimat Sokaraja bahwa embrio pembentukan Muslimat justru berasal dari Sokaraja.²³ Sejak tahun 1930-an, Sokaraja juga menjadi tempat kedudukan konsul tetap NU yang membawahi wilayah kerja Banyumas, Yogyakarta, dan Kedu. Oleh karena itu Sokaraja memperoleh status yang istimewa sebagai tempat kedudukan pengurus cabang NU dan Muslimat NU yang terpisah dengan cabang Kabupaten Banyumas.²⁴ Bahkan ketika pengurus cabang NU

²³ Seperti ditegaskan oleh pengurus Muslimat Sokaraja, dalam FGD 6 Mei 2017.

²⁴ Lutfhi Makhasin, "Islamisasi dan Masyarakat Pasar : Sufisme dan Sejarah Sosial Kota Sokaraja," dalam <http://lafadl.wordpress.com/2006/09/09/15/islamisasi-dan-masyarakat-pasar-sufisme-dan-sejarah-sosial-kota-sokaraja> diakses tgl 26 Juli 2017.

Sokaraja melebur ke kepengurusan cabang NU Banyumas pada awal tahun 1990-an, kepengurusan cabang Muslimat NU Sokaraja tetap mandiri dari kepengurusan cabang Muslimat NU Banyumas sampai saat ini. Saat ini dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Muslimat NU Banyumas membawahi 21 Anak Cabang dan Muslimat NU Sokaraja menaungi 6 Anak Cabang.

Visi-Misi, Struktur Organisasi dan Program Kerja Muslimat NU

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki visi misi Muslimat NU dijalankan secara nasional dari atas sampai ke bawah. Visi dan misi Muslimat NU adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah SWT.

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

4. Melaksanakan tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhai Allah SWT.

Muslimat NU memiliki lambang organisasi sebagai berikut:

Gambar 5.3. Lambang Organisasi Muslimat NU



Lambang Muslimat memiliki makna sebagai berikut :

1. Bola dunia terletak di tengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan takwa kepada Allah SWT.
3. Lima buah bintang terletak di atas, yang terbesar dipuncak berarti: Sunnah Rasulullah Saw yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah' anhum.
4. Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu: Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Adapun warna-warna yang digunakan dalam lambang Muslimat NU di atas, memiliki makna sebagai berikut: 1) Putih melambangkan ketulusan dan keihlasan; 2) Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian; 3) Tulisan Nahdlatul Ulama berarti Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

Selanjutnya dijelaskan mengenai perangkat organisasi Muslimat NU, yaitu terdiri dari lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Lembaga yang berbadan hukum, yaitu: 1) Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKMNU); 2) Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Bina Bakti Wanita; 3) Yayasan Haji Muslimat NU (YHMNU); 4) Induk Koperasi An-Nisa' (INKOPAN). Adapun lembaga yang tidak berbadan hukum terdiri dari: 1) Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU (Hidmat NU); 2) Ikatan Haji Muslimat NU (IHMNU); 3) Ikatan Guru TK Muslimat NU (IGTKMNU); 4) Ikatan Guru RA Muslimat NU (IGRAMNU); 5) Ikatan Pengelola TK Muslimat NU (IPTKMNU); 6) Ikatan Pengelola RA Muslimat NU (IPRAMNU); 7) Ikatan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU; 8) Ikatan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU

Organisasi Muslimat NU memiliki jenjang kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat anak ranting. Jenjang kepemimpinan organisasi digambarkan sebagai berikut:

- Pimpinan Pusat (PP) untuk Tingkat Pusat
- Pimpinan Wilayah (PW) untuk Tingkat Provinsi

- Pimpinan Koordinator Daerah (P-Korda) untuk Tingkat eks Karesidenan
- Pimpinan Cabang (PC) untuk Tingkat Kabupaten/Kota
- Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) untuk Cabang di Luar Negeri
- Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk Tingkat Kecamatan
- Pimpinan Ranting (PR) untuk Tingkat Kelurahan/Desa
- Pimpinan Anak Ranting (PAR) untuk Tingkat Dusun/RW

Selanjutnya Muslimat NU di Kabupaten Banyumas yang merupakan Pimpinan Cabang Tingkat Kabupaten namun tetap memiliki dua pimpinan cabang, yaitu Pimpinan Cabang Banyumas dan Pimpinan Cabang Sokaraja, walapun sesungguhnya Sokaraja secara administrasi pemerintahan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Mengacu pada jenjang kepengurusan tingkat pusat, organisasi Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja memiliki susunan pengurus organisasi sebagai berikut:

- Pimpinan lengkap terdiri atas : a) Dewan Penasehat; b) Dewan Pakar; c) Pimpinan Harian; d) Bidang-Bidang.
- Pimpinan Harian terdiri atas : a) Ketua; b) Ketua I; c) Ketua II; d) Sekretaris; e) Sekretaris I; f) Sekretaris II; g) Bendahara I; h) Bendahara II.
- Bidang-Bidang terdiri atas : a) Organisasi dan Keanggotaan; b) Pendidikan dan Kaderisasi; c) Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; d) Kesehatan; e) Dakwah; f) Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis; g) Tenaga

Kerja; h) Hukum dan Advokasi; i) Penelitian, Pengembangan, Komunikasi dan Informasi; Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jejaringan.

Sesuai dengan kebutuhan di tingkat Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja, maka tidak seluruh jenis bidang kepengurusan digunakan. Dalam hal ini bidang-bidang yang tidak ada di Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja, mencakup bidang penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi serta hubungan luar negeri dan pengembangan jejaringan. Saat ini untuk Pimpinan Cabang Muslimat NU Banyumas periode 2015-20120 dibentuk melalui Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muslimat NU Banyumas No. 011/A/SK/PCMNU/XI/2015. Saat ini Ketua Muslimat NUBanyumas adalah Dra. Hj. Laily Manshur, dan Ketua Muslimat NU Sokaraja adalah Hj. Muslimah.

Adapun Program Kerja Muslimat NU Banyumas Tahun 2016 dirincikan di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.29. Program Kerja Muslimat NU Banyumas 2016

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Pelaksana
1	Dakwah	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	PAC Ajibarang, PAC Purwokerto Timur, Ranting Purwokerto Wetan Ranting Klapa Gading
		Pelantikan Pengurus Muslimat dan Pembinaan Anggota Muslimat	PAC Sumpiuh
		Pembinaan dan Pengajian	PAC Karanglewas, Pengurus Cabang Muslimat Banyumas, PAC Purwokerto Utara, PAC Kedungbanteng, PAC Wangon, PAC Purwokerto Barat, PAC Ajibarang, PAC Sumbang, PAC Purwokerto Selatan, PAC Rawalo, YHM Muslimat NU, PAC Baturaden
		Tahlil dan Tausiyah	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Rapat Pleno Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Upacara Hari Jadi Banyumas Pemkab Banyumas	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Kegiatan KB Gratis	PAC Kemranjen
		Mengikuti pengajian tingkat Jawa Tengah	PW Muslimat NU Jawa Tengah
		Sosialisasi Empat Pilar bersama anggota DPR RI	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Harlah Muslimat NU ke-70 di Malang	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Persiapan Tahlil Harlah Muslimat NU Banyumas	Bidang Dakwah Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Pembinaan dan Pengajian	PAC Rawalo, Bidang Dakwah Pengurus Cabang Muslimat Banyumas, Pengurus Cabang Muslimat Banyumas, PAC Ajibarang
		Mengikuti peringatan Harlah Pengurus Cabang NU Banyumas	NU Banyumas
		Rapat Pleno Pengurus Cabang Muslimat	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas

		Banyumas	
		Silaturahmi : Hikmah Silaturahmi	PAC Gumelem, IPTKM NU Banyumas
		Konsolidasi dengan Para Ulama terkait Haji	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Upacara Kemerdekaan RI	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Pengajian Maratussholikhah Jawa Tengah	Bidang Dakwah Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Rapat YKM	YKM Muslimat NU Banyumas
		Mengikuti Upacara Sumpah Pemuda	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Pengajian Maratussholikhah	Bidang Dakwah Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Upacara Hari Pahlawan Pemkab Banyumas	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Sosialisasi Hasil Kongres Muslimat NU nasional	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Mengikuti Deklarasi Anti Narkoba kerjasama dengan BNN	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
2	Bidang Hukum dan Advokasi	Sosialisasi Penyelesaian KDRT	PAC Jatilawang
		Penyuluhan Indonesia Bersinar	PAC Jatilawang
		Mengikuti Pemeriksaan Sertifikat Tanah UNU Purwokerto	
		Sosialisasi Penistaan Gender	PAC Ajibarang, PAC Kembaran kerjasama dengan Bapermas PKB
3	Bidang Organisasi dan Keanggotaan	Mengikuti PKPNU	PCNU Banyumas
		Turba PAC Patikraja	PAC Patikraja
		Rapat Ketua Harian dan Ketua Bidang	Pengurus Cabang Muslimat Banyumas
		Tugas Piket dalam GOW	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Sosialisasi advokasi dan hukum IAIN Purwokerto	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Menghadiri pembukaan RS Sumpiuh	Bidang Organisasi Muslimat NU

		Menghadiri Pelantikan PD Aisyiah	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Pembinaan PAC Patikraja	PAC Patikraja
		Sosialisasi Penguatan Aswaja	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Turba ke PAC Baturaden	PAC Baturaden
		Turba ke PAC Sumbang	PAC Sumbang
		Sosialisasi Indonesia Bersinar Kemensos	Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Sarasehan Demokrasi dalam Masyarakat Kesbangpol	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Rapat Persiapan HSN	Pengurus Cabang NU Banyumas
		Upacara HSN	Pengurus Cabang NU Banyumas dan Pemkab Banyumas
		Mengikuti Pembukaan Kongres Muslimat NU	Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Turba PAC Wangon	PAC Wangon
		Upacara Hari Ibu Pemkab Banyumas	Bidang Organisasi Muslimat NU
		Mengikuti Reses Anggota DPRD Jateng	Bidang Organisasi Muslimat NU
4	Bidang Pendidikan dan Kaderisasi	Upacara Gebyar PAUD	YPMNU Cabang Banyumas
		Peletakan Batu Pertama Pembangunan PAUD	YPM NU Banyumas
		Pembukaan Lomba Drumband TK	YPMNU
		Pekan Maulid TK	Koordinator TK
		Pelatihan Manasik Haji Guru TK	Bidang Pendidikan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pembinaan Pendidikan dan Kader	PAC Rawalo
		Silaturahmi PAC Kedungbanteng	Silaturahmi PAC Kedungbanteng
		Mengikuti Halal Bihalal GOW Banyumas	Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pembinaan Pendidikan PAC Karanglewas	PAC Karanglewas
		Penilaian Tugas Piket Pengajian	Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Mengikuti sarasehan GP3M Banyumas Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pelatihan Membuat Hantaran GOW Banyumas	Bidang Pendidikan Pengurus Cabang Muslimat NU

			Banyumas
		Menghadiri Pelantikan Pengurus KTAN Banyumas Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Pendidikan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Menghadiri Visitasi UNU Purwokerto	Bidang Pendidikan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
5	Ketenagakerjaan	Orientasi Program KKB bagi Toga dan Mitra Kerja BKKBN	Bidang Ketenagakerjaan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pelatihan Menjahit Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ketenagakerjaan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pelatihan Menanam Holtikultura Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ketenagakerjaan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
6	Pendidikan	Workshop Kurikulum 2013 Dinas Pendidikan	YPM Muslimat NU
		Pekan Maulid Anak-anak Muslimat NU	Ikatan Guru Kelompok Bermain Muslimat NU
		Pelantikan Pengurus PGTKM Patikraja	PGTKM NU Patikraja
		Koordinasi Bantuan BOP dengan Dinas Pendidikan	YPM Muslimat NU
		Sosialisasi dan Pembinaan Laziznu Jatilawang	PGTKM NU Jatilawang
		Pelantikan IKGKB Muslimat NU	Ikatan Guru Kelompok Bermain Muslimat NU
		Konsolidasi ke Penerbit Majalah CV Angkasa	YPM Muslimat NU
7	Ekonomi Koperasi dan Agrobisnis	Melayani Kebutuhan Sembako Lebaran	Bidang Ekonomi dan Koperasi Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Pembuatan Kartamus Elektrik	Bidang Ekonomi dan Koperasi Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Expo oleh 22 PAC Muslimat NU Banyumas	Bidang Ekonomi Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Mengikuti Bazar Atribut Muslimat NU	Bidang Ekonomi Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
8	Kesehatan	Sosialisasi PHBS	Bidang Kesehatan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
		Mengikuti Pelatihan KKB Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Pengurus Cabang Muslimat NU

			Banyumas
		Lomba Perolehan Akseptor KB Baru	YKM Muslimat NU
		Program Kesehatan Pelayanan IV A	PAC Cilongok
		Penyampaian Materi Kesehatan PAC Kebasen	PAC Kebasen
		Penilaian dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	YKM Banyumas
		Rapat Koordinasi CSO dan Jejaring Daerah Program Penanggulangan TB HIV dengan Aisyiah	Bidang Kesehatan Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas
7	Sosial Budaya dan Lingkungan	Silaturahmi calon jamaah haji	Bidang Sosbud dan Lingkungan
		Silaturahmi Muslimat NU PAC Kedungbanteng	Bidang Sosbud dan Lingkungan
		Mengikuti pelepasan calon haji Pemkab Banyumas	Bidang Sosbud dan Lingkungan

Sumber : *Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas Tahun 2016*, Purwokerto : Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas.

Adapun Muslimat NU Sokaraja meskipun sudah terlebih dahulu dirintis dibanding dengan Muslimat NU Banyumas dan lebih sedikit jumlah Pengurus Anak Cabang yang dinaungi, namun dalam hal kegiatan belum teradministrasi dengan baik. Dalam hal ini, program kerja Muslimat NU Sokaraja dalam setiap tahun belum terencana secara administratif. Selanjutnya dalam hal pencatatan atau pelaporan kegiatan juga belum terdokumentasikan dengan rapi dan lengkap. Berkaitan dengan program kerja tahun 2016, beberapa catatan yang ada mengenai program kerja Muslimat NU Sokaraja yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut;²⁵

1. Safari program Keluarga Berencana (KB) gratis.
2. Kegiatan sunatan massal.
3. Kegiatan donor darah dan penyuluhan masalah kesehatan tentang HIV dan narkoba.
4. Pengajian dan pembinaan penguatan Aswaja
5. Pelatihan perawatan jenazah.
6. Pelatihan pembuatan hantaran dan bordir kerjasama dengan SKB Kalibagor.
7. Pertemuan rutin Ahad Pahing di tingkat Pengurus Anak Cabang.
8. Pertemuan rutin pengurus Muslimat NU Sokaraja setiap Sabtu Kliwon.
9. Pengajian Haul massal rutin setiap tahun.
10. Melaksanakan ziarah walisanga secara rutin setiap tahun.
11. Proses pembangunan Gedung Muslimat NU Sokaraja.

²⁵ FGD dengan Muslimat NU Sokaraja, 6 Mei 2017.

5.6. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Muslimat NU Kabupaten Banyumas

Muslimat (MNU) adalah merupakan organisasi *under bow* atau perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai badan otonom yang beranggotakan perempuan Muslimah berumur 40 tahun ke atas berpaham *ahlu sunnah wal jamaah*. Kepengurusan MNU yang terhierarki dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang, dan ranting. Jenjang kepengurusan tersebut di seluruh Indonesia dan juga sudah ada sebagian di luar negeri, seperti di Jeddah, Arab Saudi, Malaysia, dan Hongkong. Dalam hal kepengurusan di Kabupaten Banyumas menjadi istimewa karena Kabupaten Banyumas memiliki dua pimpinan cabang yaitu Muslimat NU (MNU) Sokaraja dan MNU Banyumas.

Keberadaan dua kepengurusan Muslimat NU di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari MNU Sokaraja dan MNU Banyumas memang tidak lepas dari faktor kesejarahan. Ketika Orde Baru berkuasa, tahun 1990-an terdapat UU yang mengharuskan dalam satu kabupaten hanya ada satu cabang ormas. Namun ketika era reformasi, yaitu pada 12 April 2005, keduanya yang sudah bergabung selama 12 tahun kemudian berpisah lagi yang ditandai dengan penyelenggaraan konferensi berdirinya Muslimat NU Sokaraja. Keberadaan dua kepengurusan cabang dalam satu kabupaten memang dimungkinkan dalam AD ART Muslimat NU Pusat. Kondisi demikian dipicu kondisi MNU Sokaraja yang seolah mati suri ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari ibu Nur Kamilah ke ibu Laeli Mansyur. Ketika itu di Sokaraja hanya ada Perkumpulan Kesejahteraan Muslimat diketuai oleh ibu Chodijah. Sebagai bibit organisasi yang lahir terlebih dahulu dari MNU Banyumas,

MNU Sokaraja menempatkan diri berhak untuk tetap melanjutkan perjuangan para pendahulunya dengan tetap terpisah dengan MNU Banyumas.

Bila dilihat dari keberadaan dua kepengurusan cabang di Kabupaten Banyumas, kondisi tersebut dapat menunjukkan potensi kekuatan karena terdapat dua kepengurusan. Namun demikian, terdapat kecenderungan permasalahan karena MNU Sokaraja merasa tiga pengurus anak cabang tidak mau kembali bergabung dengan MNU Sokaraja. Dari 27 pengurus anak cabang di Kabupaten Banyumas, hanya enam yang bergabung dengan MNU Sokaraja, yaitu Kembaran, Sokaraja, Kali Bagor, Banyumas, Somagede, dan Tambak. Sisanya bergabung dengan MNU Banyumas. Hal ini disampaikan oleh ibu Muslimah :

“Enam anak cabang, lainnya tiga kemana? Tiga masih ikut Purwokerto atau Banyumas. Dulu pernah saya ajak untuk kembali, tapi mereka itu belum mau. Dan Purwokerto juga masih membina, jadi saya pikirnya *ohh pada bae ngaji iki*. Ancab (anak cabang) yang sampai sekarang istilahnya *dolan ora gelem balik-balik*. Aslinya seperti Ancab Kemranjen itu ikut cabang Sokaraja. Yang asli itu, anak cabang Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kali Bagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, kemudian Tambak. Ada sembilan kecamatan, ini yang asli kewilayahan yang dibagi oleh wilayah Jawa Tengah.”²⁶

Selain itu, terdapat kecenderungan anak cabang yang saat ini bergabung dengan MNU Sokaraja ingin bergabung dengan MNU Banyumas. Hal tersebut terungkap dalam penjelasan beberapa pengurus MNU Banyumas, sebagai berikut:²⁷

“Teman saya sampai dengan hari ini Tambak saja, sebenarnya ingin gabung ke sini bu, kata-kata itu terakhir beberapa hari yang lalu saja ketika saya sampaikan ibu aku ada tugas disini. Terus dia bilang kok kita, terus sampai

²⁶ Ketua Muslimat NU Sokaraja, dalam FGD tanggal 6 Mei 2017.

²⁷ Pengurus MNU Banyumas, dalam FGD 11 Mei 2017.

akhirnya sebenarnya *jane kepingin banget* sudah, tapi belum mendapat restu dari terutama ibu ketuanya begitu. Karena saya melihat dari beberapa anak cabang yang dimiliki Sokaraja, sesungguhnya mereka mau gabung dengan kita.”

“Dan bahkan Patikraja itu, ada satu ranting ini unik, satu ranting namanya Lahar Wetan itu ikut anak cabangnya Patikraja. Dan saya gini, pokoknya saya tidak melihat batas wilayah, pokoknya saya syiar Muslimat, sehingga saya rintis betul. Saya dirikan Msulimat disitu dengan berbagai dinamikanya tentunya. Setelah menjadi ranting, saya serahkan ke Kali Bagor karena masuk kecamatan tersebut. Tetapi mereka bilang kegiatannya menarik Patikraja begitu, dan asetnya lebih membanggakan di Banyumas katanya begitu.”

Dalam hal kepemimpinan, baik di MNU Sokaraja maupun MNU Banyumas terdapat kekuatan adanya rasa kepercayaan atau *trust* pada kepemimpinan. Dalam hal ini ibu Muslimah menjadi ketua MNU Sokaraja dari tahun 2005-2010-2015-2020 dan ibu Laily Manshur menjadi ketua MNU Banyumas mulai 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019. Kondisi demikian sama dengan pimpinan pusat Muslimat NU Ibu Khofifah yang menjadi ketua Muslimat sekarang memasuki periode keempat. Ada anggapan bahwa ibu Muslimah sudah pas menjadi ketua Muslimat NU Sokaraja, sebagaimana dinyatakan dalam FGD sebagai berikut :

“Karena memang yang pas bu, pokoknya sudah nggak ngurangi nggak apa, bahkan sampe waktunya pemilihan itu untuk memilih siapa yang dipilih, malah ada yang menulis “*Aku biasa, Bu Muslimah*” begitu bu. Sangking sudah mantepnya begitu. Jadi karena memang sudah begitu percayanya.”²⁸

Adapun kepemimpinan ibu Laily Manshur sebagai ketua MNU Banyumas saat ini memasuki periode keempat. Dalam proses pemilihan terakhir, ibu Laily Manshur didukung oleh seluruh pengurus anak cabang di bawah MNU Banyumas, yaitu 21 anak cabang. Berdasarkan informasi yang ada, sesungguhnya dari 5% atau

²⁸ Pengurus MNU Sokaraja, dalam FGD 6 Mei 2017.

10% pengurus anak cabang menginginkan pemimpin baru bukan ibu Laily lagi. Dalam hal ini dinamika MNU Banyumas memang lebih tampak dibanding MNU Sokaraja. Sesungguhnya metode kepemimpinan dalam tubuh Muslimat baik MNU Sokaraja maupun Banyumas, menyimpan permasalahan yaitu proses kaderisasi internal organisasi kurang berjalan baik atau berjalan lamban. Hal yang tidak mengherankan bila ada yang merasa tidak percaya diri atau ketakutan bagi kader penerus yang nantinya akan menggantikan sebagai ketua. Hal tersebut antara lain dapat disimak dari pengurus MNU Banyumas sebagai berikut :

“Tapi kalau di Muslimat kok ada rasa ketakutan apabila mau ganti ketua. Wong ketua yang itu sudah dipandang *agamanya ya bisa nggo contoh, ya aktif, ya ikhlas*. Sehingga mau ganti yang muda mereka merasa ketakutan, ketakutan tidak bisa seperti itu.”²⁹

Dalam dinamika organisasi Muslimat NU Pusat, kepemimpinan boleh dipegang sampai seumur hidup selama yang bersangkutan masih dipilih oleh para anggota justru dianggap cenderung bernilai politis. Sebelumnya, kepemimpinan organisasi Muslimat dari pusat hingga daerah hanya dua periode kepemimpinan dalam jangka waktu masing-masing periode lima tahun. Kemudian ketika Kongres di Bandar Lampung tahun 2011, maka kepemimpinan Muslimat menjadi seumur hidup selama yang bersangkutan masih dibutuhkan anggotanya. Hal ini sesungguhnya menunjukkan kepercayaan pada pemimpin, namun menjadikan proses kaderisasi yang kurang berjalan baik dan kurang cepat dalam internal Muslimat. Implikasinya, hal itu juga dirasakan banyak berimbas pada kepengurusan di tingkat daerah, dengan

²⁹ Pengurus MNU Banyumas, dalam FGD 11 Mei 2017.

dampak proses kaderisasi yang kurang berjalan pula. Seperti disampaikan berikut ini oleh pengurus MNU Banyumas :

“Kemranjen sendiri yang mengalami. Karena baru saja pergantian, di akhir kepengurusannya ibu Nurul, sudah banyak suara yang muda-muda itu untuk ingin ganti. Ini pas seperti yang disampaikan, sungguh memang betul. Karena imbas dari atas, ketika Ibu Khofifah dipilih kembali dan ada *imej* semua Muslimat, *kae beh dadi maning ya bu Nurul bae*, begitu ibu.³⁰

Potensi sumber daya sebagai pengurus MNU didukung oleh ikatan sosial-kultural sebagai warga *nahdliyin* yang kuat. Mereka lahir dan besar sebagai keluarga *nahdliyin* sehingga bagi kaum perempuannya tergerak untuk menjadi pengurus Muslimat NU dari usia muda sampai usia senja. Menjadi anggota ataupun pengurus Muslimat adalah bentuk kesadaran atau panggilan jiwa. Untuk mendatangi kegiatan Muslimat mereka sering menempuh perjalanan jauh, terutama bagi anggota dan pengurus anak cabang di pelosok, dengan menaiki motor atau bahkan ramai-ramai menggunakan mobil bak terbuka.

Ikatan sosial-kultural terhadap Muslimat terbentuk dari keluarga *nahdliyin* atau NU dalam arti keorganisasian. Orang tua juga menjadi pengurus NU atau pengurus Muslimat. Ketika muda mereka terlibat dalam kepengurusan Ikatan Pelajar NU (IPNU) ataupun Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), dan setelah berkeluarga bergabung dalam Muslimat NU. Dari ikatan yang bersifat sebagai *jama'ah nahdliyin*, selanjutnya sebagai organisasi, keberadaan pengurus dan anggota MNU merupakan

³⁰ Pengurus MNU Banyumas, FGD 11 Mei 2017.

anggota *jam'iyah*, yaitu sebagai anggota keorganisasian bukan *jama'ah* atau pengikut semata.

Dengan demikian, keanggotaan Muslimat ada dua macam, yaitu pertama anggota *jam'iyah* seperti halnya organisasi NU dan yang kedua adalah anggota *jama'ah*. Kalau yang anggota *jam'iah* adalah anggota yang mengikuti struktur Muslimat, mengikuti aturan-aturan Muslimat, misalnya mempunyai kartu tanda anggota, kemudian aktif mengikuti pengajian-pengajian, dan mungkin mempunyai pakaian-pakaian resmi Muslimat, mengikuti aturan Muslimat, dan segala sesuatu lainnya. Anggota yang demikian termasuk anggota Muslimat secara *jam'iah*. Sementara anggota *jama'ah* adalah anggota simpatisan *nahdliyin* atau NU dalam makna keorganisasiannya. Anggota yang termasuk dalam *jama'ah* adalah perempuan atau ibu-ibu mereka yang dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah mengikuti Islam *aswaja* NU, maka mereka termasuk anggota Muslimat secara *jama'ah*.

Dalam hal jumlah, potensi sumber daya yang dimiliki Muslimat NU jauh lebih besar dari kepemilikan kartu anggota saja. Dalam hal ini MNU Sokaraja masih hanya memiliki 100an anggota yang memiliki kartu anggota Muslimat (Kartamus), sedangkan MNU Banyumas sudah memiliki 74 ribu anggota yang memiliki Kartamus. Paling banyak alasan yang dikemukakan adalah yang paling penting menjadi anggota Muslimat, tidak membuat kartu anggota tidak masalah. Meskipun juga disampaikan oleh salah satu pengurus MNU Banyumas bahwa dalam pengadaan kartamus, sebagian terkendala karena membayar yaitu Rp 10.000 setiap membuat kartamus. Namun demikian secara umum, ikatan sosial-kultural sebagai anggota

Muslimat lebih menguat justru tanpa perlu label keanggotaan formal dengan bukti kepemilikan kartamus. Ikatan sosial-kultural terhadap Muslimat NU jauh lebih penting dibanding memiliki kartu anggota sebagai bentuk ketertiban administrasi. Dalam konteks demikian, ketua MNU Banyumas ibu Laily Manshur menunjukkan adanya semangat untuk mengembangkan Muslimat NU, dalam petikan pernyataan sebagai berikut :

“Maka marilah Muslimat NU, berkiprah tentunya juga tidak *menyampingkan* kepentingan keluarga. Tapi tugas yang diemban oleh kita, harus benar-benar kita tekuni. Jangan sampai kemudian masa bodoh lah *mlaku ya ngono, ora ya ngono*. Tapi kita harus punya dorongan batiniah, bagaimana kita bisa membawa Muslimat yang lebih maju lagi, yang berguna untuk bangsa, negara dan agama.”³¹

Muslimat NU memiliki bidang organisasi cukup lengkap mencakup : a) Organisasi dan Keanggotaan; b) Pendidikan dan Kaderisasi; c) Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; d) Kesehatan; e) Dakwah; f) Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis; g) Tenaga Kerja; h) Hukum dan Advokasi. Untuk MNU Sokaraja, program kegiatan yang dilaksanakan belum disusun dalam belum Laporan Kegiatan Tahunan. Kegiatan yang mereka lakukan meskipun sudah terjadwal rutin, tapi tidak dicatat baik sebagai program kerja yang diagendakan secara rutin dan tidak disusun dalam bentuk laporan kegiatan tahunan.

Bidang organisasi yang menonjol adalah bidang dakwah sesuai dengan basis landasan keormasan Muslimat NU sebagai ormas sosial keagamaan. Dikatakan Muslimat NU identik dengan mengaji sehingga bidang yang paling menonjol adalah

³¹ Ketua Muslimat NU Banyumas, dalam FGD 11 Mei 2017.

bidang dakwah. Kegiatan pengajian banyak didasarkan pada penghitungan kalender Jawa, misalnya pengajian MNU Sokaraja setiap Sabtu Kliwon, pengajian pengurus anak cabang pada setiap Ahad Pahing atau Ahad Wage. Kegiatan pengajian juga dilaksanakan pada setiap minggu misalnya di tingkat desa atau di ranting-ranting misalnya pengajian atau *perjanjen* pada setiap hari Jumat dan tadarus Al Quran setiap senin. Menurut penjelasan ibu Muslimah, MNU Sokaraja lebih menonjol pengajiannya daripada MNU Banyumas, sebagai berikut :

“Di ranting saya itu setiap Senin ada tadarus Al-Quran, kemudian ada satu cabang Naryahan, ada Manakib, banyak sekali bu. Kalau dibandingkan dengan Banyumas, Muslimat Sokaraja itu banyak sekali amalan-amalan atau pertemuan-pertemuan yang orangnya itu sudah umurnya 90 ke atas ibu. Tapi orangnya itu masih ikut, ya manakib, ya tadarusan, atau naryahan, *perjanjen* dan yang lainnya.”³²

Adapun untuk MNU Banyumas jauh lebih menonjol daripada MNU Sokaraja dalam hal program kegiatan dan ketertiban administrasi. Pada setiap bulannya mereka sudah menerbitkan buletin kegiatan meskipun baru dirintis. Pada setiap awal tahun, terdapat penyusunan rancangan agenda program kegiatan untuk tahun depan. Demikian pula pada setiap akhir tahun terdapat penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan. Dalam hal administrasi, didukung oleh keberadaan 12 buku wajib sebagai pedoman. Terlebih lagi, dalam setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari pengurus cabang sampai ke tingkat ranting, selalu memiliki catatan dalam buku kegiatan. Kegiatan tersebut juga didukung oleh pendokumentasian dalam bentuk foto-foto

³² Ketua Muslimat NU Sokaraja, dalam FGD 6 Mei 2017.

kegiatan. Hanya sayangnya, saat ini MNU Banyumas mengalami masalah dalam kelanjutan pengelolaan Klinik Muslimat NU Banyumas, yang sudah dibangun dengan megah namun kemudian belum bisa dikembangkan, sehingga sekarang gedung tersebut mangkrak dan terendam air.

Dalam hal kegiatan bidang hukum maupun ketenagakerjaan, menunjukkan kondisi yang belum maksimal. Hal ini diakui oleh kepengurusan kedua cabang Muslimat tersebut, MNU Sokaraja dan MNU Banyumas. Bahkan untuk bidang hukum dan ketenagakerjaan MNU Sokaraja dikatakan sebagai mati suri. Salah satu yang menjadi penyebab utamanya bahwa anggota Muslimat masih menganggap masalah keluarga sebagai aib untuk ditutup sehingga tidak meminta bantuan advokasi dalam menghadapi masalah hukum. Berikut pernyataan pengurus MNU Sokaraja dan MNU Banyumas :

“Kemudian advokasi hukum, sebetulnya ini sudah disampaikan bu apa sih itu advokasi hukum dan lain sebagainya. Namun belum pernah menemukan permasalahan yang sampai ke sana. Karena Muslimat itukan mungkin ada prinsip menutupi aib keluarga itu lebih bagus, dari pada di buka, itu begitu bu.”³³

Hal yang serupa juga dialami oleh MNU Banyumas dalam hal bidang hukum dan ketenagakerjaan. Bahkan dikatakan bahwa kedua bidang tersebut seperti mati suri atau mati gaya. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan kurangnya kemampuan sumber daya dalam membidangi hukum dan ketenagakerjaan, maka kegiatannya hanya seputar sosialisasi masalah hukum. Selain itu juga dikatakan dalam masalah ketenagakerjaan bahwa pengurus MNU Banyumas saja sebagiannya

³³ Pengurus MNU Sokaraja, dalam FGD 6 Mei 2017.

masih membutuhkan pekerjaan juga. Hanya saja kadang-kadang, kader MNU Banyumas yang juga tenaga pengajar di IAIN Purwokerto pernah melakukan kegiatan serupa, seperti sosialisasi KDRT, permasalahan perdagangan manusia atau *trafficking*, kekerasan terhadap perempuan, pembinaan keluarga sakinah dan sebagainya. Berikut penjelasan dari salah satu pengurus MNU Banyumas:

“Mati gaya dan mati suri, yang pertama bidang hukum dan tenaga kerja, ya sekali lagi sebetulnya kalau kita mau menggali bidang hukum itu sangat berkaitan erat dengan berbagai segmentasi persoalan di lapangan sebetulnya. Tetapi karena memang keterkaitan dengan SDM, sehingga apa sih ya programnya, paling banter itu sosialisasi KDRT misalnya. Itu menurut saya belum menukik kepada kebutuhan kita. Kemudian tenaga kerja, *wong* kita saja mencari gitu ya.”³⁴

Dalam hal potensi sumber daya manusia-nya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari anggota yang memiliki kartamus, sayangnya kemampuan pengurus MNU Banyumas masih kurang merata. Terdapat pengurus yang didukung oleh kualitas sumber daya bagus, namun terdapat pula yang kualitas sumber daya kurang. Hal tersebut menjadikan hanya sebagian ketua bidang saja yang dapat bekerja secara aktif. Kemampuan sumber daya yang kurang merata diakui sebagai kendala dalam bekerja mengembangkan organisasi secara maksimal walaupun dalam perencanaan program kerja masing-masing bidang sudah disusun pada setiap awal tahun. Namun satu hal yang menjadi hal utama adalah mereka menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan dengan penuh keikhlasan dan sangat bertanggung jawab. Bahkan mereka sering menargetkan tujuan tertentu untuk melaksanakan tugas, misalnya

³⁴ Pengurus MNU Banyumas, dalam FGD 11 Mei 2017

dalam satu tahun harus bisa mendirikan tiga TK (TK Diponegoro di Kabupaten Banyumas adalah didirikan oleh Muslimat NU). Tapi memang karena sumber daya manusia-nya, sehingga hanya beberapa ketua bidang yang bisa bekerja. Berikut petikan pernyataan salah satu pengurus MNU Banyumas :

“Jadi bisa dikatakan, Muslimat ini walaupun mungkin SDMnya untuk Banyumas dikatakan rendah. Tapi kalau yang sudah berkecimpung jadi pengurus ini, sangat ikhlas dan sangat bertanggung jawab. Bahkan sering memberikan target, setahun bisa mendirikan tiga TK bu. Jadi itu dari segi pendidikan sangat-sangat bagus, karena itu nilai keikhlasan dan doanya, sehingga sepertinya semuanya punya target.”³⁵

Untuk MNU Sokaraja mengalami permasalahan dalam hal pemahaman tupoksi masing-masing pengurus. Melaksanakan tugas sebagai pengurus lebih dikarenakan karena sudah menjadi amanah sehingga harus dilaksanakan walaupun terkadang mereka kurang paham mengenai tupoksinya. Selain itu, MNU Sokaraja juga mengalami permasalahan dalam hal jaringan dengan pihak lain seperti dinas-dinas dalam jajaran Pemkab Banyumas dan Gerakan Organisasi Wanita Banyumas (GOW). Muslimat NU Sokaraja belum memiliki jaringan tersebut.

Adapun MNU Banyumas sudah tergabung dan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan GOW Banyumas. Hal ini juga merupakan salah satu potensi MNU Banyumas. MNU Banyumas juga didukung oleh pendanaan GOW yang diperoleh dari bantuan pemkab. Dana stimulan tersebut kemudian dibagi ke bidang-bidang GOW dan berdampak juga penyelenggaraan kegiatan MNU Banyumas seperti seminar tentang kesehatan dan sebagainya. Jaringan MNU Banyumas juga didukung

³⁵ Pengurus MNU Banyumas, dalam FGD 11 Mei 2017.

oleh hasil pengelolaan PAUD. Dalam pengelolaannya, MNU Banyumas memiliki hubungan yang baik dengan Dinas Pendidikan dan UPK Kecamatan, misalnya menyangkut ijin penyelenggaraan operasional pendidikan, secara otomatis terdapat kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Adapun untuk TK Diponegoro pengelolaan di bawah koordinasi Depag Kabupaten Banyumas. Selain bidang pendidikan, kerjasama MNU Banyumas juga berlangsung dengan BNN dan Dinas Sosial.

Sebagai organisasi keagamaan, maka jaringan utama yang dimiliki oleh mereka tentu saja jaringan dengan para tokoh-tokoh agama seperti para kyai dan ibu nyai, tokoh-tokoh agama, atau organisasi *underbow* NU lainnya seperti Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri (IPPNU). Berkaitan dengan dua kepengurusan, sebenarnya menimbulkan masalah khusus MNU Sokaraja. Dalam hal ini pihak pemerintah provinsi, dalam melakukan kegiatan yang menyertakan Muslimat, umumnya hanya mengenal MNU Banyumas bukan MNU Banyumas dan MNU Sokaraja. Secara umum pihak luar memahami di tingkat kepengurusan cabang Kabupaten Banyumas, tentu saja identik dengan MNU Banyumas. Termasuk dalam hal ini masalah bila ada peluang untuk mendapatkan sumbangan dari pemerintah, maka dibunyikan sebagai MNU Banyumas saja.

Dalam hal pendanaan, organisasi Muslimat NU adalah organisasi yang mandiri. Hal tersebut tercermin dari bagaimana MNU Sokaraja maupun MNU Banyumas menggali sumber dana yang bersumber dari iuran anggota dengan istilah lokal *kalengan* atau *pithian*. Misalnya untuk MNU Sokaraja, pada setiap selapan dalam kalender Jawa, masing-masing ranting di setiap desa memberikan iuran sebesar

Rp 5000 yang dikumpulkan ke pengurus anak cabang kemudian disetor ke pengurus cabang MNU Sokaraja. Iuran juga dapat bersifat tahunan, misalnya ketika penyelenggara Haul massal berupa pengajian umum, hataman Al Qur'an, dan kirim doa. Mereka yang ingin didoakan untuk anggota keluarganya memberi infaq masing-masing Rp 5000. Selain itu, setiap anak cabang di MNU Sokaraja menggali dana sendiri, misalnya dengan menerbitkan kalender pada setiap tahun. Seperti di pengurus anak cabang Muslimat Tambak yang setiap tahun menerbitkan 2500 kalender, yang dijual seharga Rp 13.000. Penjualannya biasanya melibatkan IPNU dan IPPNU dengan sistem bagi hasil.

Adapun untuk MNU Banyumas, jenis kegiatan yang bersinggungan dengan masalah penggalangan dana jauh lebih bervariasi. Dalam hal kegiatan pengajian misalnya, terdapat kegiatan pengajian setiap Ahad Manis di masing-masing anak cabang atau 21 anak cabang yang dihadiri oleh perwakilan pengurus cabang. Dalam hal ini peserta yang menghadiri pengajian tersebut bisa mencapai 2000-3000 orang *jamaah* Muslimat, terutama untuk anak cabang di pedesaan seperti anak cabang Sumbang ataupun Jatilawang.

Dengan berbekal metode *kalengan*, yaitu iuran seikhlasnya dengan menggunakan kaleng yang diputar dari peserta pengajian dari depan sampai belakang, maka rata-rata setiap anak cabang di MNU Banyumas memiliki kas organisasi minimal 25 juta rupiah. Selain bersumber dari metode *kalengan*, kas organisasi juga didukung oleh pengelolaan PAUD dan TK Diponegoro. Sehingga tidak mengherankan kalau kas organisasi ada yang mencapai 100 juta rupiah. Apalagi

untuk kas pengurus cabang MNU Banyumas, jumlah kas yang dimiliki jauh di atas kas anak cabang Muslimat.

Muslimat NU adalah organisasi yang dapat dikatakan tidak mendapatkan dana dari sponsor kegiatan. Secara prinsip, karena berbasis keikhlasan, maka untuk penggalangan dana adalah tergantung kapasitas masing-masing pengurus untuk mencari sumber dana. Variasi penggalangan dana oleh MNU Banyumas selain dilakukan oleh 21 kepengurusan anak cabang, juga didukung oleh kerja dari masing-masing bidang di bawah pengurus cabang Muslimat NU Banyumas. Bidang koperasi misalnya, menggalang sumber dana dari penjualan atribut Muslimat, dan sudah memiliki kios di lokasi Gedung Muslimat NU Banyumas di wilayah Kauman Lama Purwokerto. Kadang-kadang mereka juga mengikuti pameran atau bazar untuk menambah penjualan atribut Muslimat yang semua dana yang diperoleh dimasukkan ke koperasi untuk kesejahteraan anggota koperasi MNU Banyumas.

Dalam hal ini secara internal pengurus cabang, memiliki jalur iuran resmi sesuai dengan petunjuk dalam AD ART. Iuran resmi tersebut mewajibkan setiap anggota Muslimat NU wajib membayar iuran wajib per bulan, yaitu sebesar Rp 1000. Adapun kalau mengikuti hasil Kongres Muslimat Pusat, iuran resmi tersebut adalah sebesar Rp 2000 per anggota pada setiap bulan. Namun untuk MNU Banyumas masih diberlakukan iuran resmi sebesar Rp 1000.

Iuran anggota yang bersifat insidental pendapatannya dapat jauh melebihi iuran formal atau resmi. Dalam hal ini dalam kegiatan pengajian yang dilaksanakan mulai dari tingkat pengurus cabang sampai ke pengurus ranting, menjadi bentuk

penggalangan dana dengan *kalengan* atau *pithian*, sehingga sifatnya tidak tetap jumlahnya. Dalam pengajian yang dilakukan oleh pengurus anak cabang Baturaden misalnya, dapat terkumpul sebesar 2-3 juta terutama kegiatan pengajian besar dan rutin yaitu setiap Ahad Manis. Pengajian yang diselenggarakan dapat meliputi *yasinan*, *sholawatan*, pengajian ceramah oleh kyai, dan sebagainya. Terkadang juga dalam setiap kegiatan, pengurus anak cabang juga berjualan gula, sehingga hasil yang didapat sangat lumayan. Hal demikian dilakukan oleh pengurus anak cabang Patikraja. Dalam satu kegiatan, mereka bisa menjual mencapai 1 ton gula. Hal demikian dirasakan patut dicontoh oleh pengurus anak cabang lainnya, yaitu Jatilawang, dalam petikan sebagai berikut :

*Ya botten niat pamer iki, niate junjung organisasi yang baik ditiru, niku iuran kalengan mboten kerasa. Niku mboten terasa bisa ditiru. Dan saya juga pengen niru Bu Hasanah dari Patikraja kemarin, sekali pertemuan kok jual gula satu ton, jan'ne Jatilawang ya bisa ngger wong siji kon turu 1 kg malah 3 ton udune. Tapi bagaimana caranya, ngaji karo tuku gula.*³⁶

Adapun untuk pengurus anak cabang Jatilawang, justru sudah mampu membeli sawah sebagai aset Muslimat. Dana pembelian sawah murni dari iuran anggota yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Totalitas dalam penggalian dana seperti ini juga didukung oleh komitmen pengurus anak cabang yang “harus memberi contoh” untuk berkontribusi dalam infaq. Sebagaimana halnya pengurus anak cabang lainnya, mereka juga mengandalkan metode *kalengan* pada saat pengajian Ahad Pahing. Rata-rata dari dalam *kalengan* itu, iuran masing-masing anggota minimal Rp 2000. Uang yang terkumpul sebagian diberikan pada yang

³⁶ Pengurus MNU Banyumas-Baturaden, dalam FGD 11 Mei 2017.

ketempatan kegiatan dan sebagian masuk kas organisasi. Terkadang mereka juga mampu membantu pembangunan mushola SD di Jatilawang. Kas dari pengurus cabang Jatilawang juga bisa digunakan untuk membayar iuran wajib anak cabang ke pengurus cabang MNU Banyumas, dan juga memberi *sangu* pada pengurus anak cabang untuk menghadiri kegiatan di pengurus cabang MNU Banyumas. Hal yang umum juga kalau ibu-ibu Muslimat di berbagai anak cabang juga membantu kegiatan IPNU, IPPNU, Banser ataupun Anshor, sebagai sesama organisasi di bawah *underbow* NU atau perangkat NU.

Kondisi yang agak berbeda dirasakan oleh pengurus anak cabang Muslimat NU di kawasan perkotaan. Dalam hal ini, penyelenggaraan pengajian misalnya, hanya diikuti oleh paling banyak 200-an orang. Kalau pengurus anak cabang di perdesaan bisa mencapai ribuan. Orang desa kalau mengaji menggunakan truk atau naik mobil terbuka bukan menjadi hambatan untuk mendatangi pengajian. Namun di wilayah perkotaan, pengajian di tingkat anak cabang paling diikuti oleh perwakilan satu ranting cukup mengirimkan dua orang, ketua dan sekretaris. Untuk tempat kegiatan pengurus anak cabang di perkotaan yang meliputi pengurus anak cabang Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur, biasanya dengan menyewa gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) atau menyewa Balai Kelurahan. Hanya saja, walaupun yang mengaji atau yang mengikuti kegiatan lainnya hanya maksimal 200 orang, iuran anggotanya cenderung lebih banyak. Rata-rata masing-masing anggota berinfaq Rp 10.000. Dengan sumber dana yang cenderung lebih terbatas jumlahnya, aset atau inventaris yang dimiliki oleh pengurus

anak cabang di perkotaan jumlahnya masih minim. Dapat disimak dari pernyataan berikut :

“Bedanya disitu *nggih, wonge pada arang-arang ngaji*. Tapi ya karena kesadaran masih kerja, sehingga infaq atau Tahlil *satu apa dua? Saya sepuluh bu*. Berarti 100 ribu, lah itu kelebihanannya saya disitu. Jadi yang lain tidak apa-panya, inventaris *nggak punya bu, Masyaallah*, punya inventaris hanya taplak meja sama buku adminstrasi. Beda dengan Patikraja, *flashdisk duwe apa-apa duwe*, alat-alat *iki lengkap*. Jati Lawang *nduwe sawah, nduwe apa*, Purwokerto Selatan *nggak punya bu*. Saya kira Purwokerto Utara, Barat sama ya bu, karena setiap kegiatan Ahad Wage adanya di Balai Kelurahan.”³⁷

Selain mengandalkan iuran berupa dari anggota baik yang bersifat rutin ataupun insidental, pendanaan Muslimat NU juga didukung oleh wakaf dari anggota *jam'iyah* ataupun *jama'ah*. Dalam hal ini, wakaf lebih berupa tanah atau disebut dengan wakaf konvensional. Adapun wakaf dalam bentuk “gerakan uang” dikatakan status hukum secara syariat Islam belum jelas apakah diperbolehkan atau tidak. Misalnya untuk pembangunan gedung PAUD, dapat mengandalkan wakaf tanah dari seorang pengurusnya. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah secara yuridis belum dinamakan sebagai aset Muslimat, walaupun secara hukum syariat Islam sudah diwakafkan oleh si pemiliknya. Dari 23 TK Diponegoro yang dimiliki oleh MNU Banyumas, hampir semua tanah yang digunakan untuk TK tersebut adalah bersifat wakaf namun masih atas nama pemilik tanah yang memberikan wakaf tersebut. Namun MNU Banyumas juga sudah memiliki TK yang tanahnya dibeli dari dana MNU Banyumas sendiri. TK tersebut merupakan TK Percontohan terletak di

³⁷ Pengurus MNU Banyumas-Purwokerto Selatan, dalam FGD 11 Mei 2017.

Kelurahan Bobosan. Dana dari pembangunan tersebut bukanlah dari wakaf seseorang, namun dari kas organisasi atau dengan kata lain dari iuran anggota.

Dengan demikian, masing-masing pengurus anak cabang sejumlah 21 anak cabang di bawah MNU Banyumas memiliki aset dalam bentuknya yang berbeda-beda, yang bersumber dari iuran rutin anggota, iuran sukarela, maupun wakaf. Bahkan MNU Banyumas pernah menyumbang pembangunan gedung NU Banyumas sebesar 60 juta rupiah. Kondisi demikian menunjukkan komitmen tinggi yang dikembangkan oleh masing-masing pengurus dan anggota-nya untuk membesarkan Muslimat NU Banyumas dengan caranya masing-masing, baik berupa sumbangan uang, pemikiran, tenaga, makanan, barang, tanah, dan sebagainya. Seluruh identifikasi potensi dan permasalahan Muslimat NU Sokaraja dan Muslimat NU Banyumas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.30. Identifikasi Potensi dan Permasalahan MNU Banyumas dan MNU Sokaraja

No.	Aspek	Identifikasi		Catatan
		Potensi	Permasalahan	
1.	Organisasi	Kabupaten Banyumas memiliki dua kepengurusan tingkat cabang, yaitu MNU Banyumas dan MNU Sokaraja. Keberadaan dua organisasi dapat memperkuat kinerja keorganisasian dalam berkontribusi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Enam pengurus anak cabang masuk ke MNU Sokaraja dan 21 pengurus anak cabang masuk MNU Banyumas. • Ada kerisauan tiga anak cabang harusnya ikut Sokaraja 	Berkaitan dengan faktor kesejarahan MNU Sokaraja dan MNU Banyumas, awalnya terpisah dan bergabung pada tahun 1993-2005 kemudian berpisah kembali sampai sekarang

- Ada kerisauan beberapa anak cabang yang ingin bergabung dengan MNU Banyumas
- Setelah bergabung berpisah kembali karena merasa tidak berkembang pada saat ganti kepemimpinan di MNU Banyumas tahun 2005
- Berkaitan dengan relasi dengan pemerintah, terkadang pemahaman mengenai pengurus cabang hanya satu Muslimat NU Kabupaten Banyumas, tidak membedakan MNU Sokaraja dan MNU Banyumas

2. Visi Misi	Mengikuti visi misi Muslimat NU Pusat sehingga dalam menjalankan program kegiatan organisasi dapat senantiasa beriringan sejalan dengan visi misi dari hierarkhi atas sampai	Penerjemahan visi misi ke tingkat kepengurusan cabang sampai ke dalam bentuk program kegiatan kurang ada kontrol hierarkhisnya dari atas sampai	Visi Muslimat NU adalah “Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
--------------	--	---	--

	bawah		bawah.	(NKRI) yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah SWT”.
3.	Bidang organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang organisasi cukup lengkap mencakup : a) Organisasi dan Keanggotaan; b) Pendidikan dan Kaderisasi; c) Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup; d) Kesehatan; e) Dakwah; f) Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis; g) Tenaga Kerja; h) Hukum dan Advokasi; • Dalam hal administrasi organisasi terdapat 12 buku wajib sebagai buku pedoman administrasi dari Muslimat Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang dakwah paling menonjol dalam program kegiatan Muslimat NU. • MNU Sokaraja memiliki koperasi yang belum berbadan hukum • Bidang tenaga kerja dan hukum paling lemah dalam kinerja, baik Muslimat NU Sokaraja maupun Muslimat NU Banyumas. 	Mengacu pada AD ART Muslimat Pusat, yang tidak ada adalah bidang penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi; hubungan luar negeri dan bidang pengembangan jejaringan.
4.	Kepemimpinan	Memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinnya, atau nilai trust pada sosok ketua organisasi, direfleksikan dalam kepemimpinan Ibu Muslimah sebagai ketua MNU Sokaraja masuk periode ketiga dan Ibu Laily Manshur sebagai ketua MNU Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Muslimat Pusat memungkinkan ketua Muslimat dari pusat sampai daerah dipilih seumur hidup selama masih dibutuhkan oleh kader. • Secara internal 	Keputusan pemimpin dapat dipilih seumur hidup dinilai politis sejak Khofifah Indar Parawansa menjadi Ketua Umum Muslimat melalui Kongres Lampung.

	masuk periode keempat.	ada ketakutan para kader untuk menjadi ketua pengurus cabang Muslimat karena harus memenuhi kriteria kemampuan agama, aktif dalam mengerakkan organisasi dan hati yang ikhlas.		
		<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika pengkaderan untuk mempersiapkan pemimpin mendatang menjadi kurang berjalan. • Terdapat kondisi misalnya di Kemranjen, pengurus muda ingin maju sebagai ketua anak cabang, tetapi terimbas dari keputusan tersebut sehingga ketua lama dipilih kembali. 		
5.	Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> • Dua kepengurusan dalam satu kabupaten berarti MNU didukung oleh lebih banyak sumber daya. • Seluruh bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua sumber daya pengurus paham terhadap tupoksi masing- 	Struktur kepengurusan mengikuti AD ART MNU Nasional, disesuaikan dengan

		<p>MNU memiliki formasi kepengurusan dengan jumlah yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurus sudah mengikuti berbagai pelatihan. 	<p>masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan masing-masing bidang tergantung pada kapasitas masing-masing pengurus, yang berarti kapasitas masing-masing pengurus kurang berimbang, misalnya bidang hukum dan ketenagakerjaan masih kurang jalan. • Menyadari keterbatasan adanya kemampuan sumber daya namun merasa yakin dengan kekuatan keikhlasan dan doa, bahkan dalam perencanaan program seringkali membuat target pencapaiannya. 	kebutuhan daerah
6.	Kegiatan dan Laporan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki begitu banyak kegiatan dalam masing-masing bidang sebagaimana disebutkan di atas, kecuali bidang hukum dan ketenagakerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • MNU Banyumas sudah memiliki program kerja yang terencana dan laporan kegiatan setiap tahun. • MNU Sokaraja 	Secara lengkap program kegiatan MNU Banyumas dan MNU Sokaraja dapat dilihat dalam Sub-bab 5.5

	<ul style="list-style-type: none"> • Program kegiatan bisa bersifat rutin, setiap minggu, setiap hitungan selapan Jawa, setiap bulan atau setiap tahun. • Kegiatan juga dapat bersifat insidental. 	<p>belum memiliki program kerja yang diagendakan secara terencana dan belum ada laporan kerja tahunan.</p>	
7. Ikatan terhadap organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Para pengurus MNU memiliki nilai-nilai organisasi yang sangat kuat dengan ikatan yang mendarah daging sejak kecil, berawal dari ikatan sebagai warga nadliyin, kemudian berkembang menjadi keterlibatan dalam organisasi NU dan Muslimat, sejak dalam lingkungan keluarga NU. • Menjadi pengurus berawal sebagai jama'ah kemudian jam'iyah seperti halnya dalam organisasi NU. • Menjadi pengurus Muslimat adalah kesadaran, keikhlasan hati, rasa tanggung jawab dan panggilan jiwa. 	<p>Pengurus yang masuk usia senja terkadang kurang agresif untuk menangkap isu-isu sosial kemasyarakatan seperti isu gender.</p>	<p>Umur pengurus MNU bisa mencapai 80-90an</p>
8. Keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotan Muslimat terdiri dari dua macam, yaitu anggota jam'iyah seperti halnya NU dan anggota jama'ah. Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini yang terdaftar memiliki kartu anggota Muslimat untuk MNU Banyumas 	

	<p>Jam'iah berarti mengikuti struktur Muslimat, mengikuti aturan-aturan Muslimat, seperti mempunyai kartu tanda anggota, aktif mengikuti pengajian, mempunyai pakaian resmi Muslimat, dan sebagainya. Adapun anggota jama'ah adalah anggota simpatisan sebagai warga nahdliyin, mengikuti Islam berhaluan <i>ahlusunnah wal jamaah annahdliyah</i> atau Aswaja NU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Didukung oleh anggota ibu-ibu nahdliyin yang berumur 40 tahun ke atas. • Memiliki anggota ibu-ibu nahdliyin yang memiliki kartu anggota ataupun tidak. 	<p>sekitar 74 ribu anggota. Adapun di MNU Sokaraja yang memiliki kartu anggota hanya 100an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padahal anggota Muslimat baik di MNU Banyumas dan MNU Sokaraja yang tidak memiliki kartu anggota jauh lebih banyak. • Peningkatan keanggotaan secara formal dapat memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki Muslimat 	
9. Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan Muslimat Pusat setiap anggota Muslimat NU wajib membayar iuran wajib per bulan sesuai kesepakatan terakhir dalam Kongres Muslimat per anggota Rp 2000. Tapi di Banyumas masih diberlakukan Rp 1000. • Di luar itu, para 	<p>Dukungan dana dari pemerintah daerah bersifat bantuan dengan proses pengajuan pendanaan kegiatan terlebih dahulu dan tidak secara rutin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungan perbedaan semangat untuk iuran anggota dalam berbagai metodenya, antara kepengurusan anak cabang di kawasan perkotaan dan perbedaan. • Bahkan beberapa pengurus anak

-
- pengurus komitmen pengurus dan anggota Muslimat untuk iuran, dengan istilah lokal *pitian*, *thole-thole*, *kalengan*, dilakukan setiap ada kegiatan pengajian atau lainnya, yaitu kegiatan rutin bulanan atau tahunan. Iuran seperti itu berkisar Rp 2000a per orang
- Tidak ada honor untuk para pengurus Muslimat
 - Penjualan bahan makanan pokok pada saat kegiatan untuk dibeli sendiri oleh anggota pengurus.
 - Menyelenggarakan bazar murah secara internal atau ikut dalam bazar murah yang dilakukan pihak-pihak lain.
 - Penjualan atribut-atribut Muslimat seperti kalender, syal, jilbab dan sebagainya dalam pameran atau bazar.
 - Penggalangan dana dilakukan baik di tingkat Muslimat cabang, anak cabang ataupun ranting.
 - Jumlah iuran ribuan rupiah namun jumlah terkumpul dapat mencapai puluhan juta setiap
- cabang sudah memiliki gedung sendiri, seperti PAC Jatilawang, Sumbang, Patikraja, bahkan Jatilawang memiliki sawah.
- Semua itu bersumber dari iuran kalengan rata-rata Rp 2000an.
 - sedangkan yang diperkotaan belum, seperti PAC Purwokerto Selatan, PAC Purwokerto Utara, PAC Purwokerto Barat, PAC Purwokerto Timur.

10. Jaringan	<p>tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donatur atau wakaf dari jamaah Nahdliyin dan khususnya Muslimat yang memiliki komitmen untuk membangun Muslimat NU baik di Banyumas maupun Sokaraja • Memiliki potensi untuk mendukung ormas underbow NU lainnya seperti IPNU dan IPPNU yang terkadang kedua organisasi tersebut disokong Muslimat untuk penggalangan dana ataupun dukungan kegiatan seperti pengadaan konsumsi • MNU Banyumas sudah tergabung dalam GOW • Jaringan kultural terutama mengandalkan basis tradisional, seperti pondok pesantren, kelompok pengajian, kyai da para guru ngaji 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan dengan jajaran dinas Pemkab Banyumas masih terbatas, paling banyak yang terkait dengan pendidikan, karena Muslimat mengelola PAUD dan TK, yaitu dengan Dinas Pendidikan, dan Depag. • MNU Banyumas memiliki MoU dengan BNN. • Hanya MNU Banyumas yang tergabung dalam GOW
--------------	---	--

Sumber : data primer, diolah

Sebagai organisasi sosial keagamaan yang besar dan didukung oleh jumlah sumber daya yang melimpah, Muslimat NU tentu tidak lepas dari masalah godaan politik. Sesuai AD ART nya Muslimat NU bukanlah organisasi politik. Hal itu berarti

sesungguhnya dari partai politik manapun dapat masuk menjadi anggota Muslimat selama tidak membawa nama partai politiknya. Hanya saja, karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), sehingga aktivitis partai tersebut cenderung masuk Muslimat, walaupun tidak menutup kemungkinan Partai Golkar misalnya, kadernya masuk sebagai anggota Muslimat selama tidak membawa nama partainya. Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa kader Muslimat yang duduk di DPR/DPRD dapat membawa kesejahteraan bagi Muslimat walaupun tidak boleh membawa bendera Muslimat.

Hal yang normatif berlaku adalah dipersilahkan kepada seluruh anggota Muslimat NU untuk memilih partai politik yang dikehendaki. Namun dalam praktek, sebagian kader atau pengurus Muslimat terkadang sering “*dikelitiki*” atau dirayu-rayu untuk masuk ke ranah politik. Ikatan sosial-kultural terhadap Muslimat sebagai organisasi yang dicintai, menjadikan banyak anggapan bahwa dukungan kader Muslimat sangat potensial dalam proses politik.

Kondisi demikian justru menjadikan sebagian anggota Muslimat merasa perlu untuk lebih mengerti dan paham pendidikan politik. Hal tersebut juga dirasakan terutama menjelang momen-momen politik, seperti pemilihan bupati-wakil bupati, pemilihan gubernur-wakil gubernur, pemilihan presiden dan tentu pemilu legislatif dari tataran legislatif pusat, provinsi dan daerah. Terdapat kecenderungan untuk memanfaatkan Muslimat sebagai sumber pendulangan suara ketika momen politik. Modus yang dilakukan biasanya melalui penyelenggaraan pengajian, pemberian sumbangan makanan pokok, sumbangan uang gedung, dan sebagainya. Hal ini

dirasakan oleh para pengurus Muslimat NU bahwa mereka yang mendekati Muslimat menjelang momen politik berarti hanya memanfaatkan potensi suara Muslimat NU yang jumlahnya mencapai ratusan ribu hanya di Kabupaten Banyumas saja. Dalam istilah mereka, mereka sadar kemungkinan akan ditempatkan seperti “daun salam” untuk penyedap bumbu masak, ketika masakan sudah jadi maka daun salam akan dibuang begitu saja. Maka sebagai bagian dari dinamika internal Muslimat NU, terutama yang dirasakan oleh MNU Banyumas, pendidikan politik menjadi wawasan pengalaman dan pengetahuan yang ingin mereka peroleh.

5.7. Inisiasi Sinkronisasi Program Kerja Muslimat NU dengan Kebijakan Responsif Gender Kabupaten Banyumas

Sebagaimana sudah diungkap dalam Bab 1 di muka, kelompok perempuan memegang peranan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang berperspektif gender. Misalnya, kelahiran UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu maupun UU. No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang mengatur ketentuan kuota 30 % perempuan di parlemen, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan sebagainya. Kelahiran berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan kelompok perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Adanya peran penting berbagai kelompok perempuan di atas mendorong pentingnya mengkaji kontribusi kelompok perempuan strategis lainnya, seperti

halnya Muslimat NU. Secara faktual, Muslimat NU memiliki keanggotaan yang demikian besar dan tersebar di tingkat nasional sampai ranting di pelosok perdesaan. Dalam hal ini Muslimat NU telah menyatukan perempuan golongan *nahdliyin* yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dengan ikatan sosial sangat mendalam dan mengakar. Muslimat NU merupakan organisasi massa perempuan non-pemerintah yang memiliki potensi sangat strategis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan berperspektif gender melalui program kerja yang dilakukan.

Sebagaimana telah dibahas di atas, pembangunan manusia yang berbasis gender di Kabupaten Banyumas baik secara regional maupun nasional berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum dipahami bahwa program kerja Muslimat NU masih terkesan terpisah dengan permasalahan krusial yang menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah, khususnya kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan yang sensitif dan responsif gender. Namun demikian, bidang kerja yang dimiliki oleh Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja memiliki potensi yang luar biasa untuk diajak bersama-sama oleh SKPD-SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang berperspektif gender di Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini bidang-bidang kerja Muslimat NU yang relatif dekat dan dapat mendukung pembangunan gender di Kabupaten Banyumas adalah bidang pendidikan, kesehatan, sosial hukum dan ekonomi ketenagakerjaan. Untuk mengelaborasi tingkat kesesuaian antara isu dan permasalahan serta kebijakan pembangunan gender di

Kabupaten Banyumas, studi ini menggunakan kerangka analisis Munro. Dalam hal ini analisis yang dilakukan mengacu pada temuan data di lapangan, yang berkaitan dengan bidang kerja Muslimat NU, potensi yang dimiliki Muslimat NU, identifikasi isu dan permasalahan gender serta kebijakan gender di Kabupaten Banyumas. Meskipun belum ada data yang lengkap dan detail yang berbasis pilah gender, namun demikian upaya menyangdingkan program kerja Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja dengan program kebijakan berperspektif gender berikut ini setidaknya dapat memberi gambaran bahwa Muslimat NU memiliki potensi kuat untuk bersama-sama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Dinas Perekonomian dan Koperasi, untuk mencapai hasil pembangunan gender yang lebih baik di Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 31. Kesesuaian Program Kerja Muslimat NU dan dengan Kebijakan Responsif Gender Kabupaten Banyumas dalam Kerangka Analisis Munro

No	Program kerja Muslimat NU Banyumas dan Sokaraja	Kebutuhan Gender Yang Dipenuhi		Kesesuaian Dengan Isu dan Kebijakan Pemda Berperspektif Gender		
		Kebutuhan Praktis*	Kebutuhan Strategis**	Isu Gender Kabupaten Banyumas	Program Pemda Yang Relevan Dengan Program Muslimat	Keterangan
1	Pendidikan			APK, APM, APS SD /MI perempuan lebih rendah; perempuan belum 100% melek huruf; dalam kategori umur 7-24 tahun partisipasi perempuan kategori tidak sekolah lagi lebih banyak daripada laki-laki;	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal, penguatan lembaga kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan aksara. • Peningkatan mutu tenaga pendidik PAUD, SD/SLB/MI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Muslimat NU mengelola PAUD dan TK sehingga memungkinkan bersinergi dengan Dindik dalam mutu tenaga pendidik • Bidang pendidikan Muslimat NU memungkinkan sumber dayanya mendukung program pendidikan non formal pemda
	Pembinaan Pendidikan PAC Karanglewas	V				
	Mengikuti sarasehan GP3M Banyumas Dinas Pendidikan	V				
	Workshop Kurikulum 2013 Dinas Pendidikan	V				
	Koordinasi Bantuan BOP dengan Dinas Pendidikan	V				
2	Sosial dan Hukum	V	Dalam jangka panjang, kolaborasi Muslimat NU dengan pemerintah daerah dalam	Kekerasan terhadap perempuan korban KDRT; kekerasan buruh migran; perempuan rawan sosial ekonomi; perempuan tuna susila; perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; • Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 	<ul style="list-style-type: none"> • Muslimat NU berpotensi berperan dalam sektor pemberdayaan, kesejahteraan sosial, penguatan
	Sosialisasi dan Pembinaan Laziznu Jatilawang	V				
	Melayani Kebutuhan Sembako Lebaran	V				
	Penilaian dan Evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	V				

	Sosialisasi Penyelesaian KDRT	V	menyelesaikan isu dan permasalahan gender di Kabupaten Banyumas berpotensi mendorong tercapainya kesetaraan gender, khususnya dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas	korban perdagangan; kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; • Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; • Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 	kelembagaan, perlindungan perempuan karena didukung sumber daya kuat dalam bidang sosial dan hukum, meskipun dalam bidang hukum belum menonjol
	Sosialisasi Penistaan Gender	V				
	Sosialisasi advokasi dan hukum oleh IAIN Purwokerto	V				
3	Ekonomi Ketenagakerjaan	V		Angka partisipasi kerja baik laki-laki maupun perempuan cenderung stagnan; Tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan juga cenderung stagnan; masalah pengangguran belum terselesaikan; persoalan	<ul style="list-style-type: none"> • Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. • Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. • Program peningkatan kesempatan kerja; • Program penciptaan usaha kecil menengah yang kondusif; • Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; • Program 	<ul style="list-style-type: none"> • Muslimat NU didukung oleh sumber daya kuat dalam bidang ekonomi dan koperasi untuk mendukung program Pemda dalam mengembangkan usaha kecil menengah, pengembangan koperasi, dan ketrampilan kewirausahaan lainnya. • Untuk bidang ketenagakerjaan
	Pelatihan Membuat Hantaran GOW Banyumas	V				
	Menghadiri Pelantikan Pengurus KTAN Banyumas Dinas Perindustrian dan Perdagangan	V				
	Pelatihan Menjahit Dinas Perindustrian dan Perdagangan	V				
	Pelatihan Menanam Holtikultura Dinas Perindustrian dan Perdagangan	V				
	Expo oleh 22 PAC Muslimat NU Banyumas	V				
	Pelatihan pembuatan hantaran dan bordir kerjasama dengan SKB Kalibagor.	V				

					<p>pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas koperasi 	<p>sebenarnya ada namun belum maksimal kinerjanya.</p>
4	Kesehatan	V	Rasio posyandu dan jumlah balita kurang berimbang; rasio ketersediaan rumah sakit dan penduduk kurang berimbang; gizi balita, KB, angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan dan bayi, peredaran obat terlarang, terus menjadi masalah kesehatan yang perlu diselesaikan meskipun sejauh ini cukup baik di tingkat Kabupaten Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> • Program upaya kesehatan masyarakat; • Program pengawasan obat dan makanan • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; • Program perbaikan gizi masyarakat; • Program peningkatan kesehatan lansia; • Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; • Program KB; • Program Promosi kesehatan bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Muslimat NU didukung sumber daya cukup kuat di bidang kesehatan dan KB; • Sumber daya dalam bidang kesehatan Muslimat berpotensi untuk bersinergi dengan Dinkes antara lain masalah gizi balita, lansia, ibu hamil dan melahirkan, KB, obat-obatan dan sebagainya; 	
	Mengikuti Pelatihan KKB Dinas Kesehatan	V				
	Mengikuti Kegiatan KB Gratis	V				
	Mengikuti Deklarasi Anti Narkoba kerjasama dengan BNN	V				
	Orientasi Program KKB bagi Toga dan Mitra Kerja BKKBN	V				
	Lomba Perolehan Akseptor KB Baru	V				
	Program Kesehatan Pelayanan IV A	V				
	Penyampaian Materi Kesehatan PAC Kebasen	V				
	Rapat Koordinasi CSO dan Jejaring Daerah Program Penanggulangan TB HIV dengan Aisyiah	V				
Kegiatan donor darah dan penyuluhan masalah kesehatan	V					

	tentang HIV dan narkoba.					
	Safari program Keluarga Berencana (KB) gratis.	V				
	Kegiatan sunatan massal.	V				

Sumber : *Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja Tahun 2016; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab, 2017; data primer dan data sekunder lainnya, diolah

Keterangan : * Kebutuhan praktis yaitu kebutuhan yang bersifat pemenuhan kebutuhan perempuan secara langsung
 ** Kebutuhan strategis yaitu kebutuhan yang bersifat jangka panjang untuk mengubah relasi laki-laki dan perempuan yang setara (pergeseran struktur patriarki yang mengutamakan laki-laki)

5.8. Luaran Yang Dicapai

1. Kajian tentang identifikasi potensi dan isu permasalahan yang dihadapi oleh Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja; serta merumuskan isu dan permasalahan gender yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Banyumas (Laporan Akhir yang telah diunggah)
2. Artikel ilmiah untuk publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, dengan artikel ilmiah berjudul “*The Identity of Muslimat NU Women Movement In Banyumas*” dalam Jurnal **PALASTREN STAIN** Kudus ((P-ISSN: 1979-6056; E-ISSN: 2477-5215) adalah jurnal Pusat Studi Gender (PSG), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. *Palastren telah terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Melalui SK Nomor: 36a/E/KPT/2016, tanggal 23 Mei 2016 dengan peringkat "B".*) - **Submit**
3. Artikel ilmiah dalam prosiding *International Conference on Social and Political Development* diselenggarakan oleh Universitas Sumatra Utara 4-5 Desember 2017, dengan artikel berjudul *Conceptualizing Muslimat NU Women in Banyumas: A Civil Society Framework* - **Accepted**
4. Artikel ilmiah untuk prosiding Seminar Nasional *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII* yang diselenggarakan LPPM Unsoed pada tanggal 17 – 18 November 2017 dengan judul artikel “Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2015” – **Selesai dilaksanakan**

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Menyusun proposal penelitian tahun kedua dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menyusun model hilirisasi kontribusi kelompok Muslimat NU terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan gender di tingkat daerah, berbasis kondisi di Kabupaten Banyumas, yang dapat menjadi referensi bagi keselarasan dan hilirisasi program kerja Muslimat NU dengan kebijakan pembangunan gender di daerah lain di seluruh Indonesia.
2. Menyusun strategi implementasi program kerja Muslimat NU yang memiliki hilir mendukung keberhasilan kebijakan pembangunan gender di daerah.
3. Menyusun publikasi dalam jurnal internasional, dengan artikel ilmiah mengenai *model hilirisasi program kerja kelompok perempuan dengan isu dan permasalahan gender yang menjadi fokus kebijakan pembangunan gender di daerah*, direncanakan untuk dimuat di jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus Pertanika Journal of Social Science and Humanities* Universiti Putra Malaysia.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang ada menunjukkan bahwa isu gender di Kabupaten Banyumas perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Data IPG dan IDG yang menunjukkan indikator kualitas SDM perempuan dan pemberdayaan perempuan berada pada indeks rata-rata angka regional dan nasional. Muslimat NU yang memiliki masa besar sudah selayaknya juga diberi akses untuk memahami permasalahan-permasalahan gender yang ada. Melalui acara workshop, wawasan mereka terhadap masalah-masalah gender dibuka dan “disadarkan”, sehingga pada gilirannya akan menjadi PR untuk program kerja Muslimat NU.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa, pertama, Muslimat NU adalah organisasi yang berlandaskan agama yang memfokuskan kegiatannya di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan dan misionaris. Kedua; Keberadaan Muslimat NU Banyumas didukung oleh identitas khas yang mewakili kekuatan gerakan perempuan yang berlandaskan agama. Identitas spesifik dicirikan oleh pengurusnya yang menjalankan tugas organisasinya berdasarkan prinsip sukarela dan tanpa pamrih. Anggota organisasi menjalankan tugas organisasinya tanpa mendapatkan gaji dan publikasi media. Melalui kinerja tersebut, mereka menanamkan semangat untuk mengembangkan organisasi menjadi kelompok mandiri. Kekompakan di antara anggota diperkuat oleh keyakinan bersama mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari misi untuk berjuang di jalan

'Allah'. Kekuatan identitas tertentu gerakan Muslimat NU menunjukkan pentingnya melibatkan organisasi ini dalam proyek pengembangan gender di tingkat lokal.

7.2. Saran

Adanya berbagai potensi yang melekat pada Muslimat NU Banyumas maupun Muslimat NU Sokaraja sebagai organisasi perempuan yang fokus pada masalah isu sosial keagamaan menunjukkan pentingnya melibatkan kedua ormas perempuan tersebut untuk mendukung pembangunan gender di Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini berbagai macam isu permasalahan gender masih dihadapi oleh Kabupaten Banyumas, sehingga penting bagi SKPD-SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas melibatkan Muslimat NU Banyumas dan Muslimat NU Sokaraja untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, Muthiah, 2004. *Civil Society and Political Change in Asia*, Stanford California: California University Press.
- BPS Kabupaten Banyumas, 2016. *Banyumas Dalam Angka 2016*, Purwokerto
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Handayani Trisakti, dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang UMM Press.
- Harrison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik* alih bahasa Tri Wibowo, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Harsono, Rebeka, 2006. Gerakan Perempuan : Antara Kepentingan Perempuan dan Politik Gender, dalam Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta : PSPK UGM dan Pustaka Pelajar, 2006.
- <http://www.banyumaskab.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2013. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta.
- Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas Tahun 2016*, Purwokerto : Pengurus Cabang Muslimat NU Banyumas.
- Makhasin, Luthfi, 2017. "Islamisasi dan Masyarakat Pasar : Sufisme dan Sejarah Sosial Kota Sokaraja," dalam <http://lafadl.worpress.com/2006/09/09/15/islamisasi-dan-masyarakat-pasar-sufisme-dan-sejarah-sosial-kota-sokaraja> diakses tgl 26 Juli 2017.
- Marwah, Sofa, 2012. *Representasi Politik Perempuan Banyumas : Antara Kultur dan Realitas Politik*, Disertasi Program S3 Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Newman, Lawrence, 1994. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approachs*, Boston: Allyn and Bacon.
- Pilcher, Jane & Whelehan, Imelda, 2004. *50 Key Concepts in Gender Studies*, London : Sage Publication.

- Punch, Keith, 2006. *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication.
- PP Muslimat NU, 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU.
- Relawati, Rahayu, 2011. “Penguatan Jaringan Usaha Melalui Wadah Organisasi Perempuan : Studi Kasus pada Usaha Milik Aisyiah,” dalam *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*, Bandung : CV Muara Indah, 2011.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018*, Banyumas : Pemkab, 2017.
- Rai, Shirin M, 2002. *Gender and the Political Economy of Development*, Cambridge : Polity Press.
- Santosa, Heri Teguh, Kabid Paud dan Dikmas Dinkas Kabupaten Banyumas, *Pengarutamaan Gender dalam Pendidikan*, Materi Workshop PSHP, 20 Mei 2017.
- Sistem Informasi Gender dan Anak Pemkab Banyumas 2013*, Banyumas : Pemkab Banyumas, 2013.
- Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte, 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Kalyanamitra : Jakarta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, 1990. *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Procedur and Techniques*. Beverly Hills, SA: Sage Publications.
- Wuryaningsih, Tri Ketua PPT PKBGA, *Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Kebijakan Pemkab Banyumas*, Materi Workshop PSHP, 20 Mei 2017.

LAMPIRAN 1

FOTO KEGIATAN



Pelaksanaan FGD dengan Muslimat NU Sukaraja



Pelaksanaan FGD dengan Muslimat NU Banyumas



Tema Workshop



Para Narasumber Workshop

LAMPIRAN 2
BUKTI *ACCEPTED*
MAKALAH KONFERENSI
INTERNASIONAL



ICOSOP 2017

2nd International Conference on Social and Political
Development

Grand Aston City Hall, 4-5 Desember 2017

Website: <http://icosop.usu.ac.id>

Email: icosop.contact@gmail.com

Medan, October 27, 2017

Letter of Acceptance

Dear Authors: Sofa Marwah, Soetji Lestari, Oktafiani Catur Pratiwi

We are pleased to inform you that your abstract (ABS-21, Oral Presentation), entitled:

"Conceptualizing Muslimat NU Women in Banyumas: A Civil Society Framework"

has been reviewed and accepted to be presented at ICOSOP 2017 conference to be held on 4-5 Desember 2017 in Medan, Indonesia.

Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines, visit our website for more information.

Thank You.

Best regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Heri Kusmanto", with several horizontal lines underneath.

Heri Kusmanto, Ph.D.
ICOSOP 2017 Chairperson

*Conceptualizing Muslimat NU Women in Banyumas: A Civil Society Framework**

Sofa Marwah

Department of Political Science
Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Indonesia
E-mail : sofamarwah75@gmail.com

Soetji Lestari

Department of Sociology
Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Indonesia
E-mail : soetjilestari123@gmail.com

Oktafiani Catur Pratiwi

Department of Political Science
Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Indonesia
E-mail : oktafiani.cp@gmail.com

Abstract— This paper attempts to conceptualize the existence of women organization of Muslimat NU (Nahdlatul Ulama) in Banyumas regency in the frame of civil society. It is significant to conduct a study since Muslimat NU in this regency is supported by two district organizing boards, adequate human resources, culturally and socially strong bond, consistently striving for religious and social improvement. This is a qualitative research by selecting Chairperson and its boards of Muslimat NU of Banyumas and Sokaraja along with the lower level boards. The data were gathered through interview, FGD (Focus Group Discussion), observation and library research. The result shows that Muslimat NU Women of Banyumas separates from political and economic power; they place themselves as lifeworld based on its basic principle of spreading virtues for religion, family and community. Even so, placing Muslimat NU women as a power of civil society which enables to act collectively is not a simple issue. This cannot be separated from the widening of social contract to sexual contract apparently seen in Muslimat NU struggle. To some extents, it still takes account of male dominance in decision making. Furthermore, the significant contribution of Muslimat NU Banyumas has not urged local government on particular issue. The consistency of their struggle for social and religious improvement concurrently seems to keep Muslimat NU at a distance from political knowledge and experience.

Keywords— civil society; lifeworld, Muslimat NU; women groups

I. INTRODUCTION

The dynamics of civil society in Indonesia will not be separated from the dynamics of Nahdlatul Ulama (NU) as the largest Islamic mass organization in this republic. NU was established as a religious organization relying on one of the four *mahdzabs* as a framework for understanding the Qur'an

and Hadith. Established on January 31, 1926 as a non-political mass organization, NU turned into a political organization in 1952 and became one of the participants of the first Indonesian Election in 1955. At that time, NU Party seized significant votes by 18.4% occupying the 3rd position which deserved 45 seats in parliament.¹ Since the New Order came to power in 1966 which implemented repressive policies, this party joined the United Development Party (PPP). In the implementation of the 27th Congress in Situbondo 1983, the Party decided to quit the party and returned to a non-political mass organization or commonly referred back to Khittah 1926.

Through long lasted dynamics, NU still shows its formal consistency by proclaiming themselves as a non-political party. Past internal frictions including conflict among NU elites, New Order interference, jeopardizing Ulama for different political perspective “could be well-settled”. By doing so, NU confirms that it is not a political party, rather, the largest Islamic organization in Indonesia. Even, they did not use the opportunity the reform era gave which widely opens NU for political party. NU merely facilitated the establishment of the National Awakening Party (PKB), an open yet Muslim-dominated political party.

The reading of the NU dynamics as a religious social organization changing to political party and finally returning to Khittah 1926 would not be comprehensive unless discussing the existence of Muslimat NU and Fatayat NU. Both women organizations hold exceptional mass strength comprised of the *Ahlu Sunnah wal jamaah* and consistently follow the NU struggle as a religious social organization. Membership of Muslimat NU consists of Indonesian women aged 40 years old and over or already married while the Fatayat NU consists of younger women, less than 40 years old. Several studies on NU women's organizations of NU include Monika Arnez who reviewed the women empowerment strategies conducted by Fatayat NU along with its resistance to paternal organization. Since the late 1990s, Fatayat NU has declared women empowerment as one of the main objectives of the organization based on gender

interpretation in accordance with Islamic sources as the basis of legitimacy.² Besides, Hamidah studied the dynamics of the Muslim women's movement in Indonesia, especially the Muslimat-Fatayat NU during the period 1938-2013. She found that the Indonesian Islamic women movements exist not only as the *tahrirul mar'ah* movement of but also the influence of Muslim women's movement in the West.³ Similar study conducted by Linda Dwi Eriyanti identified the feminist perspective in NU non-mainstream women's political thought marked by radical feminist ideas.⁴ Meanwhile, Lailatul Syukriyah examined the birth and historical development of Muslimat NU during 1946-1955 and Muslimat NU support to NU Party in the 1955 General Election.⁵ Meanwhile, a specific study of gender discourse in NU women's movement was conducted by Dian Eka Rahmawati concerning the involvement of NU gender activists that shows feminism ideas, the strengthening of democratic issues in Islam, and the effects of civil society development introduced by NGOs or new social movements.⁶

Furthermore, this study would like to fill the gap among the aforementioned studies that did not portray Muslimat NU as a Muslim women group of potentially civil society strength. The selection of Muslimat NU as the locus of the study takes account that, like NU and Fatayat NU, Muslimat NU has quantitatively extraordinary women resources and is consistent in struggling for the women life quality in terms of Islamic da'wah, education, health, social and so on. Therefore, this paper will conceptualize the women struggle potentials in Muslimat NU as civil society forces by taking Muslimat NU in Banyumas Regency as the locus. Muslimat NU in Banyumas Regency is unique because it is supported by the existence of two branches within regency namely the branch of Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja. Accordingly, to mention the two branches, the author uses the term Muslimat NU Banyumas which includes Muslimat NU of Banyumas and Muslimat NU of Sokaraja. Then, this paper is divided into five parts; the first section contains an introduction of the importance of studying Muslimat NU in Banyumas within the framework of civil society; second part discusses research method; the third part tells the historical social dynamics of Muslimat NU in Banyumas; the fourth section explains the existence of Muslimat NU in Banyumas as a lifeworld space between political and economic power; the fifth section explicates the idea of the Muslimat NU in Banyumas as the power of civil society; and the sixth part is the closing remarks.

II. RESEARCH METHOD

This is a qualitative research which attempts to construct a detailed and comprehensive social phenomenon. This research aims to conceptualize Muslimat NU potentials in Banyumas in civil society framework. To do so, data collection were conducted by interview, FGD, observation and library research for complete data and information.⁷ Then, informants were purposively selected in accordance with the required criteria in this research⁸ which involved the chairperson and organizing board of Muslimat NU Banyumas,

chairperson and organizing board of Muslimat NU Sokaraja, along with the boards of their lower levels. Data analysis were concurrently conducted which means that both data analysis and treatment were carried out during data collection while analysis technique started from data clarification, theoretical abstraction upon the gathered data then formulated basic statements and finally drawing conclusion.⁹

III. MUSLIMAT NU IN BANYUMAS : SOCIAL AND HISTORICAL DYNAMIC

The history of Muslimat NU Sokaraja and Muslimat NU Banyumas cannot be separated from the early days of the national Muslimat NU establishment. NU women of Sokaraja led by Sulimah were involved in the 14th NU Conference in Magelang in 1939. Besides Sokaraja, there were *nahdliyin* women coming from Muntilan, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, and Purworejo. They attended the convention and held a preparatory meeting for the establishment of Muslimat organization. Each delegate expressed their views on the importance of women contribution to family and society. Sulimah is one of the leaders who delivered a speech on the importance of the mother's role in child education which consequently education was also important for mother.

The further preparation for Muslimat establishment the establishment was achieved during the implementation of the 15th NU Conference in Surabaya in 1940. During the convention, the *nahdliyin* mothers held meetings on several general views such as; 1) Approval of the Muslimat presence by the convention; 2) Muslimat Articles of Association; 3) Management Arrangement; 4) The curriculum for female madrasah education; and 5) Monthly publication plan. Muslimat at that time was led by Hindun from Surabaya.

By the NU's 16th Congress in Purwokerto in 1946, Muslimat NU was officially established through acclamation. At that time the head of the Muslimat was Chadijah Dahlan. At the 17th NU Congress in Madiun in 1948, there were commissioners of Muslimat committees in various regions, namely Madiun, Surabaya, Banyumas (Sokaraja), Kedu, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya), Jember (Besuki), Malang and Tapanuli. In this context, Banyumas commissioner was chaired by Sulimah from Sokaraja.¹⁰

Due to the involvement of Muslimat Sokaraja in pioneering the establishment of national Muslimat since 1939 until present, Banyumas has 2 (two) branches of Muslimat NU in district level that is Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja. There is a presumption that the embryo of the Muslimat NU formation actually came from Sokaraja, thus, they persisted to stand as Muslimat NU Sokaraja. As a matter of fact, in one district, there is only one branch of Muslimat NU.

When the New Order came to power in the 1990s, there was a law requiring that there was only one branch of the organization in one district. As a result, Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja merged. However on April 12, 2015, Muslimat NU Sokaraja separates from Muslimat NU Banyumas, after joining for 12 years. It was also triggered by the regressive condition of Muslimat NU

Sokaraja as a change of leadership from Nur Kamilah to Laely Mansyur. The existence of two branches in one district is possible in the articles of association of National Muslimat NU during the Reform Era. As the pioneer organization prior to Muslimat NU Banyumas, Muslimat NU Sokaraja claimed that they entitled to continue their predecessors struggle by remaining a part from Muslimat NU Banyumas.

Viewed from the two branches existence, the condition can show the prospective strength. Nevertheless, there are potential problems since Muslimat NU Sokaraja feels that three branches are reluctant to rejoin. Of the 27 branches in Banyumas, only six joined Muslimat NU Sokaraja involving Kembaran, Sokaraja, Kali Bagor, Banyumas, Somagede, and Tambak while the rest joined Muslimat NU Banyumas. In addition, there are several branches which are currently joining Muslimat NU Sokaraja want to join the Muslimat NU Banyumas.

IV. IDENTIFICATION OF MUSLIMAT NU STRENGTH IN BANYUMAS REGENCY: LIFEWORLD BETWEEN POLITIC AND ECONOMIC POWER

This sub-chapter is intended to identify the strength of Muslimat NU in Banyumas as a space of social life, in which the individual's actions are far from seeking political power and economic profit. For a clearer illustration, this paper employs Habermas' social life scheme. Social life according to Habermas consists of two dimensions, namely system and lifeworld. System is an area of life integrated by a particular object, covering political and economic areas. Objects that drive action in the political area are power while in the economic area is money. Beyond the system is lifeworld, the area of life where the people actions are not driven by desire to accumulate power or money; rather, by the basic values that arise in social life such as justice, truth, and goodness.¹¹

Referring to the lifeworld area above, what Muslimat NU women in Banyumas dedicate leads to a real form of lifeworld. In this regard, the basic value they undertake is to promote women lives for the benefit of religion, family, society and nation. They are Muslimat NU women organizations based on high awareness or passion to develop this organization and benefit others. These potential resources are supported by socio-cultural bond as powerful *nahdliyin*. They were born and raised as a *nadliyin* which encourage them to join Muslimat NU from young to old age. Even to follow the Muslimat activities, they often travel far, especially for members and administrators of remote areas, by motorcycling or even using pickup or rent village transportation. Possessing strong social-cultural ties, they do not feel to necessarily have membership cards. The most important thing to them is to be a member of Muslimat NU instead of membership card. The social-cultural ties as members of the organization are much stronger than labeling themselves in a piece of card.

Nevertheless, despite abundant human resources support, not all administrators have equal capability. This is recognized as a constraint the organization development. Yet, the primary thing is that they carry out the duties and functions

with full sincerity and responsibility. Even they sometimes do not know exactly the task of each field but they are excited to carrying out their duties for it is a mandate. They are women portraits who sincerely serve the organization, helpful by expecting nothing in returns/salary. In line with this, the study of Miftahul Huda revealed that Muslimat NU women in contributing to education, health, and other religious social fields rely on a strong spirit of motherhood.¹² They are also a group of women who are very diligent in following the activities, diligent to record each meeting result, implementing each leader's instruction, record the training result and other activities. Particularly at the branch level of Muslimat NU Banyumas, they already have an annual work program and annual activity report.

In terms of networking, Muslimat NU women are already incorporated in the Joint Women's Organization (GOW), especially for Muslimat NU Banyumas. At least the network enables this organization contribution to women's progress without intending to push them into the power structure. In addition, other networks are more commonly formed under NU including the NU Student Association (IPNU), NU Women's Student Association (IPPNU), Anshor, Fatayat NU as well as the traditional network such as *pesantren*, *kyai* and his wife.

In terms of funding, Muslimat NU is an independent organization without sponsorship in their activities. Fundraising is done based on the value of sincerity in various mechanisms. This is reflected in how Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja raise funds from membership fees locally known as *kalengan* or *pithian*. The funding starts from the district level to the village level. *Kalengan* or *pithian* systems are performed during routine weekly, monthly, or annual religious gatherings. The fee is voluntary ranging from Rp 2000 but due to large participants in every gathering, it enables them to collect hundreds of thousands to millions rupiah. The collected funds is used to finance Muslimat activities at each level, or also deposited from lower to higher branch. In fact, they can often donate programs outside the Muslimat activities, such as supporting a mosque building, NU Building, and so on

Other fundraisings are performed including selling various Muslimat NU attributes such as calendars, Muslimat uniforms, hijab, scarf, groceries during either internal or external exhibitions or bazaars. At the sub district level, the organization saving can reach 25 million at least. Even, Jatilawang branch can buy rice from the organization's cash, while Patikraja branch can build its own Muslimat building. For the branch level, the organization's cash is certainly larger obtaining from prescribed fees and voluntary contributions. The official fee requires every member to pay monthly fee of Rp 1,000. Besides *kalengan* method, Muslimat NU Banyumas cash also derives from PAUD and Diponegoro kindergarten management.

In contrast to NU Muslimat in rural areas, the sub district branch in urban areas experience different situations. This is because the number of *jama'ah* (participants) who attend religious gathering or other activities is relatively

limited. Unlike in rural areas involving thousands of attendees, Muslimat NU branch activities in urban areas was only attended by the chairperson and secretary of the branch. Fortunately, urban people contribute more dues, usually Rp 10,000 for each. However, the total funds are relatively limited resulting in the limited branch inventory. There are only four branches of Muslimat NU Banyumas in urban areas, namely Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan and Purwokerto Utara.

NU Muslimat funding is also supported by *nahdliyin waqf*. The *waqf* is more commonly received in the form of land or commonly called as conventional *waqf*. Of the 23 Kindergarten Diponegoro owned by Muslimat NU Banyumas, almost all the land is *waqf* despite landowner's name behalf.

The above description shows the high commitment of each board and members to raise Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja in their own way by donating money, ideas, energy, food, goods, land, and so on. All is done based on value of sincerity for the advancement of women's lives which also contribute to the family, religion, society and nation. In other words, in the lifeworld area, according to Habermas, a public sphere is created wherein its citizens - in this case Muslimat NU women groups-can express these values independently through the established social institutions, the civil society. It means that it is in the lifeworld space the Muslimat NU women group expresses its spirit to work and contribute to others, to family, religion, society and nation.

V. DISCLOSING THE CAPACITY OF MUSLIMAT NU BANYUMAS IN THE FORMULATION OF CIVIL SOCIETY

Referring to Muthiah Alagappa's explanation, civil society is a separate space for organization, a reflective form of communication and discourse, the control of individuals or groups acting collectively and disseminating civilian apparatus to influence the state and its policies without intending to take state power indicating by non-profit driven activities rather than profit-driven acts.¹³ Observing the explanation, there are two elements; First, internally civil society characterizes separate organizations but becomes a reflective communication and discourse which enables them to act collectively; Second, the ability to influence state power without taking over the power itself.

The first element of civil society would disclose organizationally NU Muslimat NU in Banyumas. As the largest women's mass organization in Banyumas, Muslimat NU is supported by abundant resources. In particular, members of Muslimat NU are *jami'yah* (formal membership) and *jama'ah* (non-formal or cultural-based membership as *nahdliyin*), thus, the bond is not only by the organization label but socio-culturally deep-rooted bond. They have resources from the district level to the village level, even supported by two administrators namely Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja. Not only by the quantitatively adequate number of resources, but also do they move from various levels to fight for fund independence to improve the quality of women lives. They also potentially express their

ideas collectively due to strong social-cultural connections. They act to promote women lives and work voluntarily even without expecting returns.

Nonetheless, it should be noted that placing women groups as elements of civil society is not simple issue. The existing patriarchal law might contribute to "difficulties" in placing women groups as civil society forces. Referring to Carole Pateman's notion on sexual contract, it states that classical social contract theory contains a pressure dimension namely patriarchy. Men have freedom and become heads of families who can take a leading role in social contracts.¹⁴ In this context, the involvement of women in Muslimat NU activities, either Muslimat NU Banyumas or Sokaraja would be none unless being supported by their husbands or relatives. Their activities in organization are only possible with husband's permission. Otherwise, they are unlikely to fully engage in such social-religious activities. This condition is affirmed by the two branch leaders of Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja, Laely Manshur and Muslimah.

Viewing patriarchy from Pateman's perspective, the situation is a portrait of how the sexual contract either successfully or not touches Muslimat NU activities. They find it difficult to be integrated as a full civil society force. Perhaps this women organization is not ordinary society member; rather, they are a group of people who have space to work, apart from political power and economic profit. Yet, at some point, patriarchal law still prevails behind their actions in raising Muslimat NU and social contribution.

Patriarchy also dominates in Muslimat NU program, in terms that they have to wait for *Kyai's* (male) to for instance, build a construction. *Kyai's* blessing becomes the last reference to be obeyed, whether a program is feasible to be implemented or not. Even in the context of joining and separating the two Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja, it was also executed after gaining blessing from *Kyai*. In this regard, Musdah Mulia once stated that Gus Dur was a leading figure campaigning gender equality among *kyais* and *pesantrens*.¹⁵ Consequently, patriarchal law in NU body faded.

However, in the context of this study, the *kyai* (male) figure is still important for Muslimat NU Banyumas in decision making. In Pateman's view, the development of contemporary social contracts, such as marriage social contracts, employment, representation, and even social contracts in prostitution tend to support male freedom and women subordination. For this argument, Pateman claimed that in practice civil society cannot simply become universally applicable to women.

Subordination of patriarchy towards women becomes a barrier to the establishment of women groups as a civil society force. Needless to say then, the idea of putting Muslimat NU women as a civil society element necessarily takes account of the context, space and time. This means that in a certain space and time, they may be part of the civil society's strength, but in other situations it is necessary to see the consistency as the civil society.

Second element of civil society explores the ability of Muslimat NU in Banyumas to affect state power without taking over the power. In this case, the existence of Muslimat NU in Banyumas, both Muslimat NU Banyumas and Muslimat NU Sokaraja have no capacity to influence local government policy. In other words, they do not have an orientation to urge particular issue on the local government. As a NU underbow women organization, the existence of Muslimat NU consistently follows NU's policy to uphold Khittah 1926 and Lombok 1997 as non-political mass organizations.¹⁶ Areas of organization include; a) organization and membership; b) education and regeneration; c) social, population and environment; d) health; e) da'wah; f) economic, cooperative and agribusiness; g) labor; h) law and advocacy. Successes in various fields are mainly shown by Muslimat NU Banyumas under Laely Manshur's leadership. Till present, nevertheless, this organization has not been involved in crucial issues, such as local regulations that are urgently to be drafted by the local administration. Within the framework of civil society formulation, their work areas at the end are not in contact with efforts to urge important issues on power. In particular, they are not yet present to influence local government policy.

Muslimat NU has consistently shown itself as a non-political women organization. It seems common for political parties to approach this organization especially in the political moments such as legislative elections, gubernatorial elections, and regent elections. In this point, the administrators of Muslimat NU in Banyumas are aware of their low capacity to influence policy through the executive or legislative body. Thus, the idea of this paper is to place the potentials of Muslimat NU Banyumas and Sokaraja if they are able to influence local government policy, in this context, cannot be fulfilled.

Even so, it is still possible to influence local government policy directly through Muslimat NU cadres in legislative body either DPR or DPRD. The cadres of both organizations are allowed to enter politics even though they do not carry Muslimat NU names formally. Still, there is hope that those cadres can bring prosperity to the organization even though they are not allowed to bring formal Muslimat NU organizations.

Another proof of how this NU women organization is still far from regional power map is when Laely Manshur ran for Vice Banyumas paired with Singgih Wiranto in Banyumas Local Election in 2008. She was defeated in the territory in which she led the branch of Muslimat NU Banyumas at the third term of office. Even she and her partner only occupied the third position of four couples who participated at that time. This is ironic regarding her capacity as chairperson of Muslimat NU Banyumas for three periods. It is true that the politics is very competitive and intense, but when it occurs, it is obvious the distance of Muslimat NU Banyumas with power. It seems they are lack of experience to involve in political sphere. Historical records indicating that Muslimat NU had assisted the success of NU Party in the 1955 General Election and appealed to the NU central board for prioritizing

the Muslimat members to be nominated as constituent candidates¹⁷ left historical records only for Muslimat NU. Muslimat NU political experience has long disappeared. To conceptualize the existence of Muslimat NU Banyumas particularly Sokaraja to influence power at regional level as one element of civil society remains far from reality.

VI. CLOSING REMARKS

As an organization, the Muslimat NU women group owns abundant resources, strong social-cultural bonding and consistent to support the organization as well as contribute to society on the basis of sincerity and responsibility. In this regard, the struggle for women's life progress, contribution to religion, society, and nation is a form of their consistency which always keeps at a distance from political power and economic profit. Their activities show real lifeworld area, away from approaching political power and profit-oriented activities. However, to conceptualize whether these reflect the power of civil society describing a separate organization and able to act collectively, at some point, is still in conflict with the patriarchal law including the importance of the husband's permission to join this organization or the importance of *kyai* (male) in certain decision making. In fact, initiating civil society means placing a group which is able to affect the state power. In practice, the consistency of struggle in social-religious field has never reached the level to urge crucial and strategic issues to the local government. Instead, the consistency of Muslimat NU in the struggle for the social-religious field keeps them at distance from learning politics or gain political experience. As a result, they tend to be only used by certain actors before the political moments. It proves that political education is actually important to them although they do not involve practical politics organizationally.

ACKNOWLEDGMENT

Special gratitude is expressed to Research of Social, Humanities and Education 2017, funded by the Ministry of Research Technology and Higher Education.

REFERENCES

- Alagappa, M., 2004. *Civil Society and Political Change in Asia*, Stanford California: California University Press.
- Arnez, M., 2010. "Empowering women through Islam : Fatayat NU between tradition and change" , *Journal of Islamic Studies*, Vol. 21 No.1 , pp. 59-88.
- Eriyanti, L.D., 2016. "*Pemikiran politik perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perspektif feminisme: penelusuran pemikiran mainstream dan non-mainstream*", *JSP Jurnal Sosial dan Politik UGM*, Vol. 20 No.1 July, pp. 69-83.
- Feith, H., 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : Gramedia.
- Hamidah, 2016. "Indonesia Islamic movement of women: a study of Fatayat Muslimat NU (1938-2013)", *Jurnal Miqot*, Vol. XL No. 1 January-June, pp. 162-174.

- Harrison, L., 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- M. Huda, M., 2015. *Motherhood spirit untuk kedermawanan sosial di Muslimat NU Ponorogo*, Jurnal Kodifikasi, Vol. No.1 2015, p. 37-60.
- Mulia, M., 2015. “Gus Dur: pioner gerakan feminisme”, in A. Nadjie, *Gus Dur di Mata Perempuan*, Yogyakarta: PP Fatayat and Gading.
- Muslimat NU, PP. 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU.
- Punch, K., 2006. *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication.
- Rahmawati, D.E, 2015. “Gender discourse and women movement in NU”, *Journal of Government and Politics UMY*, Vol.6 No. 2 August, pp. 229-247.
- Silbergh, D.M., 2001. *Doing Dissertations in Politics: A Student Guide*, London: Routledge.
- Sullivan, B., 1998. “Carole Pateman: participatory democracy and feminism”, in Carter, A. and Stokes, G., *Liberal Democracy and Its Critics*, Cambridge: Polity Press.
- Syukriyah, L., 2016. “*Muslimat NU di Indonesia (1946-1955)*”, *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah Unesa*, Vol. 4, No. 3, October, pp. 609-620.
- White, S.K., 2002. “Skeptics at the celebration: civil society and the early Frankfurt School”, in Rosenblum, N.L and Post, R.C., *Civil Society and Government*, Princeton: Princenton University Press.
-
- (1) H. Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1999.
- (2) M. Arnez, “Empowering women through Islam : Fatayat NU between tradition and change”, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 21 No.1, 2010, pp. 59-88.
- (3) Hamidah, “Indonesia Islamic movement of women: a study of Fatayat Muslimat NU (1938-2013)”, *Jurnal Miqot*, Vol. XL No. 1, January-June 2016, pp.162-174.
- (4) L.D. Eriyanti, “*Pemikiran politik perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perspektif feminisme: penelusuran pemikiran mainstream dan non-mainstream*”, *JSP Jurnal Sosial dan Politik UGM*, Vol. 20 No.1, July 2016, pp. 69-83.
- (5) L. Syukriyah, “*Muslimat NU di Indonesia (1946-1955)*”, *Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah Unesa*, Vol. 4 No. 3, October 2016, pp. 609-620.
- (6) D.E. Rahmawati, “Gender discourse and women movement in NU”, *Journal of Government and Politics UMY*, Vol.6 No. 2, August 2015, pp. 229-247.
- (7) K. Punch, *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication, 2006, p.52.
- (8) L. Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007, p.26.
- (9) D.M. Silbergh, *Doing Dissertations in Politics: A Student Guide*, London : Routledge, 2001, p.173.
- (10) PP Muslimat NU, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta : PP Muslimat NU, 1979.
- (11) S.K.White, “Skeptics at the celebration : civil society and the early Frankfurt School”, in N.L. Rosenblum and R.C. Post, *Civil Society and Government*, Princeton : Princenton University Press, 2002, p. 146.
- (12) M. Huda, *Motherhood spirit untuk kedermawanan sosial di Muslimat NU Ponorogo*, Jurnal Kodifikasi, Vol. No.1 2015, p. 37.
- (13) M. Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia*, Stanford California: California University Press, 2004, p.9.
- (14) B. Sullivan, “Carole Pateman : participatory democracy and feminism”, in A. Carter and G. Stokes, *Liberal Democracy and Its Critics*, Cambridge: Polity Press, 1998, p.182.
- (15) M. Mulia, “Gus Dur: pioner gerakan feminisme”, in A. Nadjie, *Gus Dur di Mata Perempuan*, Yogyakarta: PP Fatayat and Gading, 2015, pp. 69-70.
- (16) Hamidah, op.cit., p.162.
- (17) L. Syukriyah, op.cit., p. 619.

LAMPIRAN 3
BUKTI SUBMIT
JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI



PALASTREN

Jurnal Studi Gender
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
visit us : <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/palastrren>
email: ipalastrren@palastrren.ac.id

- HOME
- ABOUT
- USER HOME
- SEARCH
- CURRENT
- ARCHIVES
- ANNOUNCEMENTS
- INDEXING

Author Guidelines

Editorial Team

Focus and Scope

Publication Ethic

Reviewer

Current

Archives

Announcements



ID	6361
UG	696
NY	84
RU	26
JI	23

Home > User > Author > Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	NIK-DO	SEK	AUTHORS	TITLE	STATUS
2737	10-26	ART.	pratiwi	THE IDENTITY OF MUSLIMAT NU WOMEN MOVEMENT ON THE GENDER..	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

click here to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

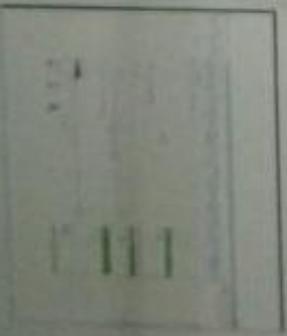
ALL NEW PUBLISHED APPROVED

DATE	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
AKSES	NOTE	URL		

USER

You are logged in as...
okta1979

- My Journals
- Journal Manager
- My Profile
- Log Out



But how journal

AUTHOR

ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

THE IDENTITY OF MUSLIMAT NU WOMEN MOVEMENT IN BANYUMAS

Oktafiani Catur Pratiwi; Soetji Lestari; Sofa Marwah
Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto-Central
Java, Indonesia
oktafiani.cp@gmail.com; soetjilestari123@gmail.com; sofamarwah75@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to describe specific identities of Muslimat NU Woman Movement in Banyumas as the largest organisation based on religion in Banyumas District, Central Java Province, Indonesia. The focus of this research is Muslimat NU in Banyumas because of several reasons. The first reason is Muslimat NU in Banyumas has two management structures maintained until now at the district level because of its history. Although there are two managements, Muslimat NU Banyumas does not have any conflict related to the duality. Secondly, institutionally, the Muslimat NU in Banyumas has local wisdoms to consolidate and maintain its sustainability. This research is a qualitative research. The data were collected using in-depth interview, FGD, observation and documentation methods. The Muslimat NU's board members at the district and sub-district levels were the main informants in this research. The result of research shows that Muslimat NU is the organisation based on religion that focuses on activities, such as, education, healthcare, social, economics, employment, environment and missionary. Moreover, the existence of Muslimat NU Banyumas is supported by specific identities which represent the power of woman movement based on religion. The specific identities are characterized by its board who manages their organizational duties based on the principles of voluntary and selflessness. The board members carry their organizational duties without earning salary and getting media publication. They inculcate the spirit to develop the organization into a self-supporting group. The cohesiveness among the board members is strengthened by their conviction that what they are doing is a part of the mission to struggle in the way of 'Allah'. Therefore, the specific identities of Muslimat NU movement show the importance to involve this organization in gender development programs at local level.

Keywords : local identity, woman movement, Muslimat NU, religious

INTRODUCTION

Women's roles in the society have been changing because of the progress of the society. Now, women's roles are not only in domestic matters but also in public ones. Nonetheless, the society still believes that women are 'the second sex' whose main role is in the domestic sphere, while men are in public sphere as the main bread-winner of

the family. This is the result of patriarchy culture, and it is a form of oppression to women.

Hence, patriarchy culture limits women's movement. Its values make women hard to be civil society powers. Moreover, patriarchy has grown and developed as the main perspective to explain why women are left behind in all over the world (Pilcher, 2004). Patriarchy has also become a universal value and succeeded to be the front-runner in seeing women's oppression by men. From the most private area, patriarchy has infiltrated not only the society but also the country. Generally, patriarchy's values exist in almost every social, economy, law, politics, and culture institution. However, there are some moments proving women's existences as the part of civil society elements. The movements show that women are capable of doing something not for the sake of politics or economy, but for justice and equality in democracy. Therefore, the movements prove that women's powers are able to earn justice, truth, kindness for all group, both for women and men.

Furthermore, patriarchy also makes women's interests are not accommodated well since the decision which concern on women's interests are decided by men. Therefore, many development programs often cause women to become targets of inequitable gender development. However, the efforts to change masculine point of view, especially for stakeholders, cannot be done since there is no ultimate intervention through policies. Sadly, the changes through policies with sensitive gender issue cannot be done when stakeholders have zero understanding about gender. Members of society need to fight to articulate interests; hence, women's concern can be accommodated by government. Accordingly, the fight to change the point of view must be done through women's movement.

Women's organizations as a part of women's movement, especially in Indonesia, provide significant roles. The organizations do not only fight for women's right and interest, but also the existence of these women's organizations. The fight is essential as the organizations take a part to solve social problems. It happens as the problems are women's problems, and women's issues are social ones.

One of women's organizations which focuses on social issues is Muslimat NU. Muslimat NU is a widely independent women's organization. Thus, the existence of Muslimat NU has already been known extensively. They have a huge number of

members with *nahdliyin* background. There is a hierarchy in this organization started from central management to region management. The relationship among members of Muslimat NU is also so deep; hence, it supports strategic positions for Muslimat NU in politics, economics, and social. With a huge number of the members, the organization holds a crucial role because it can support the implementation of policies with gender perspective and also become gender focal point in society. Hopefully, Muslimat NU members are capable of taking roles substantively to support gender organization programs.

Consequently, Muslimat NU as one of women's movements, especially in Banyumas, is very interesting to be discussed as it manages to overcome development issues, especially issues related to women. Moreover, the characteristic of voluntarism done by the members and administrators of Muslimat NU consolidate more the movement to reach the goal. Hence, this research will elaborate identities that are specifically owned by Muslimat NU especially Muslimat NU in Banyumas district.

METHOD

This research is a qualitative research. The data were collected using in-depth interview with Muslimat NU's board members in Sokaraja and Banyumas, FGD which involved Muslimat NU's members at distric level and sub-district level, observation, and documentation methods. This research is conducted in Banyumas District because the district has a unique characteristic which is having two branches of Muslimat NU, namely, Muslimat NU in Sokaraja and Banyumas.

RESULT AND DISCUSSION

A Brief Story of Muslimat NU Banyumas

The development of Muslimat NU in Banyumas District cannot be separated from the development of Muslimat NU in national level. Muslimat NU in national level was established when the 16th Muktamar NU was organized in Purwokerto on March 26-29th, 1946. On March 29th, 1946, congress officially agreed that Muslimat NU was a part of NU (PP Muslimat NU, 1979). In national level, Muslimat NU was founded by Chasanah Mansyur, Siti Syarah, Djuaisih, Hindun and others.

Then, because of 17th Mukatamar NU in Madiun in 1948, it was decided that it was necessary to create several Muslimat offices in various areas. One of the areas is in Banyumas (Sokaraja), and the others are in Madiun, Surabaya, Kedu, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya), Jember (Besuki), Malang, and Tapanuli. Muslimat Office in Banyumas, that time was led by Sulimah from Sokaraja.

In the era before Indonesian independence, most of Muslimat activities were in line with the spirit to reach and uphold Indonesia's freedom through Hizbullah, Sabililah, line of Mujahidin and others. The conducted activities are serving public kitchen and health, providing cloths and many more. After 1954, Muslimat conducted the 20th Mukatamar NU in Surabaya autonomously. Briefly, the establishment of Muslimat NU Sokaraja cannot be separated with the beginning of National Muslimat NU. Besides, on the 14th Mukatamar NU in Magelang in 1939, Sulimah (the head of Sokaraja Muslimat) was one of the figures who delivered speech on the importance of mothers' role for children's education; therefore, knowledge and education for mothers are very essential to be improved.

Banyumas District has two branches of Muslimat NU, for example, Muslimat NU in Banyumas and Sokaraja. Sokaraja earns specialty to be a branch because of historical factor as the area was an area which initiated to form Muslimat NU (FGD, 2017). Since 1930, Sokaraja has been positioned as NU permanent consultant that oversees the work area like Banyumas, Yogyakarta and Kedu.

Furthermore, Muslimat NU has strategy to reach the organization goal through vision and mission. The vision of Muslimat NU is to realize the prosperity of people with the spirit of Islam *Ahlusunnah wal Jamaah* in Indonesia (NKRI). Meanwhile, the mission of Muslimat NU is to raise awareness for Indonesian people, especially women, to acknowledge religion, community, nation and state; to make Indonesian people, especially women, be qualified, independent and cautious to Allah SWT; to make Indonesian people, especially women, aware of duties and rights according to Islamic teachings; and to implement the purpose of Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU).

The Identity of Muslimat NU Movement in Banyumas

Differentiating one organization with other organizations is going to be easier when they have identity as an earmark. Social identity according to Ellemers (1993) is

in-group identification functioned as the source of conflicts between groups. Besides, social identity is used to refer self-concept which emerges from related social category.

Then, Burke & Stets (1998) provide definition of social identity as self-categorization in groups, focusing on meaning to be members of social category. This definition emphasizes on group's identification, and focuses more on cognitive result, such as, ethnocentrism or group's cohesiveness. Tajfel (in Taylor, Peplau & Sears, 2009) gives definition on social identity as a part of self-concept which comes from one's membership to a social group (or social groups) and values, and emotional signification that are very close to the membership.

Moreover, Hogg & Vaughan (2002) stated that social identity is associated with group's behaviors which have general characteristics like ethnocentrism, in-group favoritism, intergroup differentiation, conformity to in group norms, and group stereotype. Thus, identity gives different color to a social movement, especially women's movement. Women's movement is a part of social movement known as movement done by a group of people collectively to support or oppose the existence of values or certain norms; thus, the process of social movement centers on possessing intellectuality by a person or a group (Kurniawan, dkk, 2012).

According to Hogg and Vaughan (2002), the identity of Muslimat NU movement is recognized through these general characteristics. The First is ethnocentrism. Ethnocentrism is individual characteristic which believe that his or her group is superior. Therefore, it creates tendency to judge in-group is morally better and more valuable than out-groups. One of Muslimat NU characteristics is having high number of members. In Banyumas District, Sokaraja, the number of Muslimat NU recorded in the data base of Muslimat NU administrators is around 500 members. Those are members who have membership card (Kartamus). In reality, the members of Muslimat NU in Sokaraja could reach 6200 members in 6 districts. Meanwhile, the members of Muslimat NU in Banyumas who already have Muslimat membership card are around 12.000 people in 21 districts. In reality, it is about 62.000 members in 21 districts.

Because of the number of the members, this organization is very fragile to be used as mass mobilization in political events. Even though there is a decision of Muslimat NU which states that Muslimat NU is not politically affiliated with any

parties in Indonesia, in reality the elites realize that Muslimat NU has strategic position to get votes, and as candidates usually close to elites, the elites are going to lead the voters to vote the candidates. Nevertheless, if Muslimat NU committee allows the members to choose whoever they like, the members are going to vote for candidates or parties with the same background, Nadhliyin one.

The second is in-group favoritism. It is a characteristic which favor and judge their in-group more than the out-group. Members will judge the in-group members positively. With the existence of in-group favoritism, the members of a group will have strong solidarity within their group. Hence, Nahdliyin who consciously participate to be Muslimat NU members think that it is an opportunity to become Muslimat NU members because Muslimat NU is considered as a big organization with members everywhere and the members are very close each other emotionally. Moreover, Muslimat NU activities especially recitation is conducted on regular basis from house to house. This activity improves Muslimat NU members' awareness to stay active in Muslimat NU since this religious activity makes the members closer and let them get spiritual reward.

The third is intergroup differentiation. It is a behavior which emphasizes the differences between the in-group and out group. The difference between groups will influence one's perception to their own group and also to the other groups. According to Tajfel (in Hogg & Vaughn, 2002), groups with small power realize that they are different on power and status with the bigger ones. Thus the basic difference owned by Muslimat NU members is following what is ordered by the elites or their committee. The hierarchy model is established to form obedience and loyalty from members to the committee. In other words, obedience and loyalty from members are foundation to strengthen Muslimat NU organization. Those also become Muslimat NU power to fight for the Muslimat NU interest, especially women interest.

The fourth is conformity to in-group norms. The tendency to allow certain behavior for individual is in line with the norm existed in their in-group. Conformity is a tendency for someone to follow rules and pressure from their in-group even though there is no direct request from the group in order to feel accepted by the group. Consequently, as Muslimat NU is an organization based on religion, it has unwritten rule to tie the members to be loyal. The unwritten rule is the members must be active. In order to know this, the committee conducts recitation regularly as a platform to identify

members' activeness, to socialize programs, and to conduct internal meetings. Regular recitations hold in branch, branches, and the lowest level in different time. Because of the width of the areas, it is possible that every day there is Muslimat NU conducting a recitation. If there are any inactive members in recitation, usually organizers will not hesitate to address the member to be the inactive member.

The fifth is the group stereotype. It is a belief in certain group characteristics. It can be either positive or negative as stereotype is a fixed idea on certain groups. Hence, as stereotypes of Muslimat NU are tough and unstoppable, these spirits are owned by both Muslimat members and the committee. Moreover, although Muslimat NU members are mothers, they always attend recitations conducted by Muslimat NU, and they do not complain if the recitations are far away from their homes.

Then, the purpose of Muslimat NU movement which is realized through some programs is important both for members and the committee. Muslimat NU is a women's movement based on religion, and it has commitment to participate in overcoming issues in the society with their programs. There are eight sectors which become the main attention for Muslimat NU Banyumas, namely, *da'wah* (spreading Islam teachings), law and advocacy, organization and membership, education and regeneration, employment, education, cooperative economy, agribusiness and health.

Da'wah is conducted by Muslimat NU organizers through recitation forum. Da'wah is conducted to socialize government programs, to persuade kindness, and to prevent activities which may damage *aqidah* (moral) of members including to avoid the danger of terrorism and radicalism. Law and advocacy are sectors that are not very active because of the limitation of human resources. Thus, the program is limited to socialize the solution of domestic violence and gender abuse. Moreover, for advocacy, especially if it is domestic violence, the advocacy team from Muslimat NU cannot interfere. This is because the members who experience the abuse tend not to tell what have happened to them. For the members, the issues are their private problems, and the members as Moslem women have principle that 'it is not good revealing one's disgrace, especially if he or she is their own family.

In the organization and membership sector, the conducted programs have purposes to strengthen organization internally and to consolidate existed members in every area in Banyumas District. For example, the program is the socialization of

aswaha or *sunah waljama'ah*. In this program, Muslimat NU members are expected to be the obedient followers of Prophet Muhammad SAW by, one of them, spreading kindness to everyone especially their own family.

In the education and regeneration sector, Muslimat NU focuses on strengthening its human resources both the members and committee by conducting coaching from the highest level of the organization to the lowest one. For the employment sector, the organization cannot overcome the basic issue in Banyumas which is the high number of women migrants who work overseas. Besides, the low job vacancy for female workers in Banyumas is also another problem. Women who have no income are not responded seriously too. They may only get training like sewing conducted by Banyumas Manpower Department. Finally, the cooperation as the basis of populist economy is merely used as business entity to sell products which are usually products to worship from the members and committee.

In the education sector, Muslimat NU focuses on formal and informal education based on religion. Formal education arranged by Muslimat NU is done through Muslimat Educational Foundation (Yayasan Pendidikan Muslimat). It focuses on Pre-school and kindergarten. Meanwhile, informal education focuses on Qur'an education. In economy sector, the cooperation and agribusiness have not been directed maximally to empower family economy. Moreover, economy activities are limited to ceremonial events such as bazaar and distribution of basic foods. In health factor, it is organized by Muslimat Health Foundation (Yayasan Kesehatan Muslimat NU). This foundation focuses on social health activities such as free treatment, free IFA test and socialization of healthy lifestyle.

Besides, Muslimat NU as women's movement has specific identifications. These identities differentiate Muslimat NU organization with other similar organizations. The specific identities of Muslimat NU especially in Banyumas District are local wisdoms, namely, social work, mutual cooperation and militancy. To begin with, social work is an activity conducted by organizers and members without fee. This social activity is done based on calling, God's blessing, or husbands' permission to have roles outside domestic one. The members do the activities with '*lillahita'ala*' (sincerity) as they hope to get reward from God only. For the members, the sincerity in joining social works is

the key to acquire a better after-life or a way to bring fortune to them even if it is not in the material forms.

Besides, the spirit of mutual cooperation to improve their organization is shown by doing regular recitations. The money earned from the recitations is used to fund activities in eight sectors of NU Muslimat work programs as well as to assist misfortune members. Some members also conduct waqaf (giving land) for the prosperity of Muslimat NU members. Moreover, in addition to waqaf, the spirit of mutual cooperation is done by giving donation, for example, money, material, energy and ideas.

The last specific identity close to members and organizer of Muslimat is militancy. Militancy is strength to reach the expected goal. Women militancy in Muslimat NU cannot be compared to anyone. Although they have family, their spirit to stay and loyal to Muslimat deserve an applause. They will attend Muslimat recitation even though it is far from home. They are unstoppable to become sunah waljama'ah practitioners who never forget their role as mothers in their own family.

CONCLUSION

The specific identity owned by Muslimat NU becomes its strength to consolidate the members. This is an asset for Muslimat NU to grow and develop as one of women's movements which is independent, loyal, empowered and profound. Furthermore, this essential asset should be used by government to strengthen the connection in society and should become the gender focal point to support governments' programs. Finally, the existence of Muslimat can help the government to fulfill women's needs.

REFERENCES

<https://www.komnasperempuan.go.id/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/>

Musidah Mulia, Siti & Anik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pilcher, Jane & Imelda Whelehan. 2004, *50 Key Concepts in Gender Studies*, London Sage Publication.

Laporan Kegiatan Muslimat NU Banyumas Tahun 2016.

LAMPIRAN 4
BUKTI PELAKSANAAN
MENGIKUTI
SEMINAR NASIONAL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Dr. Soeparno Karangwangkal , Purwokerto 53122

Telp (0281) 625739, 634519 Fax (0281)6257739;

Website: <http://www.lppmunsoed.ac.id>; email: lppm_unsoed@yahoo.co.id

No. : 12340/UN23.14.4.DL.04/2017

Purwokerto, 2 November 2017

Lamp : 1 lembar

Hal : Undangan Pemakalah

Yth. Bapak/Ibu Soetji Lestari, Sofa Marwah, Oktafiani Catur Pratiwi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Dengan Hormat,

Bersama surat ini diberitahukan bahwa abstrak/makalah Bapak/Ibu/Sdr/i yang berjudul 'POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015' **DITERIMA** untuk **DIPRESENTASIKAN** dalam Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pada tanggal 17 - 18 November 2017 di Java Heritage Hotel Purwokerto.

Demikian surat pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Panitia,



Dr. Wahyuningrat, M.Si.

Lampiran 1. Susunan Acara Rangkaian Kegiatan Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII Tahun 2017

Jum'at, 17 Nopember 217	
07.30-08.00	Registrasi
08.00-08.15	Pra Acara: 1. Tarian Selamat Datang 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
08.15-08.30	1. Laporan Ketua Panitia 2. Sambutan Pembukaan oleh Rektor
08.30 – 08.45	Coffee break
08.45 - 09.45	Keynote Speaker Prof Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc., Ph.D
09.45-11.30	1. BKKBN Jateng Wagino, SH, M.Si. 2. Dr.sc.hum. Budi Aji, SKM.,M.Sc.
11.30-13.00	ISHOMA
13.00-17.00	Sesi Paralel
Sabtu, 18 Nopember 2017	
08.00-08.30	Registrasi
08.30-12.30	Sesi Paralel
12.30-13.30	ISHOMA
13.30-17.00	Sesi Paralel (lanjutan)
17.00	Penutupan



SURAT TUGAS

Nomor : 2721/UN.23.6/PB/2017

Dasar : Surat Undangan Pemakalah No. 12340/UN23.14.4.DL.04/2017 (Ketua LPPM Unsoed)

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

MENUGASKAN

No	NIP	Nama Dosen	Pangkat	Jabatan	Sebagai
1	196205231988032001	Dr. Soetji Lestari, M.Si.	IV/c	Lektor Kepala	Pemakalah
2	197504262003122001	Dr. Sofa Marwah, S.IP. M.Si.	III/d	Lektor Kepala	Pemakalah
3	197910272005012001	Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP., MA	III/c	Lektor	Pemakalah

Untuk mengikuti seminar **Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII Tahun 2017 yang diselenggarakan LPPM Unsoed** dengan judul paper "Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2015" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 November 2017 sampai Sabtu, 18 November 2017

Tempat : Java Heritage Hotel Purwokerto

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Tugas ini dibebankan pada "Kemenristek Dikti (Skim Penelitian PSHP) Tahun 2017".

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



16-11-2017 22:57:15
36.77.151.145

Purwokerto, Rabu 15 November 2017

Dekan FISIP

Dr. Jarot Santoso, M.S.

NIP. 195710291986011001



"Tema: 6 (Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan)"

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

Oleh

Soetji Lestari

FISIP Unsoed/Jurusan Sosiologi – Kampus Unsoed Grendeng Purwokerto
soetjilestari123@gmail.com

Sofa Marwah

FISIP Unsoed/Jurusan Ilmu Politik – Kampus Unsoed Grendeng Purwokerto
sofamarwah75@gmail.com

Oktafiani Catur Pratiwi

FISIP Unsoed/Jurusan Ilmu Politik – Kampus Unsoed Grendeng Purwokerto
oktafiani.cp@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk memaparkan hasil potret pembangunan manusia berbasis gender yang ada (IPG dan IDG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2015. Kajian didasarkan pada analisis data sekunder yaitu Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2015 yang diterbitkan oleh BPS dan KPPPA. Untuk melihat hasil capaian, potret data IPG dan IDG Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan data yang ada di lingkup regional (Jawa Tengah) dan nasional (Indonesia). Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas berada di bawah level regional maupun nasional. Rendahnya IPG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh komponen tingginya *gender gap* pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan di bawah angka regional dan nasional, sementara pengeluaran perkapita laki-laki ada di atas angka regional dan nasional, sehingga terjadi *gender gap* yang cukup tinggi. Sementara rendahnya IDG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh semua komponen IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif (18 persen), perempuan yang menjadi manajer (45,90 persen), dan sumbangan pendapatan rumah tangga (31,29 persen). IDG Kabupaten Banyumas ini juga berada di bawah angka regional dan nasional. Untuk itu diperlukan komitmen politik dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerja pembangunan yang lebih responsif gender, terutama yang menyangkut kesenjangan pendapatan dan keterlibatan politik perempuan.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender

ABSTRACT

This paper aims to present an outcome of an existing gender-based human development (IPG and IDG) portfolio in Banyumas District in 2015. The study is based on a secondary data analysis of the Human Development Report of 2015 published by BPS and KPPPA. To see the results of achievements, portraits of data on IPG and IDG of Banyumas Regency are compared with the existing data in the regional scope (Central Java) and national (Indonesia). The analysis shows that the Gender Development Index (IPG) and the Gender Empowerment Index (IDG) of Banyumas Regency are below regional and national level. The low IPG of Banyumas Regency is contributed by the high gender gap component of per capita expenditure between men and women. Women per capita expenditure is below regional and

national figures, while male per capita expenditure is above regional and national figures, resulting in a fairly high gender gap. While low IDG of Banyumas Regency is contributed by all components of IDG, namely women who sit in legislative institutions (18 percent), women who become managers (45.90 percent), and household income (31.29 percent). The IDG of Banyumas Regency is also below regional and national figures. This requires the political commitment of the Regional Government to improve the development performance of a more gender responsive, especially regarding the income gap and political involvement of women.

Key Words: Gender Inequality, GenderDevelopment Index

PENDAHULUAN

Orientasi utama pembangunan adalah pembangunan manusia, baik dia sebagai subyek maupun sebagai objek pembangunan yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Pembangunan manusia dilakukan diarahkan dan ditujukan untuk semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya pembangunan yang ada menunjukkan masih adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia penduduk perempuan. Ketimpangan gender adalah merupakan ketimpangan global, termasuk Indonesia, sehingga telah menjadi komitmen dunia (yang diprakarsai oleh badan dunia PBB/UNDP) untuk memperkenalkan konsep pembangunan manusia yang responsif gender melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 1995-an. Konsep ini kemudian dipertegas dengan dideklarasikannya Millenium Development Goals (MDGs) dimana salah satu tujuannya adalah mendorong tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015. Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia (Bappenas, 2011).

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Bappenas pencapaian MDGs di Indonesia pada 2011 menggambarkan bagaimana perempuan masih tertinggal dari laki-laki sehingga mencerminkan pembangunan berbasis gender belum tercapai secara penuh. Tercatat dari segi pendidikan, rasio APM dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki belum mencapai target 100 persen. Dari sektor ketenagakerjaan, kontribusi perempuan dalam sektor upahan di sektor non pertanian baru mencapai 36,6 persen. Sementara apabila dilihat dari segi pemberdayaan, proporsi perempuan yang berada di parlemen baru mencapai angka 18,4 persen. Segala keteringgalan tersebut menggambarkan bahwa perempuan masih belum berdaya (Alfana, dkk, 2015), sehingga perlu dilihat pula bagaimana capaian di tingkat daerah. Hal ini mengingat bahwa amanah MDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berlaku untuk semua wilayah, baik itu lingkup kabupaten/kota, provinsi dan negara. Indonesia yang membawahi banyak wilayah kabupaten/kota dan provinsi tentu akan dihadapkan pada berbagai kondisi capaian MDGs. Di

Indonesia komitmen untuk pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan gender ini ditandai dengan terbitnya Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Makalah ini bertujuan untuk melihat potret pembangunan manusia berbasis gender yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015. Tahun 2015 dipilih sebagai tahun target capaian MDGs.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas ini didasarkan pada analisis data sekunder yaitu yang bersumber pada buku *Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2016* yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam buku tersebut berisi data tahun 2015. Tahun 2015 dipilih sebagai bahan analisis karena sebagai tahun akhir target capaian MDGs yang antara lain tujuannya adalah capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melihat hasil capaian PMBG Kabupaten Banyumas digunakan analisis komparasi dengan menggunakan hasil capaian di tingkat provinsi Jawa Tengah dan nasional dengan sumber data yang sama, sehingga memiliki nilai komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai saat ini pembangunan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender, sehingga perlunya komitmen untuk melakukan kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini terkait upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana jumlah SDM perempuan cukup besar namun secara kualitas masih banyak tertinggal; sekaligus untuk mendukung mewujudkan komitmen Internasional menuju Kesetaraan Gender 50:50 pada tahun 2030.

Untuk itu berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup (KPPPA, 2016), sehingga dengan demikian isu pengarusutamaan gender mendapat prioritas dalam pembangunan.

Di Indonesia isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan,

pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

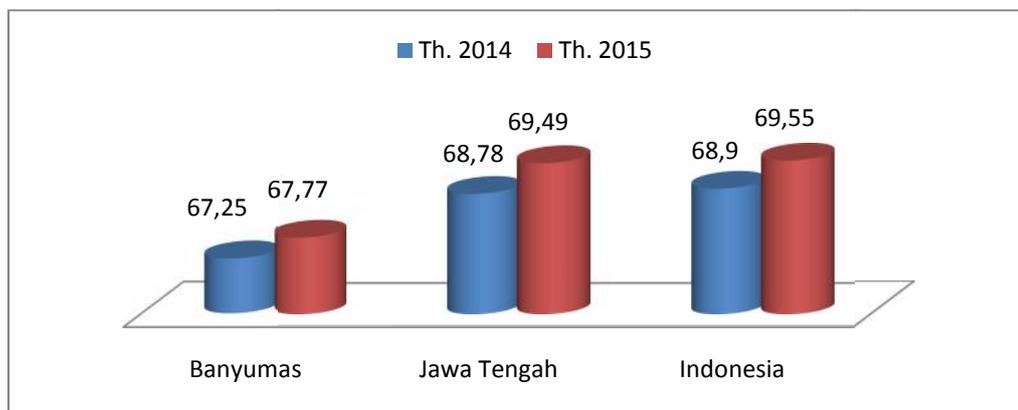
Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi bagaimana pembangunan berperspektif gender telah berjalan. Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berdasarkan data tahun 2015 sebanyak 1 635 909 jiwa terdiri dari 817.383 jiwa penduduk laki-laki (49,97 persen) dan 818.526 jiwa penduduk perempuan (50,03 persen), sehingga *sex ratio* secara umum di tingkat kabupaten adalah 99,86. Ini artinya bahwa rasio perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak sedikit.

Untuk mengevaluasi bagaimana pembangunan berpersktif gender antara lain dengan melihat kondisi kualitas SDM secara umum dan kualitas SDM perempuan secara khusus yakni melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM menggambarkan diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan. Indikator-indikator ini menggambarkan kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sementara IPG menggambarkan selisih antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Untuk IDG tidak lagi mengukur pada kebutuhan dasar melainkan pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan eksistensinya sebagai manusia yang perlu untuk mengaktualisasikan diri.

Dalam laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 yang diterbitkan KPPPA, disebutkan bahwa berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) tahun 2015, IPM Indonesia berada pada level sedang (UNDP: *Medium Development Index*) dengan capaian IPM sebesar 68,38, atau berada di peringkat 110 dari 188 negara dan berada di bawah rata-rata dunia (71,05). Dibandingkan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari sepuluh negara. Meskipun demikian, dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM, Indonesia termasuk dalam ***World's Top Movers in HDI Improvement*** untuk periode tahun 1970-2010.

Sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan KPPPA dan BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014-2015 masih berada di bawah angka provinsi (Jawa Tengah) dan angka nasional (Indonesia). Ini artinya juga di bawah rata-rata dunia (tahun 2015 71,05).

Gambar 1. Tren Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015 dalam Perspektif Regional dan Nasional



Sumber: KPPPA dan BPS, 2016.

Rendahnya IPM di Kabupaten Banyumas sebagaimana terlihat dalam tabel 1. di bawah lebih disebabkan oleh faktor ekonomi (pengeluaran), terutama apabila dibandingkan dalam konteks nasional. Sementara apabila dibandingkan pada tingkat regional Jawa Tengah, Banyumas hanya lebih rendah dalam Angka Harapan Hidup. Sementara bidang pendidikan dan ekonomi kondisi Kabupaten Banyumas lebih baik. Rendahnya faktor ekonomi di Kabupaten Banyumas ini bisa dipahami mengingat kabupaten Banyumas memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi yakni 17,23 persen, sementara di Jawa Tengah hanya 13,27 persen (www.bps.go.id.) Ini artinya bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Jawa Tengah.

Tabel 1. Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2015

Wilayah	AHH (Tahun)		HLS (%)		Rata-2 Lama Sekolah		Pengeluaran		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Banyumas	72,92	73,12	12,56	12,57	7,31	7,31	9.580	10.104	67,25	67,77
Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9.640	9.930	68,78	69,49
Indonesia	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9.903	10.150	68,9	69,55

Sumber: KPPPA, 2016.

Pada data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Kabupaten Banyumas juga berada di bawah angka regional dan nasional, bahkan selisih angka relatif tinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel 2 di bawah. IPG adalah merupakan IPM yang memperhatikan selisih capaian IPM antara laki-laki dan perempuan. IPM selama ini dianggap kurang sensitif gender, karena pada kenyataannya ada perbedaan kualitas SDM laki-laki dan perempuan yang cukup menyolok. *Gender-related Development Index (GDI)* adalah merupakan ukuran kualitas SDM yang memperhatikan selisih perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain sama dengan IPM, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi dengan fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tabel di bawah menggambarkan *trend* GDI/IPG di Kabupaten Banyumas dalam konteks regional (Jawa Tengah) dan nasional (Indonesia) sehingga dapat dilihat bagaimana capaian masing-masing wilayah.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas Tahun 2010- 2015 dalam Konteks Regional dan Nasional

Wilayah	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
Banyumas	85,14	86,07	86,25	86,53	86,54	86,66
Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21
Indonesia	89,42	89,2	90,07	90,19	90,34	91,03

Sumber data: KPPPA (2016).

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa capaian IPG Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 selalu berada di bawah data regional maupun nasional, bahkan dengan selisih perbedaan yang cukup menyolok. Sementara perbedaan di tingkat regional dan nasional tidak terpaut jauh. Hal ini tentunya menjadi “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk memberikan prioritas pembangunan yang lebih sensitif gender, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar manusia.

Pada tabel 3. di bawah memperlihatkan selisih capaian komponen IPM antara penduduk laki-laki dan perempuan. Komponen tersebut adalah Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ekonomi).

Tabel 3. Komponen IPG Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	AHH		HLS		RLS		PPD		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Banyumas	71,15	74,98	12,86	12,32	7,91	6,75	14.554	7.047	74,79	64,81	86,66
Jawa Tengah	72,05	75,95	12,29	12,47	7,59	6,50	13.469	9.001	73,39	67,67	92,21
Indonesia	68,93	72,78	12,42	12,68	8,35	7,35	14.163	8.464	73,58	66,98	91,03

Sumber data: KPPPA, 2016.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rendahnya IPM perempuan Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh faktor ekonomi, dimana komponen PPD antara laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang cukup tajam. PPD perempuan Kabupaten Banyumas berada di bawah angka regional dan nasional, sebaliknya PPD laki-laki Kabupaten Banyumas berada di atas angka regional dan nasional, sehingga menghasilkan *gender gap* yang cukup signifikan. Ini artinya wajah kemiskinan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyumas adalah berwajah perempuan (Hubeis, 2010). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hubeis (2010), pada saat terjadi krisis moneter (tahun 1998-2000) kesenjangan antara HDI dan GDI semakin membesar, tetapi kemudian mengecil ketika

perekonomian Indonesia semakin membaik. Sementara *gender gap* pada komponen AHH, HLS, RLS tidak terpaut jauh, bahkan pada bidang kesehatan angka harapan hidup perempuan lebih baik daripada laki-laki dan perempuan di tingkat nasional.

Kalau HDI/GDI merupakan gambaran kualitas dasar sumber daya manusia, maka GEM (*Gender Empowerment Measure*) atau IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) adalah merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/ partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi Partisipasi Politik menggunakan indikator proporsi (keterwakilan) perempuan dan laki-laki di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD); Dimensi Partipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan menggunakan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan; Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi menggunakan indikator perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki (KPPPA dan BPS 2012). Sebagaimana IPM dan IPG, data IDG Kabupaten Banyumas juga memperlihatkan hasil yang lebih rendah dibanding tingkat regional dan nasional, sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
Kab. Banyumas	66,57	67,64	64,78	65,50	64,41	67,37
Jawa Tengah	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80
Indonesia	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83

Sumber data: KPPPGA, 2016.

Capaian perkembangan IDG di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010 sampai tahun 2015 relatif lambat dibanding capaian IDG di tingkat provinsi. Tahun 2010 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi tidak terlalu jauh, yakni 1,39, namun pada tahun 2015 selisih IDG Kabupaten Banyumas dan provinsi meningkat menjadi 6,53. Bahkan pada tahun 2014, IDG Kabupaten Banyumas sempat mengalami penurunan di saat IDG Jawa Tengah justru meningkat tajam. Namun pada tahun 2015 IDG Kabupaten Banyumas meningkat cukup signifikan, sementara kenaikan IDG di tingkat provinsi hanya kecil. Meskipun ada kenaikan IDG yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2014-2015, namun capaian IDG di Kabupaten Banyumas masih jauh di bawah capaian IDG tingkat provinsi. Artinya capaian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas belum memuaskan sebagaimana yang ditargetkan oleh MDGs pada tahun 2015. Hal ini terkait dengan komponen masih rendahnya partisipasi politik dan ekonomi perempuan di Kabupaten Banyumas sebagaimana terlihat dalam tabel 4 di bawah.

Tabel 4. Komponen IDG Kabupaten Banyumas Tahun 2015

Wilayah	Keterlibatan Pr dlm Parlemen	Perempuan sbg Manager	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
Kab. Banyumas	18,00	45,90	30,29	67,37
Jawa Tengah	24,24	47,72	34,06	74,80
Indonesia	17,32	46,03	36,03	70,83

Sumber data: KPPPGA, 2016

Seperti halnya IPG, komponen yang menyumbangkan rendahnya IDG Kabupaten Banyumas adalah masih rendahnya keberadaan perempuan dalam kursi legislatif dan sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Banyumas hanya 30,29 persen (lihat tabel 4). Karena itu, perlu kajian yang seksama mengenai rendahnya sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Banyumas ini. Sementara keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai indikator penting untuk melihat bagaimana perempuan memiliki *bargaining power*, dimana perempuan bisa terlibat dalam keputusan-keputusan politis yang strategis untuk kemaslahatan umat, khususnya menyangkut perbaikan kaum perempuan juga masih rendah yaitu hanya 18 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional (17 persen) namun masih di bawah capaian provinsi (24 persen). Angka ini masih dari yang diamanatkan oleh UU No. 2 tentang Parpol dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang menyangkut keterwakilan 30 persen perempuan.

Tabel 5 di bawah ini menggambarkan distribusi keberadaan perempuan dalam berbagai partai politik.

Tabel 5. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2015

No	Partai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PDI - P	12	4	16
2	Golkar	6	-	6
3	PKB	4	3	7
4	PAN	4	-	4
5	PPP	3	-	3
6	PKS	4	-	4
7	Demokrat	2	1	3
8	Gerindra	5	1	6
9	Hanura	-	-	-
10	Nasdem	1	-	1
Banyumas		41	9	50

Sumber data: <https://banyumaskab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/104>

Berdasarkan tabel 5 di atas, dari 50 anggota DPRD hanya ada 9 anggota legislatif perempuan (18 persen), masih jauh di bawah dari 30 persen. Meskipun secara absolut legislatif

perempuan yang paling banyak adalah dari partai PDI-P (4 orang atau 25 persen dari 16 orang anggota legislatif PDI-P), namun secara persentase adalah dari PKB, yakni 43 persen atau 3 perempuan dari 7 anggota legislatif PKB yang ada di DPRD Kabupaten Banyumas. Dari tabel 5 di atas juga terlihat bahwa 10 partai yang memiliki kursi di DPRD, hanya 4 partai yang memiliki anggota legislatif perempuan, yakni PDI-P (4 orang perempuan dari 16 anggota yang dimiliki), PKB (3 orang perempuan dari 7 anggota yang dimiliki), Demokrat (1 orang perempuan dari 3 anggota yang dimiliki), dan Gerindra (1 orang perempuan dari 6 anggota yang dimiliki). Hal ini menjadikan perlunya pendidik politik untuk kaum perempuan agar mereka lebih memiliki minat terjun ke dunia politik dan mewarnai dunia politik yang lebih feminin. Di satu sisi juga diperlukan adanya kondisi yang kondusif bagi perempuan untuk bisa berperan serta secara maksimal. Dalam analisis Hubeis (2010) bahwa situasi politik yang ada masih menempatkan para perempuan politisi dalam situasi diskriminasi politik berbasis gender yang membuat mereka tidak lagi menjadi mitra politik yang dikawal dengan *affirmative action* (quota 30 persen keterwakilan perempuan), melainkan harus berjuang sendiri sebagai layaknya seorang politisi kawakan yang harus berjuang dengan prinsip-prinsip demokratis dan *fairness*. Dengan kondisi ini ketimpangan gender dalam bidang politik akan tetap tinggi.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyumas berada di bawah level regional maupun nasional. Rendahnya IPG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh komponen tingginya *gender gap* pengeluaran perkapita antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita perempuan di bawah angka regional dan nasional, sementara pengeluaran perkapita laki-laki ada di atas angka regional dan nasional, sehingga terjadi *gender gap* yang cukup tinggi. Sementara rendahnya IDG Kabupaten Banyumas disumbangkan oleh semua komponen IDG, yakni perempuan yang duduk di lembaga legislatif (18 persen), perempuan yang menjadi manajer (45,90 persen), dan sumbangan pendapatan rumah tangga (31,29 persen). IDG Kabupaten Banyumas ini juga berada di bawah angka regional dan nasional.

Hasil kajian ini secara umum memperlihatkan bahwa tujuan MDGs untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015 di Kabupaten Banyumas belum sebagaimana yang diharapkan. Faktor kemiskinan yang ada memberikan dampak terhadap upaya capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk itu diperlukan komitmen politik dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerja pembangunan yang lebih responsif gender, terutama yang menyangkut kesenjangan pendapatan dan keterlibatan politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin; Desta Fauzan A., Warastri Laksdiasri, Ayu Rahmaningtyas. 2015. "Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia" dalam *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2015*, Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016. *Banyumas Dalam Angka 2016*, Purwokerto.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*, Jakarta.
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Manusia dari Masa ke Masa*, IPB Press, Bogor.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Jakarta.
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2015 – Work for Human Development*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf diakses pada 2 November 2017 jam 08.02

602

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Sertifikat

Diberikan kepada

Soetji Lestari
Sebagai

PEMAKALAH

SEMINAR NASIONAL

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERDESAAN DAN
KEARIFAN LOKAL BERKELANJUTAN VII**

Purwokerto 17 - 18 November 2017

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Dr. Ir. Achmad Nibal, M.Si.
NIP. 19580331 198702 1 001

Ketua Panitia

LPPM UNSOED



Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP. 19600505 198601 1 002



Dr. Wahyuningrat, M.Si.
NIP. 19661111 199203 2 003